

**PERKEMBANGAN  
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Triwulan III - 2006**

**Kantor Bank Indonesia  
Manado**

## **Kata Pengantar**

Sesuai Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dijelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.

Sejalan dengan itu dan diperkuat oleh momentum otonomi daerah, setiap Kantor Bank Indonesia (KBI) yang berada di daerah, termasuk KBI Manado dituntut berperan sebagai *"economic intelligent and research unit"* yang diharapkan mampu memberikan informasi ekonomi dan keuangan daerah yang lebih akurat, menyeluruh, dan terkini sebagai bahan masukan Kantor Pusat Bank Indonesia dalam perumusan dan penetapan kebijakan moneter yang tepat sasaran. Penyajian informasi ekonomi dan keuangan daerah tersebut, disusun dalam bentuk Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, yang berisi kajian dan analisis meliputi tingkat inflasi, PDRB, dan kinerja produksi kegiatan dunia usaha, perbankan dan sistem pembayaran serta keuangan daerah secara triwulanan.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Bank Indonesia melalui penyampaian informasi mengenai kondisi perekonomian dan keuangan kepada *stakeholder* maka KBI perlu menyampaikan informasi dimaksud kepada *stakeholder* di daerah seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, institusi keuangan, dan lembaga lainnya di daerah. Kami senantiasa mengharapkan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas dan manfaat laporan di masa yang akan datang. Akhir kata, kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan dan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Manado, 30 September 2006

BANK INDONESIA MANADO



Joko Wardoyo  
Pemimpin


**Daftar Isi**

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<i>halaman 4</i>
<b>KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL</b>	<i>halaman 11</i>
<b>Sisi Permintaan</b>	<i>halaman 12</i>
<b>Sisi Penawaran</b>	<i>halaman 18</i>
<b>Analisis LQ (Location Quatient)</b>	<i>halaman 25</i>
<b>Analisis Shift Share Provinsi Sulawesi Utara</b>	<i>halaman 27</i>
<b>Box 1: Penelitian Produktivitas Total Faktor (TFP)</b>	<i>halaman 30</i>
<b>PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL</b>	<i>halaman 32</i>
<b>Inflasi Triwulanan (Q.T.Q)</b>	<i>halaman 33</i>
<b>Inflasi Tahunan (Y.O.Y)</b>	<i>halaman 35</i>
<b>Komoditas Penyumbang Inflasi (Y.O.Y)</b>	<i>halaman 36</i>
<b>Komoditas Penyumbang Deflasi (Y.O.Y)</b>	<i>halaman 37</i>
<b>Box 2 : Dampak Kebijakan Bank Indonesia Berupa Penurunan SBI</b>	<i>halaman 39</i>
<b>PERKEMBANGAN KEUANGAN DAN PASAR KEUANGAN</b>	<i>halaman 42</i>
<b>Fungsi Intermediasi</b>	<i>halaman 42</i>
<b>Risiko Kredit</b>	<i>halaman 50</i>
<b>Perkembangan BPR</b>	<i>halaman 54</i>
<b>PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN</b>	<i>halaman 56</i>
<b>Perkembangan Aliran Uang Kartal</b>	<i>halaman 56</i>
<b>Penemuan Uang Palsu</b>	<i>halaman 59</i>
<b>Perkembangan Kliring Lokal (Tunai)</b>	<i>halaman 59</i>
<b>Transaksi RTGS</b>	<i>halaman 60</i>
<b>PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH</b>	<i>halaman 62</i>
<b>Perkembangan Keuangan Daerah Sulawesi Utara (Kab/Kota/Provinsi)</b>	<i>halaman 62</i>
<b>Keuangan Daerah di Tingkat Provinsi</b>	<i>halaman 64</i>
<b>Implikasi Kebijakan</b>	<i>halaman 68</i>
<b>Box 3 : Mekanisme Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (Proyek)</b>	<i>halaman 69</i>
<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<i>halaman 70</i>
<b>Pengangguran</b>	<i>halaman 70</i>
<b>Kemiskinan</b>	<i>halaman 72</i>
<b>OUTLOOK KONDISI EKONOMI</b>	<i>halaman 74</i>

<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<i>Halaman 74</i>
<b>Inflasi</b>	<i>Halaman 78</i>
<b>TOPICAL ISSUE 1 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN TAMBANG MINERAL</b>	<i>Halaman 81</i>
<b>LAMPIRAN</b>	<i>Halaman 84</i>

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Kantor Bank Indonesia Manado**

**Jl. 17 Agustus No. 56**

Ph. 0431-868102, 868103, 868108

Fax. 0431-866933

Email : [anazaruddin@bi.go.id](mailto:anazaruddin@bi.go.id)

[hasiando@bi.go.id](mailto:hasiando@bi.go.id)

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

*Perekonomian Sulawesi Utara selama triwulan III 2006 memperlihatkan konsistensi kemajuan yang cukup berarti bila dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan tahunannya selama triwulan III 2006 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Faktor-faktor pendorong percepatan laju pertumbuhan tersebut diantaranya adalah meningkatnya kegiatan konsumsi swasta dan meningkatnya kegiatan investasi yang tercermin dari maraknya pembangunan ruko, mal dan hotel serta cukup besarnya realisasi pengeluaran pemerintah daerah selama triwulan laporan juga memberikan kontribusi percepatan laju pertumbuhan Sulawesi Utara. Hal ini masih didukung pula oleh perbaikan kinerja perdagangan Sulawesi Utara yang ditunjukkan oleh menurunnya nilai impor yang mengindikasikan berkurangnya tingkat ketergantungan Sulawesi Utara terhadap daerah/negara lain.*

### **PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI REGIONAL**

Pada triwulan III 2006, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara tahunan (y.o.y) tercatat sebesar 6,04% atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 5,72%. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara terutama di dorong oleh sektor-sektor utama antara lain sektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sedangkan dari sisi permintaan, laju pertumbuhan pada triwulan ini terutama disumbangkan oleh kegiatan konsumsi khususnya konsumsi swasta.

Sektor pertanian pada triwulan III 2006 masih tercatat sebagai penyumbang tertinggi pertumbuhan Sulawesi Utara sebesar 1,28% walaupun terus mengalami penurunan dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Menurunnya kontribusi sektor pertanian seiring dengan menurunnya jumlah produksi beberapa komoditi andalan Sulawesi Utara diantaranya kelapa, kopra, cengkeh. Khusus komoditi kelapa, usia pohon kelapa yang rata-rata sudah cukup tua dan tidak adanya program penanaman kembali menyebabkan produktifitas pohon-pohon kelapa di Sulawesi Utara terus menurun. Hal ini tak lain sebagai dampak kenaikan harga BBM sehingga penghasilan yang diperoleh tidak lagi mampu menutupi biaya operasional yang ada.

Sektor bangunan merupakan penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 1,11% terhadap laju pertumbuhan secara umum. Perkembangan sektor ini tak lain sebagai dampak pesatnya perkembangan sektor perdagangan, hotel, restoran yang telah menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya di Sulawesi Utara dalam bentuk pembangunan sarana prasana dan infrastruktur. Keadaan ini tercermin dari giatnya pembangunan pusat perbelanjaan, mal dan hotel di Sulawesi Utara diantaranya pusat perbelanjaan Hypermart, Hotel Quality, Hotel Sedona, Mal Boulevard, dan Mal Manado Town Square.

Hal ini didukung pula oleh hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bulan September 2006 yang menunjukkan peningkatan indeks riil penjualan eceran khususnya untuk komoditi semen, pasir dan perlengkapan konstruksi. Namun demikian, dukungan perbankan untuk melakukan pembiayaan di sektor ini cenderung tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa pesatnya perkembangan konstruksi di wilayah Sulawesi Utara khususnya Kota Manado lebih mengandalkan pembiayaan swasta mandiri.

Penyumbang berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi, masing-masing dengan kontribusi sebesar 0,85%. Perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran tak lepas dari berlangsungnya masa liburan sekolah selama triwulan laporan yang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional selama triwulan III 2006 dari 4.166 orang naik menjadi 4.745 orang menjadi 13,90%. Sedangkan perkembangan sektor pengangkutan dan komunikasi tercermin dari maraknya pembangunan toko/gerai hand phone selain pembangunan infrastruktur/jaringan telekomunikasi yang telah merambah daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

Perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih selama triwulan laporan tumbuh positif sebesar 5,80% dengan sumbangan sebesar 0,05% terhadap laju pertumbuhan secara umum. Cenderung stagnantnya sumbangan sektor ini tak lepas dari relatif konstannya daya energi terjual yang hanya tumbuh 1,28% dari 63,91 MW pada Juni 2006 menjadi 64,72 MW.

Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 7,23% pada triwulan laporan. Pertumbuhan sektor ini disumbangkan oleh seluruh sub sektor yang ada yaitu sub sektor minyak dan gas bumi, sub sektor pertambangan tanpa migas dan sub sektor penggalian. Sementara itu perkembangan sektor industri pengolahan khususnya sub sektor industri pengolahan selama triwulan laporan tumbuh 5,80% dengan sumbangan sebesar 0,46% terhadap laju pertumbuhan secara umum. Pertumbuhan sektor ini mencerminkan bahwa pelaku usaha mulai mampu melakukan berbagai macam penyesuaian terhadap dampak kenaikan harga BBM antara lain dengan melakukan efisiensi.

Sektor keuangan-persewaan dan jasa-jasa tercatat meningkat pada triwulan laporan sebesar 6,12% dengan sumbangan sebesar 0,41%, naik di bandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 5,35%. Kenaikan ini disumbangkan oleh seluruh sub sektor yang ada yaitu bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, dan jasa perusahaan. Hal ini menandakan bahwa sektor keuangan memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi perkembangan ekonomi Sulawesi Utara.

Dari sisi pengeluaran, kegiatan konsumsi swasta masih merupakan lokomotif perekonomian Sulawesi Utara dengan pertumbuhan 17,14% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 11,31%. Laju pertumbuhan ini terutama disumbangkan oleh kegiatan konsumsi rumah tangga khususnya konsumsi bukan makanan. Tingginya kegiatan konsumsi selama triwulan laporan antara lain berkaitan dengan penyelenggaraan even berskala besar di Sulawesi Utara antara lain kongres dokter seluruh Indonesia di Manado, penyelenggaraan HUT (Hari Ulang Tahun) Kota Manado dan penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara. Peningkatan kegiatan konsumsi swasta tercermin pula dari peningkatan indeks riil penjualan eceran khususnya untuk komoditi bahan makanan, makanan jadi serta kendaraan dan suku cadang. Kondisi ini didukung pula dari hasil Survey Ekspektasi Konsumen (SEK) Kota Manado untuk periode Bulan September 2006 yang memperlihatkan indeks penghasilan saat ini yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

## **PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL**

Laju Inflasi kumulatif kota Manado sampai dengan triwulan III 2006 (periode Januari-September) tercatat sebesar 3,76% (y.t.d). Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif pada triwulan yang sama tahun 2005 lalu yang tercatat

sebesar 6,98% (y.t.d). Bila dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif secara nasional maupun zona sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) yang tercatat masing-masing 4,06% (y.t.d) dan 5,61% (y.t.d), laju inflasi kota Manado juga relatif lebih rendah. Sementara itu secara tahunan, laju inflasi kota Manado tercatat sebesar 15,15% (y.o.y) atau 2,15% (q.t.q), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 15,98%.

Sumber inflasi Kota Manado selama triwulan laporan terutama berasal dari kelompok bahan makanan khususnya komoditi beras, daging ayam ras, cakalang, tude, teri, telur ayam ras, dengan sumbangan sebesar 2,02% (q.t.q). Khusus komoditi beras, kenaikan harga ini lebih disebabkan oleh terganggunya pasokan akibat musim kemarau selama triwulan laporan. Sedangkan untuk komoditi lainnya lebih disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat dibandingkan dengan pasokan yang ada. Kelompok penyumbang inflasi berikutnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan sumbangan (0,06%), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,02%), kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (0,02%), kelompok sandang (0,02%), kelompok kesehatan (0,02%) serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (0,01%). Sementara itu, berdasarkan kenaikan harganya, komoditi beras, jasa angkutan dalam kota, minyak tanah, bensin dan cakalang tercatat diantara 10 (sepuluh) komoditi dengan laju kenaikan harga tertinggi (di atas 15%).

## **PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN PASAR KEUANGAN**

Kondisi makro ekonomi nasional yang relatif stabil selama triwulan laporan ternyata berpengaruh positif terhadap perkembangan berbagai indikator perbankan di Sulawesi Utara. Total aset perbankan sampai dengan Agustus 2006 tercatat Rp8.099 miliar atau meningkat 0,77% dibandingkan posisi Juni 2006. Kenaikan total aset ini lebih banyak disebabkan oleh meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan di Sulawesi Utara yang diiringi dengan meningkatnya penyaluran kredit. Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum sampai dengan posisi Agustus 2006, jumlah DPK di Sulawesi Utara tercatat sebesar Rp5.394 miliar atau naik 1,33% dibandingkan posisi Juni 2006.

Dari sisi pembiayaan, jumlah kredit yang berhasil disalurkan meningkat 1,81% hingga mencapai jumlah Rp4.703 miliar. Berdasarkan jenisnya, kenaikan ini terutama terjadi pada jenis kredit investasi dan konsumsi. Sedangkan jenis kredit modal kerja justru mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan sektoralnya, penyaluran kredit

terutama didominasi sektor konsumsi dengan share sebesar 56,24% dan sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan share 25,91%. Keadaan ini terbukti dengan terus menjamurnya pembangunan kios-kios, restoran, dan bisnis perhotelan di Sulawesi Utara.

Sementara itu, pangsa kredit UMKM di Sulawesi Utara mencapai 62,14% dari jumlah total kredit yang disalurkan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,71% dibandingkan posisi Juni 2006. NPLs kredit UMKM relatif kecilnya namun sebagian besar masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan berdasarkan jenis penggunaannya sebagian besar masih diklasifikasikan dalam kredit konsumtif (kendaraan bermotor, rumah, dan peralatan rumah tangga. Bank Indonesia di daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan UMKM, diantaranya adalah pemberian bantuan teknis. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong bergerakinya sektor riil, khususnya UMKM di daerah.

Fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari rasio LDR (*Loan To Deposit Rasio*) berjalan cukup baik di Sulawesi Utara. Pada bulan Agustus 2006, rasio LDR mencapai 87,20% atau meningkat dibandingkan posisi Juni 2006 yang hanya sebesar 86,78%. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh peningkatan dana yang lebih *significant* dibandingkan peningkatan penyaluran kredit. Namun demikian, kenaikan kredit tidak dibarengi oleh perbaikan kualitas kreditnya yang tercermin dari rasio NPL (*Non Performing Loan*). Sampai dengan Agustus 2006, rasio NPL netto perbankan naik dari 1,97% pada Juni 2006 menjadi 3,74% pada Agustus 2006. Kencenderung terus meningkatnya rasio NPL sejak akhir tahun 2005 harus diwaspadai dan menjadi perhatian kita bersama.

## **PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN**

Aliran uang kartal di khasanah Kantor Bank Indonesia Manado sepanjang triwulan III 2006 diperkirakan dalam kondisi *net outflow*. Hal ini terjadi berkenaan dengan terus meningkatnya realisasi dana pembangunan proyek-proyek pemerintah selama triwulan III 2006 serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berkenaan penyelenggaraan even-even besar di Kota Manado antara lain penyelenggaraan kongres dokter seluruh Indonesia di Manado.

Jumlah penemuan uang palsu selama triwulan III 2006 diperkirakan tidak akan terlalu significant jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar selama ini. Hal ini tak lepas dari peran Bank Indonesia Manado yang secara berkala mengunjungi daerah-daerah tertentu untuk memberikan sosialisasi mengenai keaslian uang rupiah kepada para

pelaku usaha, perbankan dan pemerintah daerah. Sementara itu, umlah lembar dan nominal warkat kliring selama triwulan III 2006 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Utara terindikasi dari laju pertumbuhan ekonomi selama triwulan III 2006 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya sebelumnya.

### **PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH (APBD)**

Kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan akhir triwulan menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun belum terlalu optimal tercermin dari jumlah realisasi pendapatan yang telah mencapai 74,64% dari target pendapatan awal tahun sebesar 617,69 miliar. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah daerah tercatat sebesar 57,44% dari target anggaran yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi belanja daerah, realisasi untuk belanja modal untuk aparaturnya daerah telah mencapai 59,40%, sedangkan untuk belanja modal pelayanan publik telah mencapai 32,43%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi belanja fiskal sebagai salah satu stimulator kegiatan ekonomi telah berjalan cukup baik. Relatif baiknya pengelolaan dana keuangan ini tentunya diharapkan mampu mengurangi sumber-sumber tekanan inflasi pada akhir tahun anggaran.

### **PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Meskipun Indeks Kondisi Ekonomi saat ini membaik karena meningkatnya penghasilan saat ini ternyata hal itu tidak dialami oleh para pencari kerja. Meningkatnya jumlah pengangguran di Sulawesi Utara disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menyerap seluruh jumlah pencari kerja yang ada. Seiring dengan itu, masalah kemiskinan di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian mengingat relatif tingginya jumlah keluarga miskin di Sulawesi Utara.

### **OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI**

Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan IV 2006 diperkirakan akan tumbuh 5,99% s.d. 6,49%, sehingga secara keseluruhan pada tahun 2006, ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan akan tumbuh positif pada kisaran 5,53 s.d. 6,03%. Beberapa faktor yang diperkirakan akan memberikan stimulus bagi pertumbuhan adalah meningkatnya konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah menjelang akhir tahun. Sementara dari sisi

penawaran, sektor pertanian, perdagangan, bangunan, serta pengangkutan dan komunikasi akan menjadi lokomotif utama pertumbuhan Sulawesi Utara.

### **OUTLOOK INFLASI**

Secara tahunan, inflasi Kota Manado sampai dengan akhir tahun 2006 diperkirakan berkisar 7,5 s.d. 8,5% atau jauh lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan III 2006. Adapun laju inflasi secara triwulanan diperkirakan akan mencapai 2,90%. Salah satu penyebab menurunnya laju inflasi pada akhir tahun 2006 antara lain adalah kembalinya periode dasar perhitungan inflasi ke periode setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per Oktober 2005 yang lalu. Adapun sumber-sumber tekanan inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan berasal dari meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru, datangnya musim penghujan yang diperkirakan akan mengakibatkan terganggunya jalur distribusi barang dan jasa di beberapa daerah, meningkatnya realisasi pengeluaran/belanja pemerintah menjelang berakhirnya tahun anggaran serta kenaikan harga gas elpiji untuk industri per 11 September 2006 yang diperkirakan akan memiliki dampak multiplier bagi kegiatan produksi barang dan jasa.

## **BAB I KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL**

Secara umum, perekonomian Indonesia pada triwulan III 2006 menunjukkan perkembangan yang semakin baik disertai dengan stabilitas makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2006 diperkirakan tumbuh sebesar 5,4% (y.o.y). Di sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi cenderung membaik terutama pada komponen pengeluaran pemerintah dan ekspor. Pengeluaran pemerintah pada triwulan III terlihat semakin meningkat, sampai dengan Agustus 2006 defisit telah mencapai sekitar Rp 10 triliun atau sekitar 0,3% dari PDB. Sementara itu kinerja ekspor yang membaik juga disebabkan oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan masih tingginya harga komoditas dunia.

Terkait dengan itu, kondisi moneter selama triwulan III 2006 juga menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh kecenderungan inflasi yang terus menurun, nilai tukar rupiah yang stabil disertai volatilitas yang signifikan, serta likuiditas yang tetap terjaga. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut serta prospek inflasi ke depan yang diperkirakan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk 2006 dan 2007 yaitu masing-masing sebesar  $\pm 1\%$  dan  $6\pm 1\%$ , penurunan BI Rate terus dilakukan secara bertahap. Selama triwulan III 2006, penurunan BI Rate telah dilakukan selama tiga kali dengan total penurunan sebesar 125 bps hingga level BI Rate menjadi 11,25%.

Perekonomian Sulawesi Utara selama triwulan II 2006 cukup menggembirakan bahkan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara tahunan pada triwulan III 2006 sebesar 6,04% (y.o.y) atau naik dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 5,72%. Dari sisi permintaan, peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya konsumsi akibat membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian serta mulai pulihnya daya beli masyarakat. Sementara di sisi penawaran, peningkatan produksi ditandai oleh peningkatan kapasitas produksi secara terbatas berdasarkan Survey Kegiatan Dunia Usaha periode Triwulan III 2006.

## A. SISI PERMINTAAN

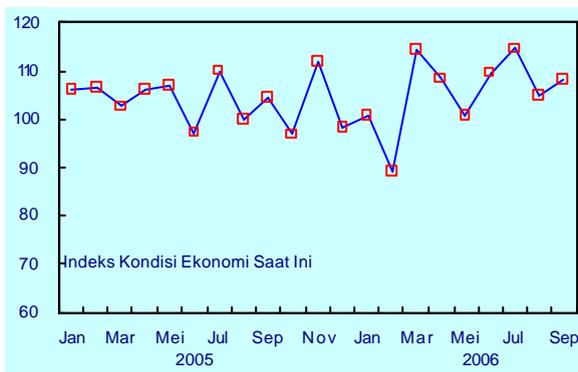
Dari sisi permintaan, perekonomian Sulawesi Utara selama triwulan III 2006 tumbuh 6,04% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu 5,72%, terutama karena meningkatnya pertumbuhan komponen konsumsi (khususnya konsumsi rumah tangga) yang memegang peranan 76,94% dari perekonomian. Peningkatan laju pertumbuhan ini tercermin pula dari meningkatnya investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara itu, kinerja ekspor di Sulawesi Utara mengalami perlambatan sedangkan kegiatan impor justru mengalami peningkatan khususnya impor antar pulau/provinsi.

Tabel 1.1.  
 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara (% , y.o.y)

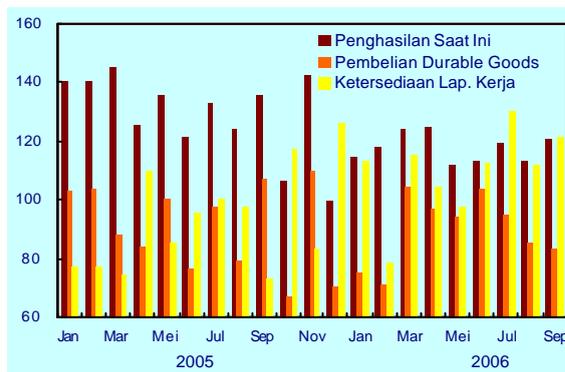
	2003	2004	2005	2006		
				Q1	Q2	Q3
<b>KONSUMSI</b>	8.51	3.56	4.76	10.78	9.11	12.32
<b>INVESTASI</b>	-3.72	6.74	13.11	5.86	6.03	7.04
<b>EKSPOR</b>	27.55	41.56	0.85	6.05	54.29	54.40
<b>IMPOR</b>	52.92	55.46	2.81	32.01	82.05	77.35
<b>PDRB</b>	<b>3.20</b>	<b>4.26</b>	<b>4.90</b>	<b>4.96</b>	<b>5.72</b>	<b>6.04</b>

### 1. Konsumsi

Pertumbuhan total konsumsi diperkirakan sebesar 8,95%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,50%. Peningkatan tersebut terjadi karena membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian serta mulai pulihnya daya beli masyarakat yang turun akibat kenaikan harga BBM tahun 2005 yang lalu. Perkiraan tersebut, didukung



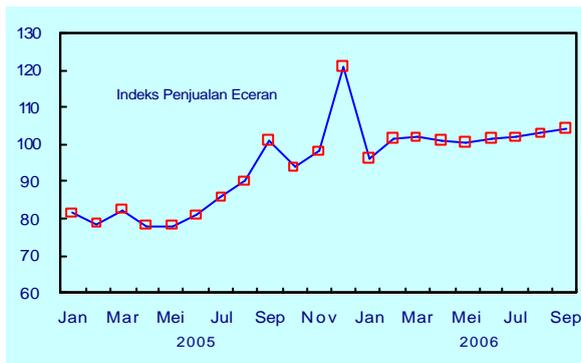
Grafik 1.1.  
 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



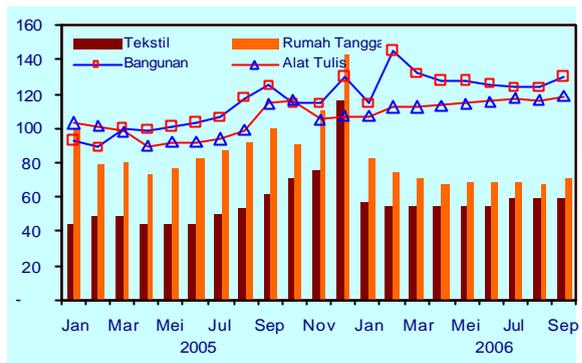
Grafik 1.2.  
 Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

oleh survei konsumen dan survei penjualan eceran yang menghasilkan indeks yang meningkat. Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (survei konsumen) sedikit meningkat pada

triwulan III 2006, terutama disebabkan oleh meningkatnya penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja. Hal yang sama terjadi pada indeks penjualan eceran dimana hampir seluruh komponennya mengalami peningkatan indeks yang antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan akibat peningkatan penghasilan.

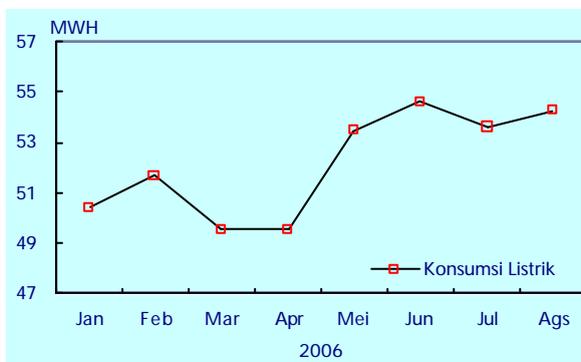


Grafik 1.3.  
Indeks Penjualan Eceran

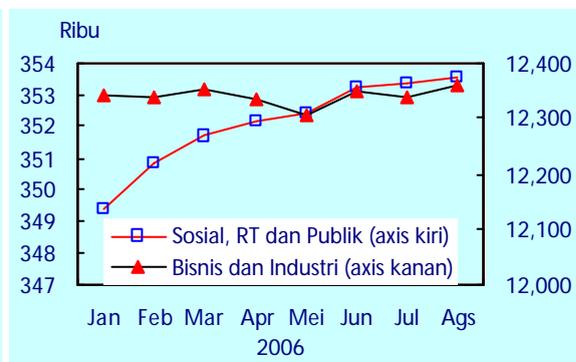


Grafik 1.4.  
Indeks Komponen Penjualan Eceran

Meningkatnya penghasilan masyarakat dapat pula dikonfirmasi oleh meningkatnya aktifitas bisnis tercermin dari meningkatnya pemakaian listrik sektor bisnis dan industri sebagaimana tercermin dalam data kenaikan konsumsi listrik.

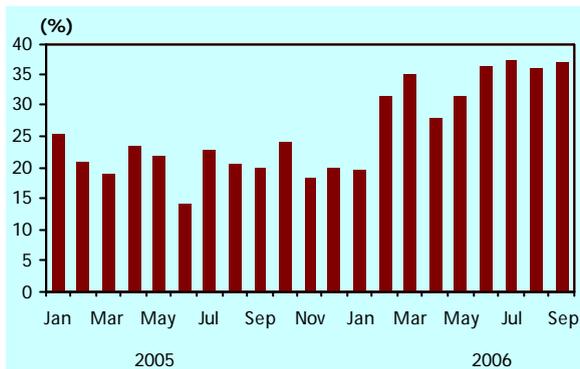


Grafik 1.5.  
Jumlah Pelanggan Listrik Sulawesi Utara

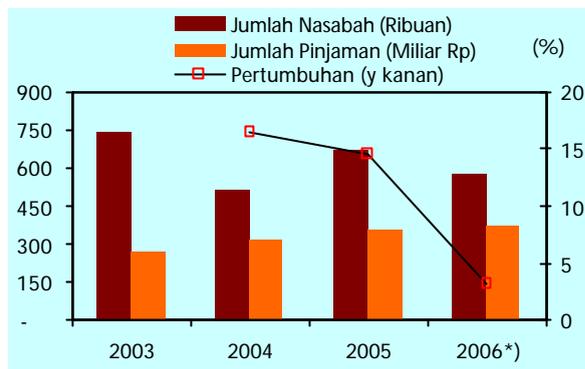


Grafik 1.6.  
Jumlah Konsumsi Listrik Sulawesi Utara

Selain itu, meningkatnya penghasilan masyarakat tercermin pula meningkatnya nilai investasi yang masuk ke Sulawesi Utara yang antara lain tercermin dari nilai kredit produktif (kredit modal kerja dan investasi) yang dilakukan oleh perbankan maupun pegadaian. Sampai dengan akhir triwulan III 2006, jumlah kredit produktif yang berhasil disalurkan oleh perbankan Sulawesi Utara telah mencapai jumlah Rp2,159 miliar atau meningkat 37,12% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sedangkan pembiayaan oleh pegadaian mencapai Rp370 miliar atau telah melampaui pencapaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp358 miliar.



Grafik 1.7.  
 Pertumbuhan Tahunan Kredit Produktif (%)

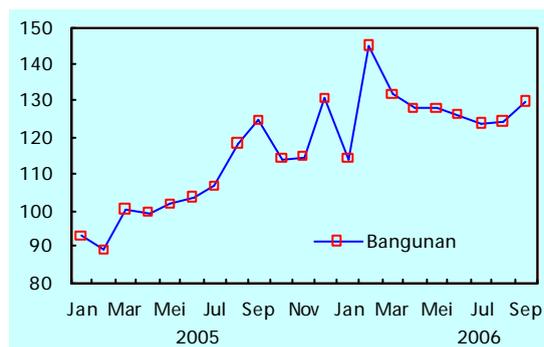


Grafik 1.8.  
 Jumlah Nasabah dan Pembiayaan oleh Pegadaian

## 2. Investasi

Kegiatan investasi di Sulawesi Utara selama triwulan III 2006 berkembang cukup mengembirakan bahkan dengan level yang tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai tambah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahunan yang tumbuh 7,04%, naik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,03%.

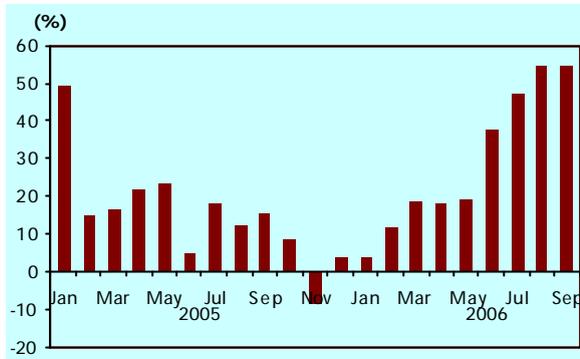
Percepatan pertumbuhan investasi, tercermin pula dari trend peningkatan indeks penjualan eceran khususnya bangunan selama triwulan III 2006. Hal ini mengindikasikan meningkatnya konsumsi (atau produksi) bangunan selama triwulan laporan yang antara lain banyak digunakan untuk kegiatan investasi (pembangunan proyek-proyek) baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.



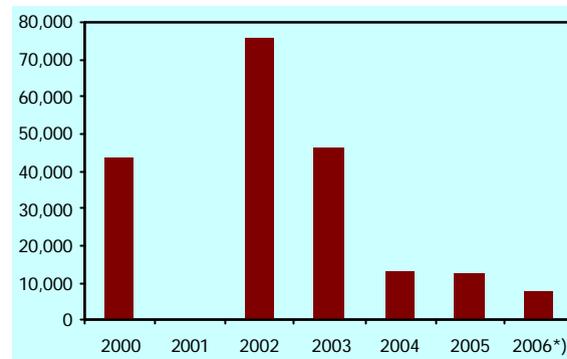
Grafik 1.9.  
 Indeks Penjualan Bahan Bangunan

Guna menggalakan iklim investasi, pemerintah daerah Sulawesi Utara perlu segera membenahi sarana dan prasarana seperti SDM, listrik, air bersih, jalan, serta membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk berinvestasi, seperti kemudahan mengurus perijinan, perpajakan dan lainnya. Bila hal-hal tersebut tidak

segera dibenahi, maka tingkat efisiensi investasi di tahun-tahun mendatang diperkirakan tidak akan mengalami banyak perubahan.



Grafik 1.10.  
Pertumbuhan Kredit Investasi (%)



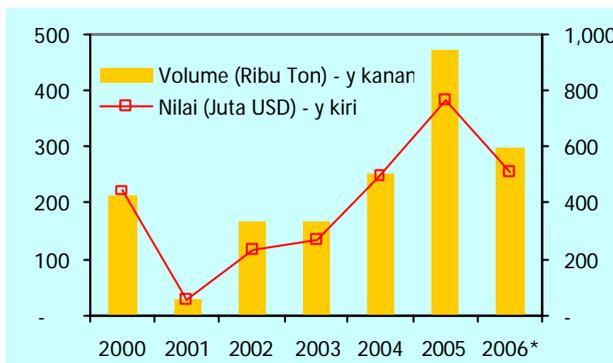
Grafik 1.11.  
Volume Impor Barang Modal (Ton)

Sementara itu, meningkatnya kegiatan investasi didukung pula oleh trend peningkatan kredit investasi sepanjang kurun waktu Tahun 2006. Sampai dengan akhir triwulan III 2006, kredit investasi yang berhasil disalurkan di Sulawesi Utara tercatat sebesar Rp512 miliar atau meningkat 54,43% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini diperkuat lagi dengan terdapatnya kecenderungan meningkatnya volume impor barang modal yang hingga akhir Agustus 2006 tercatat sebesar 7.127 ribu ton atau telah mencapai rasio 60% dibandingkan data volume impor tahun lalu.

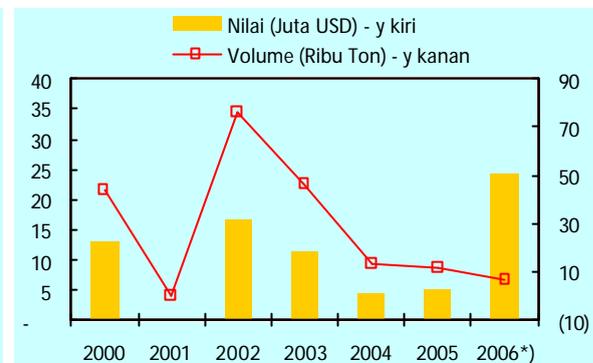
### 3. Ekspor – Impor

Kegiatan ekspor Sulawesi Utara pada triwulan III 2006 diperkirakan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara umum, transaksi perdagangan Sulawesi Utara secara gabungan (antar provinsi dan antar negara) selalu berada pada kondisi surplus. Surplus perdagangan ini terutama disumbangkan oleh perdagangan luar negeri walaupun untuk transaksi perdagangan antar provinsi selalu mengalami defisit perdagangan. Selama triwulan laporan, kegiatan ekspor Sulawesi Utara secara gabungan tumbuh *significant* yaitu sebesar 54,40% dengan kontribusi sebesar 24,02% (sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 54,29%). Berdasarkan hasil survey produksi, meningkatnya ekspor disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi akibat meningkatnya permintaan. Namun demikian, meningkatnya kegiatan ekspor ini masih diiringi dengan meningkatnya kegiatan impor yang tumbuh sebesar 77,35% dengan kontribusi 29,37% terhadap laju pertumbuhan Sulawesi Utara secara umum.

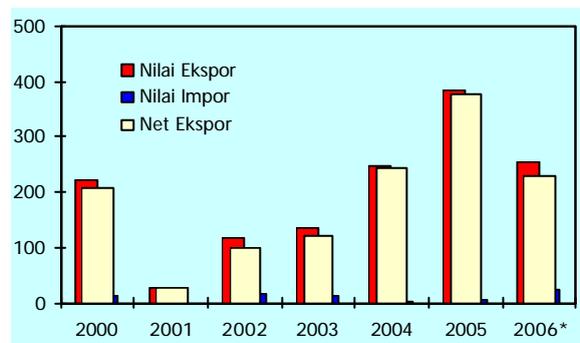
Kinerja perdagangan luar negeri Sulawesi Utara khususnya ekspor s.d. Agustus 2006 secara umum memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain didukung oleh relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar US walaupun terus dibayang-bayangi oleh kecenderungan meningkatnya biaya produksi akibat tingginya harga minyak dunia, keterbatasan sumber energi yang ada di Sulawesi Utara khususnya kelistrikan dan menurunnya jumlah produksi komoditi utama hasil pertanian (kelapa, kopra dan cengkeh). Sampai dengan Agustus 2006, nilai ekspor Sulawesi Utara berjumlah USD 254,75 juta dengan nilai volume penjualan mencapai 594 ribu ton atau mencapai 66,64% terhadap pencapaian nilai ekspor tahun sebelumnya.



Grafik 1.12.  
 Nilai dan Volume Ekspor Sulawesi Utara



Grafik 1.13.  
 Nilai dan Volume Impor Sulawesi Utara



Grafik 1.14.  
 Nilai Perdagangan Ekspor dan Impor Sulawesi Utara

Tingginya ekspor Sulawesi Utara dipicu oleh kelompok komoditi utama yaitu kelompok minyak nabati dan hewani (*animal or vegetable fats and oils*) termasuk di dalamnya komoditi *Virgin Coconut Oil (VCO)*; kelompok ikan, udang dan produk perikanan lainnya (*fish, crustaceans, molucs, oth. Invert*); kelompok produk olahan daging, ikan, udang, dll, serta kelompok rempah-rempah (kopi, teh cengkeh dan bumbu-bumbuan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri Sulawesi Utara

terutama bertumpu pada kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya atau berupa bahan mentah/baku. Oleh karena itu perkembangan industri pengolahan di Sulawesi Utara harus mendapat dukungan pemerintah daerah Sulawesi Utara agar komoditi yang diekspor tidak semata-mata mengandalkan bahan mentah/baku namun berkembang menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga nilai tambahnya akan lebih tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan negara tujuan, ekspor luar negeri Sulawesi Utara terutama dikirimkan ke negara China, USA dan Belanda.

Tabel 1.2. Negara Tujuan Utama Ekspor Sulawesi Utara  
(dalam ribu USD)

No.	Negara Tujuan	Nilai Ekspor Tahun 2005	Share	No.	Negara Tujuan	Nilai Ekspor Tahun 2006	Share
1	USA	97,125	25.41	1	China	74,689	29.32
2	Belanda	86,431	22.61	2	USA	46,213	18.14
3	China	68,459	17.91	3	Belanda	40,822	16.02
4	Jepang	21,185	5.54	4	India	13,641	5.35
5	Filipina	18,370	4.81	5	Korea Selatan	12,621	4.95
6	Negara Lainnya	90,724	23.73	6	Negara Lainnya	66,765	26.21
<b>Total</b>		<b>382,294</b>	<b>100.00</b>	<b>Total</b>		<b>254,752</b>	<b>100</b>

Sumber : Direktorat Statistik, Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia  
\*) s.d. Agustus 2006

Peningkatan kinerja ekspor ini ternyata masih diiringi dengan meningkatnya nilai realisasi impor non migas yang sampai dengan Agustus 2006 tercatat sebesar USD 24 juta (dengan volume impor 7 ribu ton) atau jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar USD 854 ribu. Di satu sisi besarnya nilai impor Sulawesi Utara ini mencerminkan masih tingginya tingkat ketergantungan Sulawesi Utara terhadap barang/jasa yang berasal dari negara lain namun dengan melakukan identifikasi terhadap komoditi yang banyak diimpor, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh barang impor yang masuk ke Sulawesi Utara merupakan barang modal yang dibutuhkan dalam kegiatan investasi.

Tabel 1.3.  
Perkembangan Impor Sulawesi Utara Berdasarkan ISIC  
(dalam ribu USD)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
AGRICULTURE, HUNTING AND FISHING	24	4	1	-	119	5	6
MINING AND QUARRYING	-	-	-	26	0	-	-
MANUFACTURING	13,039	146	16,673	11,337	4,046	4,876	24,329
<b>ISIC</b>	<b>13,063</b>	<b>149</b>	<b>16,674</b>	<b>11,363</b>	<b>4,165</b>	<b>4,881</b>	<b>24,335</b>

Sementara itu, produk utama impor Sulawesi Utara (s.d. Agustus 2006) terutama berupa mesin, peralatan dan material yang merupakan barang-barang modal. Komposisi impor

Sulawesi Utara ini berbeda bila dibandingkan tahun sebelumnya yang lebih didominasi oleh kelompok komoditi bahan makanan yaitu gula dan produk olahannya (*sugars dan sugar confectionery*). Meningkatnya komposisi barang impor dalam bentuk mesin, peralatan dan material ini mengindikasikan meningkatnya kegiatan investasi di Sulawesi Utara. Hal ini tercermin dari meningkatnya kontribusi kegiatan investasi/PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) selama triwulan II 2006 yang tercatat sebesar 1,08% bagi pertumbuhan Sulawesi Utara secara umum atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,86%.

Berdasarkan negara asal barangnya, impor Sulawesi Utara sepanjang Tahun 2006 terutama berasal dari negara Malaysia, Vietnam, Australia, Jerman dan Singapore. Keadaan ini sedikit berbeda bila dibandingkan tahun sebelumnya dimana impor Sulawesi Utara lebih banyak berasal dari negara Thailand, Australia dan Jepang.

Tabel 1.4. Negara Pemasok Impor Sulawesi Utara  
(dalam ribu USD)

No.	Negara Asal	Nilai Impor Tahun 2005	Share	No.	Negara Asal	Nilai Impor Tahun 2006*	Share
1	Thailand	3,859	79.06	1	Malaysia	4,406	18.10
2	Australia	534	10.95	2	Vietnam	1,691	6.95
3	Jepang	164	3.36	3	Australia	1,273	5.23
4	Singapore	85	1.73	4	Jerman	635	2.61
5	Malaysia	54	1.12	5	Singapore	541	2.22
6	Negara Lainnya	184	3.78	6	Negara Lainnya	15,789	64.88
<b>Total</b>		<b>4,881</b>	<b>100.00</b>	<b>Total</b>		<b>24,335</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Direktorat Statistik, Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia  
\*) s.d. Agustus 2006

## B. SISI PENAWARAN

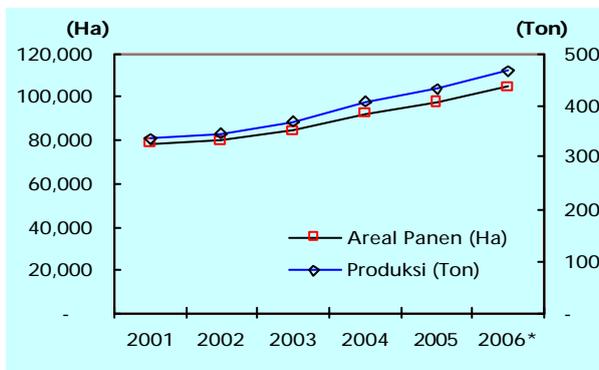
Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan III 2006 terlihat di sebagian besar sektor ekonomi, terutama di sektor pertanian, bangunan, dan perdagangan yang masing-masing memegang peranan sebesar 22,74%, 16,30% dan 14,01% dari total perekonomian.

Tabel 1.5  
 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Utara

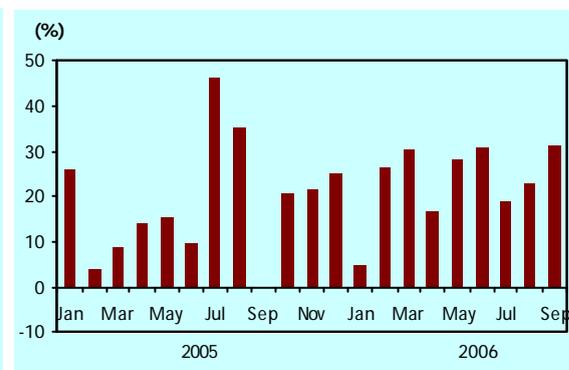
	2003	2004	2005	2006		
				Q1	Q2	Q3
Pertanian	0.87	6.61	6.15	7.12	6.66	5.86
Pertambangan dan Penggalian	-8.08	-3.59	-0.72	5.88	6.46	7.23
Industri Pengolahan	4.13	-3.94	2.23	3.98	4.92	5.78
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.45	2.39	13.82	4.73	4.94	5.80
Bangunan	7.43	6.08	5.06	5.86	6.03	7.04
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.22	6.37	7.41	4.65	5.84	6.63
Pengangkutan dan Komunikasi	4.47	6.84	5.83	4.75	5.11	7.12
Keu. sewa & Jasa Perusahaan	4.46	5.39	5.64	4.17	5.35	6.12
Jasa-Jasa	3.58	2.79	2.79	2.41	4.83	3.83
<b>PDRB</b>	<b>3.20</b>	<b>4.26</b>	<b>4.90</b>	<b>4.96</b>	<b>5.72</b>	<b>6.04</b>

### 1. Pertanian

Sektor Pertanian diperkirakan tumbuh sebesar 5,86% atau terus melambat dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya sepanjang Tahun 2006. Produksi pertanian untuk Sulawesi Utara terutama padi, tanaman perkebunan, dan perikanan. Luas areal Padi di Sulawesi Utara pada Tahun 2006 diperkirakan meningkat hingga menjadi 104,36 Ha dengan jumlah produksi sebesar 467,92 Ton.



Grafik 1.15.  
 Luas Lahan Pertanian



Grafik 1.16.  
 Pertumbuhan Kredit Pertanian

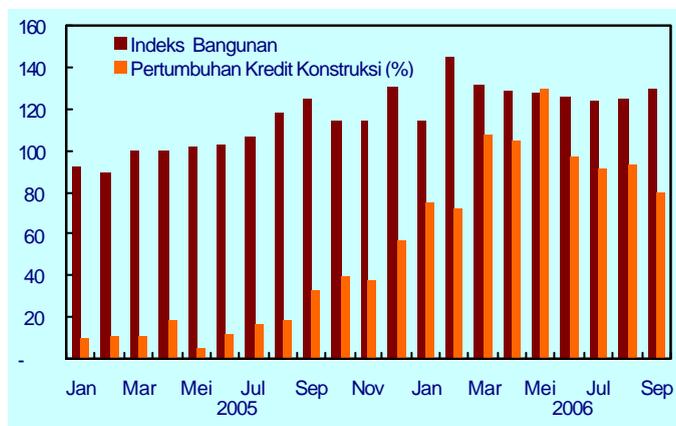
Secara umum, menurunnya kontribusi sektor pertanian disebabkan menurunnya produktifitas beberapa komoditi antara lain padi dan tanaman perkebunan akibat musim kemarau yang masih melanda selama triwulan laporan. Namun demikian, kontribusi sub sektor perikanan justru mengalami peningkatan. Hal ini tak lepas dari dukungan iklim yang memiliki sedikit angin sehingga memudahkan para nelayan untuk mencari ikan. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan sektor pertanian ternyata didukung oleh penyaluran kredit pada

sektor ini yang sampai dengan akhir September 2006 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 31,04% secara tahunan.

## 2. Sektor Bangunan

Secara perlahan dan konsisten sektor ini memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Selama triwulan III 2006, sektor bangunan tumbuh sebesar 7,04%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 6,03%. Berdasarkan kontribusinya, sektor bangunan merupakan sektor penyumbang kedua tertinggi setelah sektor pertanian. Perkembangan sektor bangunan selama triwulan laporan tercermin dari meningkatnya aktivitas pembangunan sektor properti di Sulawesi Utara antara lain Manado Town Square, Boulevard Mal, Hotel Quality serta kompleks perumahan.

Pertumbuhan sektor bangunan ini dapat dikonfirmasi dengan perkembangan indeks penjualan bahan bangunan yang memperlihatkan trend meningkat selama triwulan laporan. Sementara itu dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit di sektor bangunan sampai dengan akhir triwulan III 2006 telah mencapai jumlah Rp224,74 miliar atau meningkat hampir 80% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

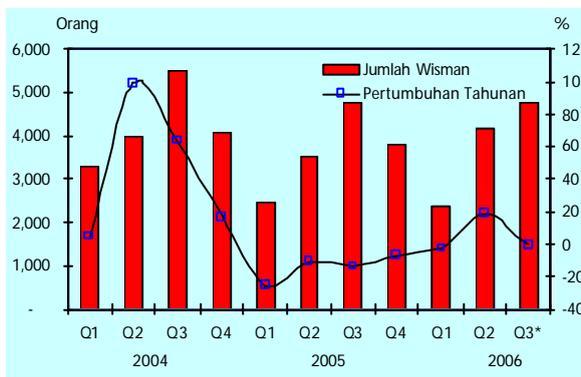


Grafik 1.17  
 Perkembangan Indeks Penjualan Bahan Bangunan  
 dan Pertumbuhan Kredit Konstruksi (%)

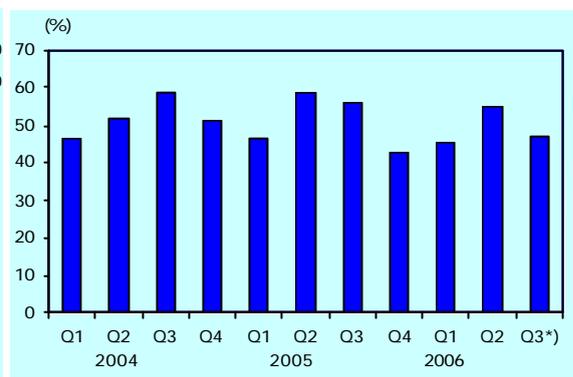
## 3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan tumbuh sebesar 6,63% lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,84%. Laju pertumbuhan sektor ini terutama disumbangkan oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran serta sub sektor restoran sedangkan sub sektor hotel justru kembali mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Lesunya sub sektor hotel terindikasi pula dari menurunnya jumlah kunjungan

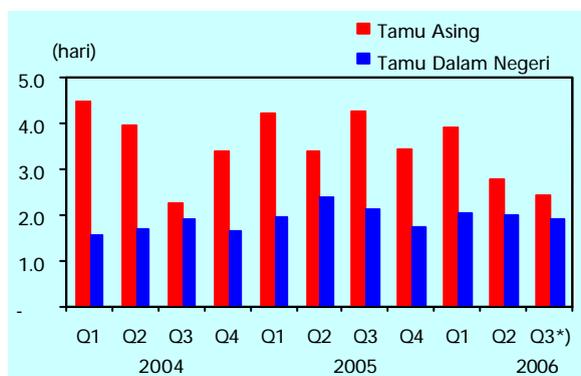
wisatawan dan tingkat hunian hotel di Sulawesi Utara. Selama triwulan III 2006, jumlah kunjungan wisatawan di Sulawesi Utara berjumlah 4.745 orang atau turun sedikit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi di sub sektor hotel juga dapat dilihat dari turunnya tingkat hunian hotel berbintang dan rata-rata lama menginap wisatawan baik domestik maupun manca negara. Sampai akhir triwulan laporan, rata-rata tingkat hunian hotel berbintang di Sulawesi Utara sebesar 46,94% atau turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 56,07%. Demikian pula dengan rata-rata lama menginap wisatawan domestik yang turun dari 2,14 hari menjadi hanya tinggal 1,94 hari dan rata-rata lama menginap wisatawan manca negara turun dari 4,27 hari menjadi 2,41 hari. Hal ini tentunya harus segera menjadi perhatian pemerintah Sulawesi Utara pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Utara untuk mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya tingkat hunian hotel berbintang dan rata-rata lama menginap wisatawan berkenaan dengan persiapan Kota Manado sebagai kota pariwisata tingkat dunia di Tahun 2010.



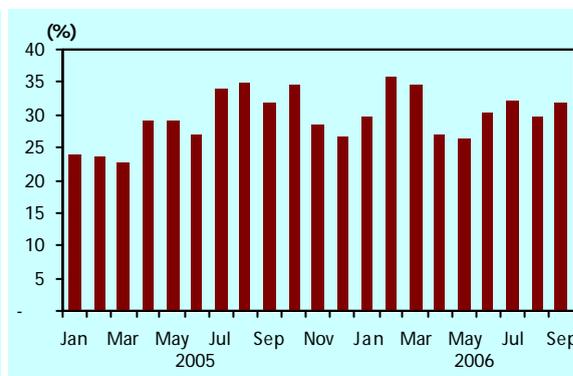
Grafik 1.18  
Perkembangan Jumlah Wisatawan ke Sulawesi Utara



Grafik 1.19  
Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Sulawesi Utara



Grafik 1.20  
Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan

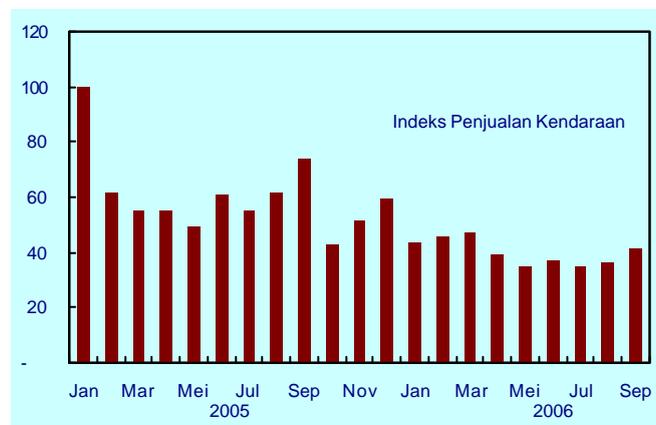


Grafik 1.21  
Pertumbuhan Kredit di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran didukung pula dari banyak bermunculannya restoran dan rumah makan baru di sepanjang jalan Boulevard Manado, maupun ruko serta mal di Sulawesi Utara. Dari segi pembiayaan, sektor ini merupakan terbesar kedua (setelah sektor konsumsi) yang mendapat dukungan dari perbankan sebesar Rp1.296 miliar atau meningkat 31,70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran kredit di sektor perdagangan, hotel dan restoran sedikit banyak cukup berperan bagi perkembangan perekonomian di Sulawesi Utara. Pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan laporan juga dapat dikonfirmasi dari Indeks Penjualan Eceran yang memperlihatkan peningkatan indeks dari 100,92 pada September 2005 naik menjadi 104,28 pada periode yang sama tahun 2006.

#### 4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi diperkirakan tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 7,12% lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,11%. Peningkatan ini didukung baik oleh sub sektor pengangkutan maupun sub sektor komunikasi.

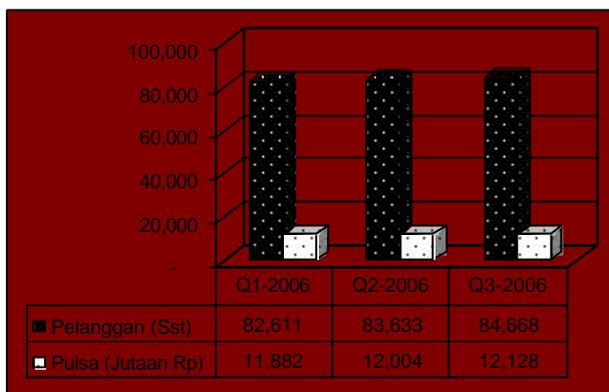


Grafik 1.22  
Indeks Penjualan Kendaraan

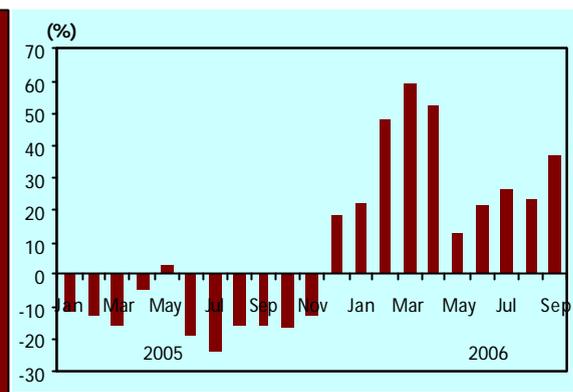
Perkembangan sub sektor angkutan antara lain dapat dikonfirmasi dengan indeks penjualan kendaraan yang selama triwulan III 2006 menunjukkan perkembangan yang sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 37,01 pada Juni 2006 naik menjadi 41,36 pada September 2006.

Relatif tingginya pertumbuhan sub sektor komunikasi dalam triwulan laporan terutama disebabkan oleh pesatnya penggunaan sarana telepon selular oleh masyarakat yang didukung oleh semakin luasnya wilayah jangkauan. Hal ini antara lain terbukti pesatnya

pembangunan sejumlah menara BTS (Base Transceiver System) di beberapa lokasi-lokasi strategis sehingga memberikan kenyamanan pelanggan dalam berkomunikasi. Selain itu perkembangan berbagai macam fasilitas dan fitur-fitur baru semakin memudahkan dan memanjakan para pengguna jasa telekomunikasi.



Grafik 1.23.  
Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Pulsa Telepon



Grafik 1.24.  
Pertumbuhan Kredit Sektor Transportasi

Perkembangan sub sektor komunikasi antara lain dapat dikonfirmasi dengan terus bertambahnya jumlah jaringan *fix line* yang hingga akhir triwulan III 2006 diperkirakan sebesar 84.668 (Sst) satuan sambungan atau meningkat 1,23% dibandingkan triwulan sebelumnya dengan kenaikan biaya penggunaan pulsa telepon sebesar 124 juta dari Rp12,004 miliar naik menjadi Rp12,128 miliar. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan sektor angkutan dan telekomunikasi ternyata didukung oleh penyaluran kredit di sektor ini yang tercatat secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 36,66% mencapai jumlah Rp40,51 miliar.

## 5. Sektor Jasa-Jasa

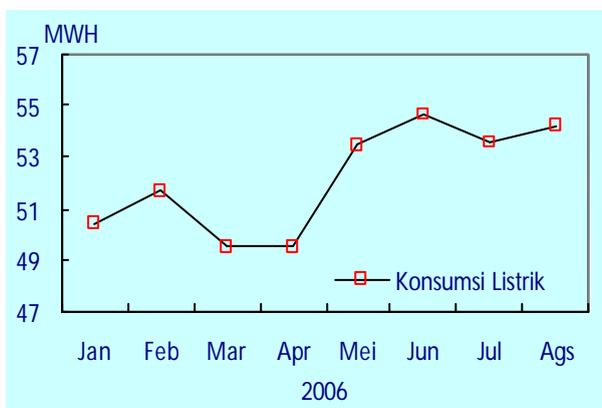
Sektor jasa-jasa dengan pangsa sebesar 15,91% pada triwulan III 2006 merupakan sektor dengan pangsa terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Sulawesi Utara setelah sektor pertanian dan sektor bangunan. Sektor ini tumbuh 3,83% selama triwulan laporan dengan kontribusi sebesar 0,62% terhadap laju pertumbuhan secara umum. Berdasarkan sub sektor pembentuknya, seluruh sub sektor mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh sub sektor jasa swasta. Tingginya pertumbuhan sub sektor jasa swasta terutama berkenaan dengan masa liburan sekolah pada akhir triwulan laporan.

Sementara itu, sub sektor jasa pemerintahan juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,96%. Hal ini terutama akibat penambahan dana pusat yang disalurkan ke Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2006 ini baik berupa dana DIPA, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

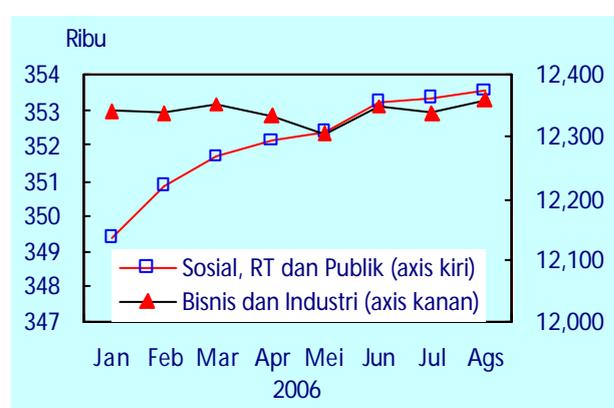
## 6. Sektor Lainnya

Sektor industri pengolahan yang sebagian besar berupa industri pengolahan kayu dan ikan di Sulawesi Utara tumbuh 5,78%. Hal ini memberikan indikasi bahwa dampak kenaikan harga BBM mulai dapat diantisipasi oleh industri-industri yang ada dengan melakukan kegiatan efisiensi baik terhadap biaya, tenaga dan waktu.

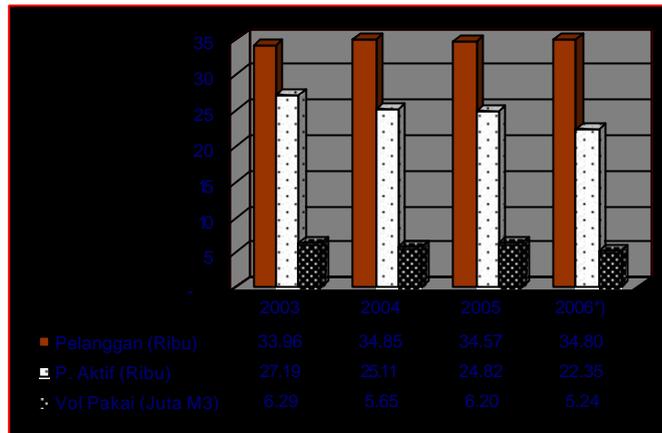
Sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh 5,80% pada triwulan III 2006. Berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan sektor ini terutama disumbangkan oleh sub sektor listrik dan air bersih dengan laju pertumbuhan terbatas masing-masing sebesar 6,82% dan 2,28%. Pertumbuhan sub sektor listrik, dapat dikonfirmasi dengan data pemakaian listrik yang terus memperlihatkan trend meningkat. Sampai Agustus 2006, pemakaian listrik di seluruh wilayah Sulawesi Utara mencapai 54,24 Mega Watt Hour (MWh). Namun demikian, secara umum kebutuhan listrik di Sulawesi Utara belum seluruhnya mampu dipenuhi oleh kapasitas yang dimiliki oleh PLN saat ini. Hal ini disebabkan oleh karena kebutuhan listrik khususnya di Kota Manado hanya mengandalkan tenaga debit air Danau Tondano sehingga pada saat musim kemarau saat ini pemadaman bergilir menjadi hal yang rutin dialami oleh masyarakat Sulawesi Utara (khususnya pada 3 bulan terakhir ini). Masuknya investor di sub sektor listrik tentunya sangat diharapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Utara.



Grafik 1.25.  
Konsumsi Listrik Sulawesi



Grafik 1.26.  
Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik



Grafik 1.27.  
 Jumlah Pelanggan dan Konsumsi Air

Selanjutnya, sektor pertambangan dan penggalian di Sulawesi Utara tumbuh 7,23% dengan kontribusi sebesar 0,38% terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan sektor ini hampir disumbangkan oleh seluruh sub sektor yang ada yaitu sub sektor minyak dan gas, pertambangan tanpa migas dan penggalian. Khusus untuk sub sektor penggalian, berdasarkan pelaku usahanya, sub sektor penggalian ini lebih banyak dilakukan oleh penambangan tradisional/rakyat dan bukan industri berskala besar.

Sementara itu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 6,12%. Berdasarkan sub sektornya pembentuknya, seluruh sektor mencatat pertumbuhan positif dengan sub sektor bank merupakan penyumbang terbesar. Hal ini tercermin pula dari maraknya pembangunan fasilitas perbankan antara lain : pembukaan kantor cabang baru dan penambahan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam bertransaksi. Sedangkan sub sektor lembaga keuangan bukan bank merupakan sub sektor dengan sumbangan terkecil. Namun demikian tercatat sub sektor ini mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,24%

### C. Analisis LQ (*Location Quotient*)

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah diantaranya dapat dilakukan dengan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat struktur perekonomian wilayah tersebut. Percepatan laju pertumbuhan dan penguatan struktur perekonomian suatu wilayah pada gilirannya akan dapat dilakukan lebih efektif dengan cara

penekanan pembangunan pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam wilayah tersebut. Pendekatan Analisis LQ (*Location Quotient*) dan Shift-Share merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan sektor basis dan kecenderungan pertumbuhan sektor basis tersebut dalam struktur perekonomian suatu wilayah. Sektor basis yang pendekatan perhitungannya dilakukan dengan rasio kontribusi sektor pada salah satu bagian wilayah terhadap kontribusi sektor yang sama dalam wilayah, pada hakekatnya tidak terlepas dari aspek kontribusi. Pendekatan sektor unggulan sebagai pemicu laju pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara dengan demikian didahului oleh seleksi kontribusi sektor tersebut sebelum rasio LQ.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) se-provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2001 sampai dengan 2005, PDRB SULAMPUA terbesar dari sektor pertanian (28,53%), sektor pertambangan dan penggalian (18,75%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (13,49%), sektor jasa-jasa (11,37%), sektor pengangkutan dan komunikasi (8,85%) dan sektor industri pengolahan (8,46%). Kondisi yang hampir sama terjadi di Sulawesi Selatan dimana sektor pertanian masih menjadi lokomotif pertumbuhan. Secara rinci, selama periode Tahun 2001 sampai dengan 2005, perolehan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terutama berasal oleh sektor pertanian (31,51%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (18,53%), sektor industri pengolahan (12,61%), sektor jasa-jasa (11,81%) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (9,01%).

Tabel 1.6.  
Share Rata-Rata Sektor-Sektor Pada PDRB Sulampua, Sulsel dan Sulut  
Periode Tahun 2001 s.d. 2005

Sektor		Sulampua	Sulsel	Sulut
1	Pertanian	28.53	31.51	26.70
2	Pertambangan dan Penggalian	18.75	4.61	5.84
3	Industri Pengolahan	8.46	12.61	9.47
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.94	1.43	0.77
5	Bangunan	5.48	4.69	10.30
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.49	18.53	13.19
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8.85	9.01	16.32
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.11	5.80	2.98
9	Jasa-Jasa	11.37	11.81	14.44
<b>TOTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, struktur perekonomian Sulawesi Utara tidaklah jauh berbeda. Selama periode Tahun 2001 sampai dengan 2005, perolehan PDRB Provinsi Sulawesi Utara terbesar dari sektor pertanian (26,70%), sektor pengangkutan dan

telekomunikasi (16,32%), sektor jasa-jasa (14,44%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (13,19%), sektor bangunan (10,30%) dan sektor industri pengolahan (9,47%).

Hasil perhitungan koefisien LQ terhadap lima sektor yang menjadi kontributor utama terhadap PDRB Sulawesi Utara, ternyata hanya dua sektor yang merupakan basis di Sulawesi Utara bila dibandingkan dengan sektor yang sama di Sulawesi Selatan yaitu sektor jasa-jasa dan sektor angkutan dan telekomunikasi. Sedangkan sektor lainnya yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan merupakan sektor non basis. Namun dibandingkan dengan potensi di SULAMPUIA, dari lima sektor dominan di Sulawesi Utara, tercatat sebanyak empat sektor yang merupakan sektor basis (Tabel 1.7). Sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor non basis di Sulawesi Utara dibandingkan dengan wilayah SULAMPUIA.

Tabel 1.7.  
 Nilai LQ Sektor-Sektor Unggulan Provinsi Sulawesi Utara  
 Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan SULAMPUIA

No.	Sektor-Sektor Dominan	Share			LQ SULUT terhadap	
		SULUT	SULSEL	SULAMPUIA	SULSEL	SULAMPUIA
1	Pertanian	26.30	29.47	27.57	0.89	0.95
2	Perdagangan, Hotel & Restoran	13.54	18.96	13.58	0.71	1.00
3	Jasa-Jasa	13.66	11.39	10.92	1.20	1.25
4	Angkutan dan Telekomunikasi	17.46	9.55	9.29	1.83	1.88
5	Industri Pengolahan	9.45	12.63	8.24	0.75	1.15

#### D. Analisis Shift Share Provinsi Sulawesi Utara

Analisis shift share merupakan salah satu metode yang lazim digunakan untuk menganalisis pertumbuhan wilayah. Dengan menggunakan metode ini, akan dapat diketahui penyebab utama pertumbuhan dan potensi peningkatan pertumbuhan pada masa mendatang. Pada dasarnya, analisis Shift Share membagi pertumbuhan wilayah dalam tiga komponen antara lain pertama, komponen potensi (*share*). Komponen potensi menjelaskan bahwa share wilayah yang diteliti dibandingkan atau ditampilkan dengan membandingkan share wilayah referensi. Kedua, bauran komponen (*component mix*) yang menjelaskan kecepatan relatif pertumbuhan wilayah dibandingkan wilayah referensi. Dalam bauran komponen akan disajikan atau ditampilkan sektor-sektor dalam wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama pada wilayah referensi. Ketiga, *component competitive* menjelaskan relatifitas keunggulan kompetitif suatu sektor dalam wilayah dibandingkan wilayah referensi. Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif berarti memiliki keunggulan bagi perkembangan sektor bersangkutan.

Tabel 1.8.  
 Laju Pertumbuhan Tahun 2005  
 Sektor-Sektor Dominan di Sulut, Sulsel dan Sulampua

No.	Sektor Ekonomi	Laju Pertumbuhan 2005		
		SULUT	SULSEL	SULAMPUA
1	Pertanian	4.08	4.88	4.36
2	Perdagangan, Hotel & Restoran	5.95	6.99	4.58
3	Jasa -Jasa	2.42	4.45	3.56
4	Angkutan dan Telekomunikasi	6.60	7.29	8.86
5	Industri Pengolahan	4.28	6.17	5.23
6	....			
<b>Laju Pertumbuhan Total</b>		<b>4.66</b>	<b>5.81</b>	<b>7.64</b>

Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2005 tercatat 4,66% dengan laju tertinggi berasal dari sektor angkutan dan telekomunikasi sebesar 6,60%. Sementara itu, pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan dan SULAMPUA masing-masing sebesar 5,81% dan 7,64%. Sama halnya dengan Provinsi Sulawesi Utara, sektor angkutan dan telekomunikasi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi di kedua wilayah itu masing-masing sebesar 7,29% dan 8,86%.

Dengan membandingkan lima sektor dominan di Sulawesi Utara dengan sektor yang sama di Sulawesi Selatan dan SULAMPUA, menggunakan analisa shift share, diperoleh kesimpulan bahwa hampir seluruh sektor dominan di Sulawesi Utara masih tidak lebih prospektif bila dibandingkan dengan perkembangan sektor yang sama di Sulawesi Selatan. Hal ini tercermin dari rasio RPs yang masih di bawah angka 1 (Tabel 1.9). Hal yang hampir serupa terjadi bila dibandingkan dengan perkembangan sektor-sektor dominan di wilayah SULAMPUA. Satu-satunya sektor yang boleh dikatakan memiliki prospek yang cukup baik di Sulawesi Utara dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi SULAMPUA adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini tercermin dari rasio RPs yang lebih besar dari 1 atau sebesar 1,30% (Tabel 1.10).

Tabel 1.9.  
 Rasio RPs, RPr dan RPr/RPs  
 Sulawesi Utara Terhadap Sulawesi Selatan

No.		SULUT vs SULSEL	RPs	RPr	RPr/RPs
1	Sektor	Pertanian	0.84	0.84	1.00
2		Perdagangan, Hotel & Restoran	0.85	1.20	1.42
3		Jasa -Jasa	0.54	0.77	1.43
4		Angkutan dan Telekomunikasi	0.91	1.25	1.38
5		Industri Pengolahan	0.69	1.06	1.54

Tabel 1.10.

Rasio RPs, RPr dan RPr/RPs  
 Sulawesi Utara Terhadap SULAMPUIA

No.		SULUT vs SULAMPUIA	RPs	RPr	RPr/RPs
1	Sektor	Pertanian	0.93	0.57	0.62
2		Perdagangan, Hotel & Restoran	1.30	0.60	0.47
3		Jasa -Jasa	0.68	0.47	0.70
4		Angkutan dan Telekomunikasi	0.75	1.16	1.55
5		Industri Pengolahan	0.82	0.68	0.83

## BOX 1 : Penelitian Produktivitas Total Faktor (TFP); Faktor Determinan dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara

Untuk melihat pola pembentuk pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu penghitungan dan analisis yang mengakomodir kontribusi investasi serta penambahan tenaga kerja dan produktivitasnya pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas harus menjadi prioritas sehingga ekonomi suatu daerah memiliki fondasi yang mantap dan stabil. Hal ini akan semakin diperlukan manakala terjadi krisis ekonomi. Salah satu indikator yang dapat menjelaskan pola tersebut adalah pengukuran produktivitas yang disebut sebagai Total Faktor Productivity (TFP). Indikator TFP mengkuantitatifkan produktifitas dari kondisi kualitatif produktivitas tenaga kerja. Dengan penghitungan TFP dapat diketahui berapa besar kontribusi faktor peningkatan balas jasa tenaga kerja, peningkatan investasi serta peningkatan produktifitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Total Faktor Produktivitas (TFP) menggambarkan sejauh mana Capital dan Labour dapat bersinergi sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal.

Secara umum formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

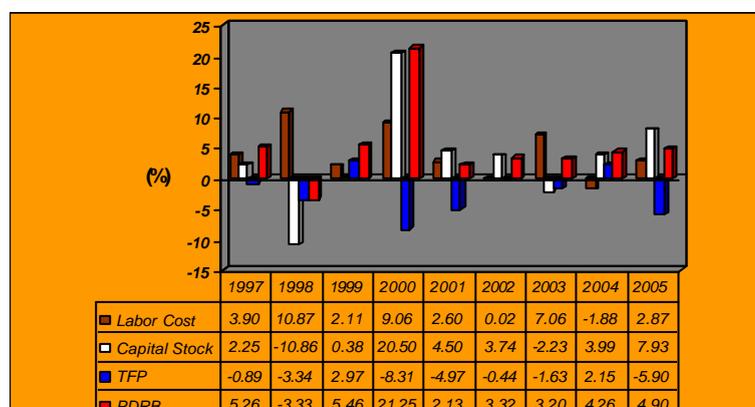
$$Q_t = TFP_t^* + St K_t^* + St L_t^*$$

dimana  $Q_t$  = Pertumbuhan Output

$TFP^*$  = Kontribusi Pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP)

$St K_t^*$  = Kontribusi Pertumbuhan Kapital

$St L_t^*$  = Kontribusi Pertumbuhan Tenaga Kerja

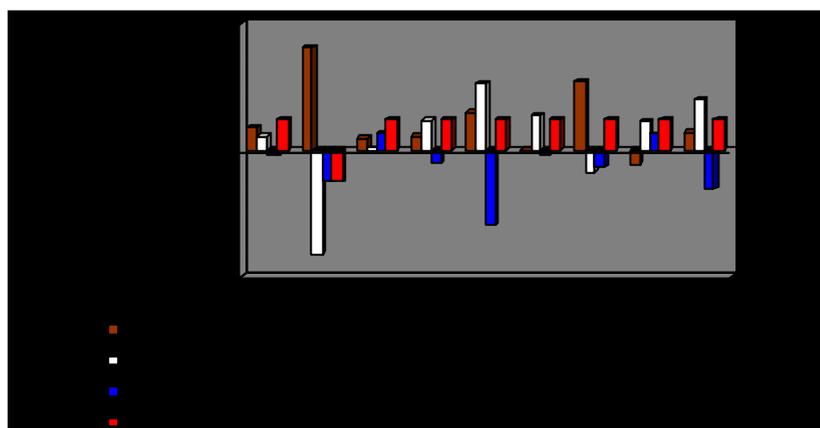


Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1997 - 2005

Pertumbuhan TFP Sulawesi Utara selama periode 1996 – 2005 terlihat cukup berfluktuatif dan cenderung didominasi oleh pertumbuhan negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan Sulawesi Utara bukan disebabkan oleh peningkatan produktivitas namun justru lebih disebabkan oleh faktor input kuantitatif (penambahan jumlah tenaga kerja dan investasi). Perekonomian yang lebih dominan ditopang oleh faktor input kuantitatif tidak memiliki fondasi yang kuat dalam artian sangat rentan terhadap gejolak ekonomi.

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah bahwa pertumbuhan TFP Sulawesi Utara umumnya negatif ketika pertumbuhan ekonomi positif. Hal demikian berarti TFP justru menjadi faktor pengurang pertumbuhan ekonomi. TFP yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja menjadi beban ekonomi regional. Memang tetap menghasilkan output namun hanya cukup untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang habis dipakai untuk konsumsi. Tidak ada sisa lebih output yang dapat digunakan sebagai investasi tahun-tahun berikutnya.

Seperti terlihat pada tabel di atas, Tahun 1997 pertumbuhan TFP -0,89 persen menjadi pengurang dari pertumbuhan Labor Cost yang 3,90 persen dan pertumbuhan Capital Stock yang 2,25 persen. Kumulatif pertumbuhan Labor Cost dan Capital Stock mencapai 6,15 persen, namun karena ada beban ekonomi akibat penggunaan tenaga kerja dan modal investasi yang tidak produktif bertumbuh minus 0,89 persen, maka pertumbuhan ekonomi secara total menjadi 5,26 persen. Keadaan yang kurang lebih sama terjao pada tahun-tahun lain kecuali tahun 1999 dan 2004 dimana TFP Sulawesi Utara memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuha ekonomi.

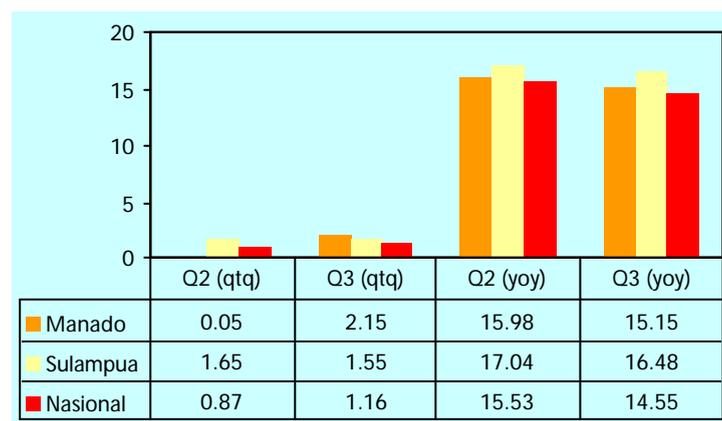


Persen Kontribusi Laju Pertumbuhan Komponen Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1997-2005

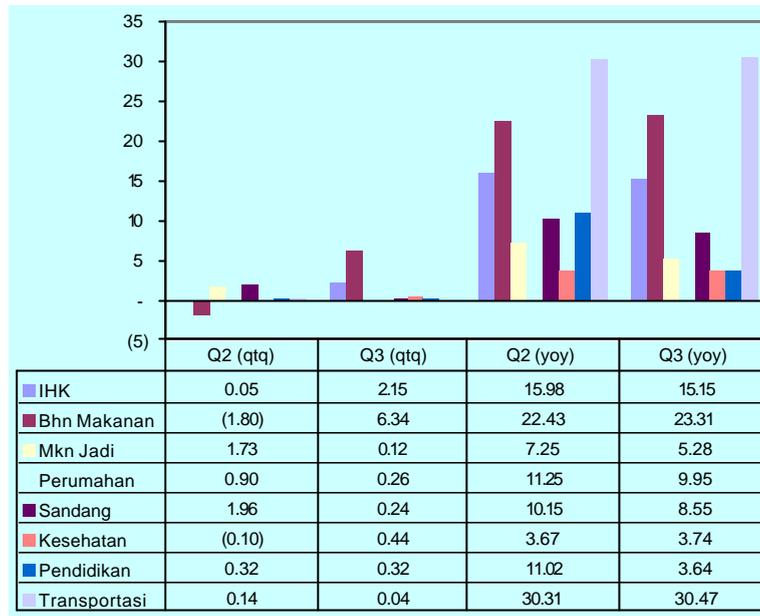
## BAB II PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL

Laju Inflasi kumulatif kota Manado sampai dengan triwulan III-2006 (periode Januari-September) tercatat sebesar 3,76% (y.t.d). Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif pada triwulan yang sama tahun 2005 lalu yang tercatat sebesar 6,98%. Bila dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif secara nasional maupun zona sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) yang tercatat masing-masing 4,06% dan 5,61%, laju inflasi kota Manado juga relatif lebih rendah. Sementara itu secara tahunan, laju inflasi kota Manado tercatat sebesar 15,15%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 15,98%. Namun, inflasi triwulanan kota Manado tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 0,05% menjadi 2,15%. Rendahnya inflasi kumulatif dan tahunan, ditengah-tengah meningkatnya inflasi secara triwulan disebabkan beberapa faktor yaitu :

- ? Ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang semakin membaik.
- ? Tidak adanya kenaikan harga pada kelompok *administered* yang strategis.
- ? Meningkatnya tekanan inflasi baik dari sisi permintaan maupun pasokan yang disebabkan karena faktor musiman (musim kering, bulan Ramadhan serta masa liburan), sehingga secara triwulanan inflasi menunjukkan peningkatan.



Grafik 2.1.  
Inflasi Kota Manado, Zona Sulampua dan Nasional



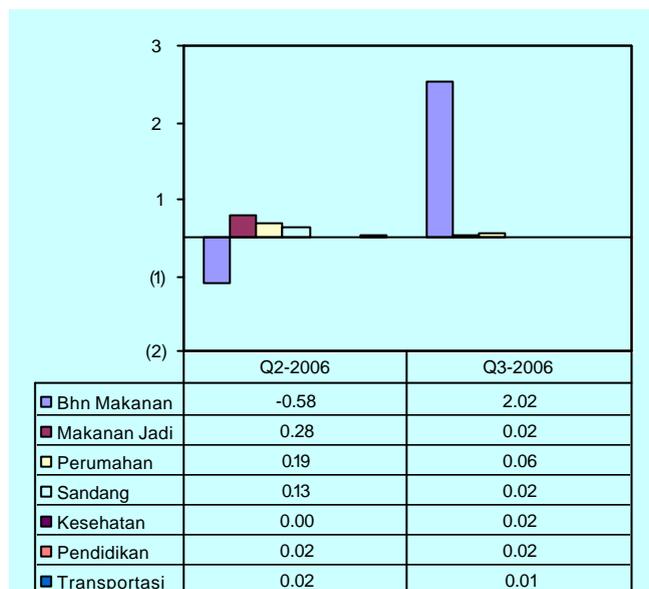
Grafik 2.2.  
 Inflasi Kota Manado Berdasarkan Kelompok Barang

### A. INFLASI TRIWULANAN (Q.T.Q)

Laju perubahan harga kota Manado pada triwulan III 2006 sebesar 2,15% atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,05%. Meningkatnya laju perubahan harga secara triwulanan disebabkan meningkatnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi yang memiliki pangsa cukup besar dalam penghitungan inflasi regional. Kelompok bahan makanan, yang pada triwulan sebelumnya memberikan kontribusi negatif terhadap laju inflasi sebesar -0,58%, dalam triwulan ini justru memberikan kontribusi positif tertinggi terhadap laju inflasi yaitu sebesar 2,02%. Tingginya tekanan harga dari kelompok bahan makanan terutama disebabkan berkurangnya pasokan beberapa komoditi yang cukup besar pengaruhnya dalam penghitungan inflasi antara lain ikan segar dan beras. Hal ini terjadi akibat faktor musiman yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan serta musim kering yang berkepanjangan sehingga menurunkan produktifitas hasil pertanian.

Berdasarkan pangsaanya terhadap konsumsi, kelompok bahan makanan menduduki peringkat tertinggi (33,2%), diikuti kelompok perumahan (20,82%), kelompok makanan jadi (16,4%) serta kelompok transportasi (14,36%). Hal ini menunjukkan bahwa, karakteristik perekonomian daerah yang diindikasikan dari alokasi pengeluaran konsumen terkonsentrasi kepada biaya makanan, biaya perumahan dan biaya transportasi.

Berdasarkan kelompok makanan di Manado, padi-padian (29,49%) adalah subkelompok yang memiliki nilai konsumsi terbesar dengan komoditi beras yang menyerap hampir 94,35% nilai konsumsi subkelompok tersebut. Tingginya tekanan kenaikan harga beras di Manado terkait dengan berkurangnya pasokan sebagai akibat musim kering yang berkepanjangan diluar perkiraan semula sehingga produktifitas hasil pertanian sedikit mengalami penurunan ditengah-tengah meningkatnya permintaan.



Grafik 2.3.  
 Kontribusi Kelompok Barang Terhadap Inflasi Kota Manado

Selanjutnya, subkelompok yang memiliki nilai konsumsi cukup besar lainnya adalah subkelompok ikan segar (27,96%) dengan komoditi cakalang dan tude yang memiliki nilai konsumsi cukup besar. Bersama dengan beras, komoditi ikan segar merupakan komoditi yang memberikan tekanan cukup tinggi terhadap laju inflasi triwulan ini. Karakteristik masyarakat daerah ini yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi terhadap komoditi ikan segar serta faktor musiman yang menyebabkan pasokan menjadi berkurang merupakan penyebab tekanan kenaikan harga komoditi ini.

Tabel 2.1  
 Nilai Konsumsi Kelompok Bahan Makanan di Kota Manado

Sub Kelompok	(%)	Jenis Barang
Padi-padian	29,49	Beras 94,35%
Daging dan hasil-hasilnya	7,55	Daging Ayam Ras 36,98%
Ikan segar	27,96	Cakalang 34,98%, Tude 18,59%
Ikan diawetkan	1,07	Cakalang asap 50,88%, Teri 17,2%
Telur, susu dan hasilnya	5,72	Susu bubuk 44,60%, Telur Ayam Ras 23,48%
Sayur-sayuran	7,34	Kangkung 24,06%
Kacang-kacangan	1,52	Tahu mentah 32,13%, Tempe 23,11%
Buah-buahan	4,76	Pisang 38,58%, Pepaya 19,72%
Bumbu-bumbuan	8,91	Cabe rawit 26,77%, Bawang merah 21,8%
Lemak dan minyak	5,43	Minyak goreng 74,35%
Bahan makanan lainnya	0,26	Krupuk udang, Emping mentah

Sumber : BPS, diolah

Tabel 2.2  
 Nilai Konsumsi Kelompok Perumahan di Kota Manado

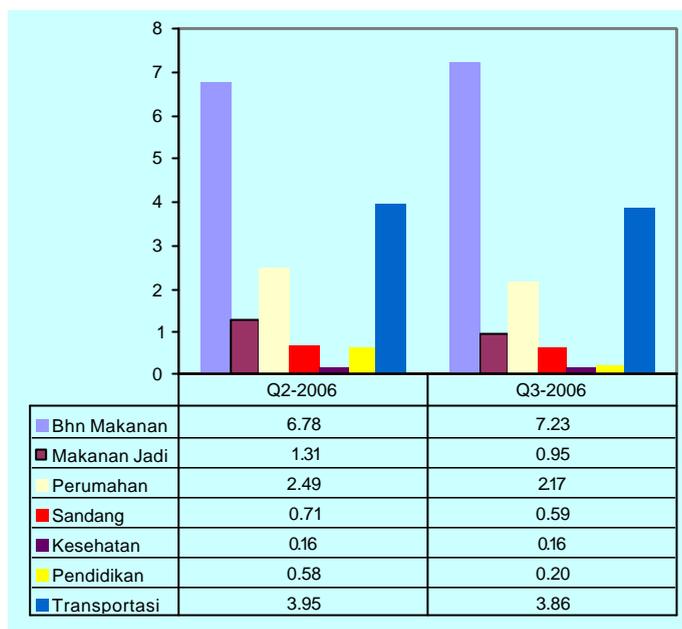
Sub Kelompok	(%)	Jenis Barang
Biaya tempat tinggal	52,89	Kontrak rumah 39,61%, Sewa rumah 25,56%
Bahan bakar	31,16	Minyak tanah 42,72%, Tarif air minum 10,29%
Perlengkapan rumah tangga	7,90	Meja kursi tamu 24,96%, Sprey 14,41%
Penyelenggaraan rumah tangga	8,05	Upah pembantu rumah tangga 39,23%

Sumber : BPS, diolah

## B. INFLASI TAHUNAN (Y.O.Y)

Secara tahunan, laju perubahan harga kota Manado terus mengalami penurunan meskipun tetap bertahan pada level yang cukup tinggi sebagai akibat melekatnya faktor kenaikan harga BBM tahun lalu. Laju inflasi tahunan (y.o.y) kota Manado tercatat sebesar 15,15% atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 15,98%. Menurunnya inflasi secara tahunan di kota Manado, diperkirakan akibat berkurangnya tekanan kenaikan harga dari seluruh kelompok barang dan jasa kecuali kelompok transportasi. Hal tersebut dapat dilihat inflasi tahunannya yang relatif lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari 7 kelompok, seluruh kelompok komoditi mengalami inflasi. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami inflasi sebesar 30,47% khususnya pada sub kelompok transportasi dan sub kelompok sarana dan penunjang transportasi. Dilanjutkan kenaikan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 23,31%, khususnya sub kelompok ikan diawetkan dengan komoditi penyumbangannya adalah ikan asing belah, ikan asin putih serta ikan teri.



Grafik 2.4.  
 Kontribusi Kelompok Barang Terhadap Inflasi Kota Manado

### C. KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI (Y.O.Y)

Dari 7 kelompok barang dan jasa yang terdiri dari 789 komoditi, kenaikan harga di Kota Manado terutama disumbangkan oleh komoditi beras, angkutan dalam kota, minyak tanah, bensin dan cakalang. Komoditi beras merupakan penyumbang inflasi Kota Manado tertinggi sebesar 3,29%, dilanjutkan angkutan dalam kota dan minyak tanah masing-masing memberikan sumbangan sebesar 2,55% dan 1,5%.

Tabel 2.3.  
 Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar (y.o.y)

No.	Komoditi	Bobot	Pertumbuhan YoY	Sumbangan YoY
1	Beras	9,24	44,78	3,29
2	Angkutan Dalam Kota	7,04	45,83	2,55
3	Minyak Tanah	2,77	88,94	1,50
4	Bensin	1,85	87,50	0,99
5	Cakalang	3,25	26,66	0,79
6	Cabe Rawit	0,79	157,20	0,56
7	Malalugis	1,41	49,43	0,54
8	Deho	1,27	42,11	0,43
9	Kue Basah	0,92	49,93	0,35
10	Minyak Goreng	1,34	17,49	0,23
11	Angkutan Antar Kota	0,51	48,33	0,19
12	Kangkung	0,59	39,83	0,19
13	Tude	1,73	10,62	0,19
14	Semen	0,70	29,75	0,18
15	Daging Ayam Ras	0,93	20,83	0,18
16	Mujair	0,65	28,77	0,17
17	Daun Bawang	0,57	31,26	0,16
18	Rokok Kretek Filter	3,18	3,81	0,13
19	Emas Perhiasan	0,55	21,43	0,11
20	Sate	0,39	28,90	0,10
20 komoditi penyumbang inflasi tertinggi				12,85
kenaikan harga secara umum (YoY)				15,15

#### D. KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI (Y.O.Y)

Beberapa komoditas ternyata ada juga yang mengalami penurunan harga pada triwulan laporan. Komoditas tersebut diantaranya bawang merah, tomat sayur, air kemasan, telur ayam ras dan kemiri. Sumbangan deflasi tertinggi berasal dari bawang merah dengan sumbangan -0,62% dilanjutkan tomat sayur dan air kemasan masing-masing dengan kontribusi sebesar -0,08% dan -0,03% terhadap pembentukan harga secara umum.

Tabel 2.4  
 Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar (y.o.y)

No.	Komoditi	Bobot	Pertumbuhan YoY	Sumbangan YoY
1	Bawang Merah	0,64	-45,33	-0,62
2	Tomat Sayur	0,15	-30,00	-0,08
3	Air Kemasan	0,55	-4,86	-0,03
4	Telur Ayam Ras	0,45	-5,47	-0,03
5	Kemiri	0,04	-26,25	-0,02
6	Sabun Cream Detergen	0,05	-21,37	-0,02
7	Telepon Seluler	0,16	-7,42	-0,01
8	Tomat Buah	0,09	-11,25	-0,01
9	Minuman Ringan	0,46	-2,15	-0,01
10	Televisi Berwarna	0,29	-3,17	-0,01
11	Sekolah Dasar	0,61	-1,43	-0,01
12	Mie Kering Instan	0,22	-2,59	-0,01
13	Buncis	0,06	-8,27	-0,01
14	Garam	0,08	-5,61	-0,01
15	Meja Kursi Tamu	0,41	-1,08	-0,01
16	Kemeja Panjang Batik	0,08	-5,03	-0,005
17	Kacang Panjang	0,08	-4,70	-0,005
18	Labu Parang/Manis	0,04	-6,88	-0,003
19	Kaos Kaki	0,03	-8,94	-0,003
20	Kembang Gula	0,12	-2,16	-0,003
20 komoditi penyumbang deflasi tertinggi				-0,89
kenaikan harga secara umum (YoY)				15,15

**BOX 2 :**  
**Dampak Kebijakan Bank Indonesia Berupa Penurunan BI Rate/Suku Bunga SBI Terhadap Suku Bunga Dana dan Kredit Menggunakan Metode Vector Auto Regression (VAR)**

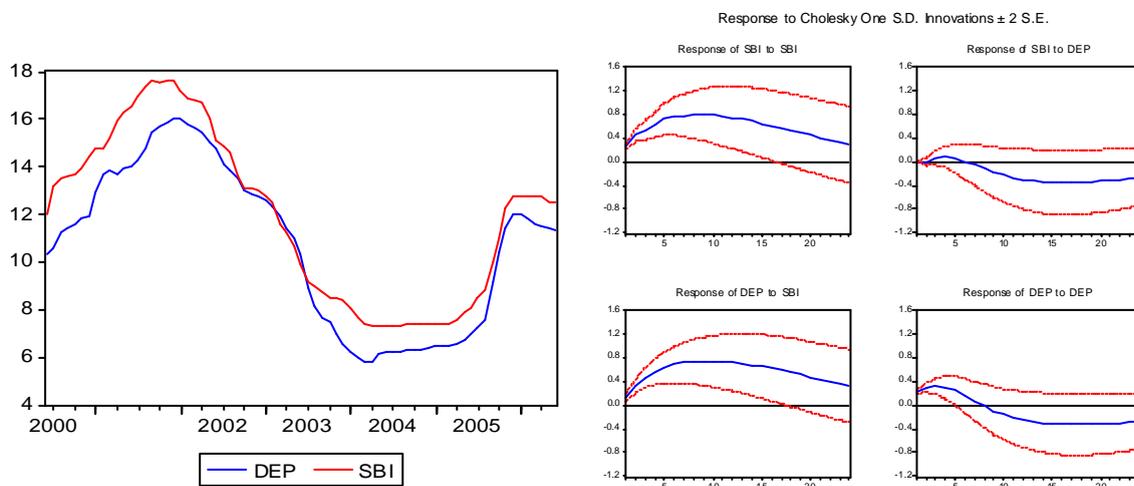
Penurunan suku bunga SBI hingga ke level 10,25% baru-baru ini (posisi 5 Oktober 2006) tentunya sangat menggembirakan bagi pelaku usaha. Hal ini diharapkan akan mampu mendorong perbankan secara umum untuk menurunkan suku bunga kreditnya hingga pembiayaan kepada sektor riil akan meningkat dan pada tahap lebih lanjut mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi secara umum. Namun demikian, tak jarang masih sering didengar berbagai komentar bahwa penurunan BI rate tidak serta merta diikuti oleh perbankan untuk menurunkan suku bunganya khususnya kredit? Bagaimana pula dengan pergerakan suku bunga dana?

Metode yang digunakan dalam analisa adalah VAR (Vector Auto Regression). Model VAR umumnya digunakan untuk menyusun sistem peramalan dari data deret waktu yang saling terkait, dan untuk menganalisa efek/impact dinamis dari keberadaan faktor acak yang mengganggu sistem tersebut. Pendekatan VAR diterapkan jika struktur model yang ada membuat setiap variabel berfungsi sebagai variabel endogeneous yang merupakan fungsi dari nilai-nilai lag seluruh variabel endogenous yang ada pada sistem.

Model VAR :

$$X_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_{t-1} + \epsilon_t$$

Data yang digunakan dalam analisa seluruhnya merupakan data nasional meliputi : data SBI 1 Bulan, suku bunga deposito 1 bulan, dan suku bunga kreidt (modal kerja, investasi dan konsumsi) dengan periode pengamatan mulai Juni 2000 sampai dengan Juni 2006.



**VAR Lag Order Selection Criteria**

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
2	14.09153	65.75372	0.003000	-0.134148	0.211897*	0.001470*
3	17.89297	6.730427	0.003023	-0.127638	0.356824	0.062227
4	24.79813	11.77273*	0.002755*	-0.222889*	0.399991	0.021223
5	26.86868	3.394349	0.002946	-0.159629	0.601670	0.138731
6	27.34071	0.742871	0.003324	-0.043958	0.855759	0.308650

\* indicates lag order selected by the criterion

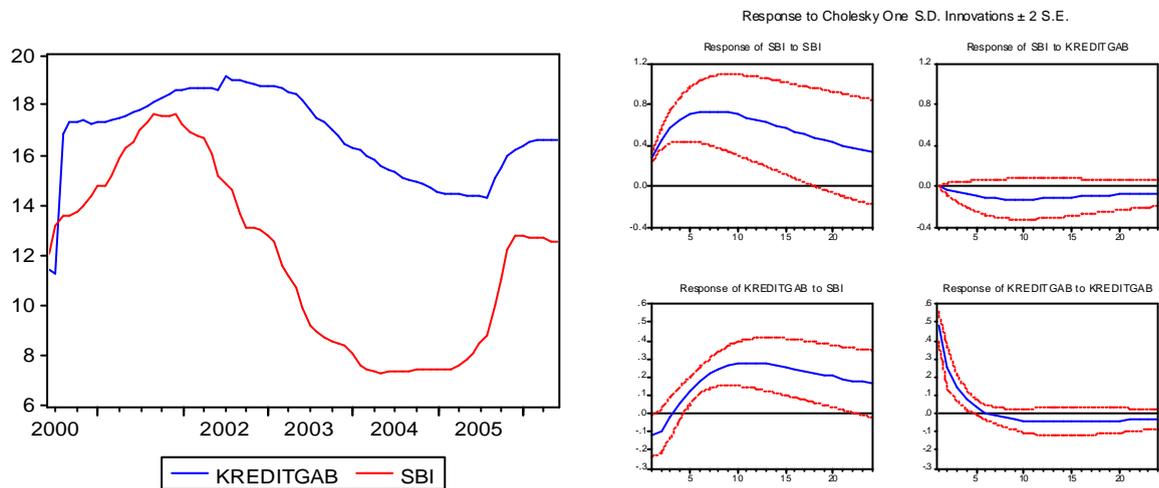
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion


**VAR Lag Order Selection Criteria**

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
2	43.54760	22.17547	0.001142*	-1.099921*	-0.753876*	-0.964303*
3	47.41010	6.838515	0.001149	-1.095413	-0.610950	-0.905547
4	48.32849	1.565785	0.001274	-0.994377	-0.371496	-0.750264
5	48.58752	0.424633	0.001445	-0.871722	-0.110423	-0.573362
6	50.52646	3.051450	0.001554	-0.804146	0.095571	-0.451539
7	53.15902	3.970424	0.001638	-0.759312	0.278822	-0.352457
8	54.52944	1.977002	0.001803	-0.673097	0.503456	-0.211995
9	67.49598	17.85556*	0.001360	-0.967081	0.347889	-0.451732

\* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Dari hasil pengolahan dan analisa dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan Bank Indonesia dalam hal ini menurunkan BI rate atau suku bunga SBI sudah cukup efektif untuk menurunkan suku bunga perbankan secara umum. Namun demikian, perubahannya tidak serta merta pada saat yang bersamaan.
2. Respon perubahan SBI terhadap suku bunga kredit modal kerja, investasi dan konsumsi

No.	Item	Jenis Kredit			
		Rata2 Kredit	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
1.	Lag (respon awal optimum)	2	2	2	2
2.	Interval waktu hingga klimaks	11-12	13-14	14-15	11-12

Pergerakan suku bunga SBI direspon oleh masing-masing jenis kredit secara berbeda-beda. Secara umum, kredit konsumsi merupakan jenis kredit yang paling responsif terhadap pergerakan suku bunga SBI sedangkan yang paling *reluctant* (lambat bergerak) adalah suku bunga kredit investasi dibandingkan dengan jenis kredit lainnya.

3. Perubahan suku bunga kredit baik secara rata-rata gabungan maupun berdasarkan jenis penggunaan yaitu modal kerja, investasi dan konsumsi secara umum dapat dikatakan lebih responsif bila dibandingkan dengan perubahan suku bunga dana (yang direpresentasikan dengan suku bunga deposito 1 bulan) hal ini tercermin dari lag perubahan deposito sebesar 4 bulan yang lebih lama dibandingkan lag perubahan kredit sebesar 2 bulan setelah pergerakan BI Rate/suku bunga SBI. Walaupun demikian, efek perubahan suku bunga SBI akan lebih lama dirasakan oleh suku bunga kredit dibandingkan dengan suku bunga deposito. Dengan demikian, benar adanya penyesuaian suku bunga kredit relatif lebih lama dibandingkan dengan suku bunga dana. Faktor yang menyebabkan cukup *reluctant*-nya pergerakan suku bunga kredit diantaranya adalah sektor riil belum bergerak secara optimal sehingga untuk mempertahankan keuntungannya bank cenderung memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini terkait dengan iklim usaha dan investasi di Indonesia yang belum seperti yang kita harapkan bersama. Dengan demikian, kerjasama yang lebih intens dalam hal perbaikan iklim investasi tentunya akan membawa manfaat yang cukup besar tidak hanya bagi pelaku usaha namun juga masyarakat secara umum. Tentunya Bank Indonesia, BPS, Bappeda dan instansi terkait lainnya

## BAB III PERKEMBANGAN KEUANGAN DAN PASAR KEUANGAN

Kinerja perbankan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kredit yang berhasil disalurkan maupun penghimpunan dana masyarakat yang telah mendorong meningkatnya rasio *Loan to Deposito Ratio* (LDR *Narrow*). Peningkatan rasio LDR ini terjadi karena performa kredit mengalami ekspansi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan penghimpunan dana. Sementara itu, kualitas kredit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya baik dari sisi rasio maupun jumlahnya.

Tabel 3.1.  
Indikator Perbankan Sulawesi Utara

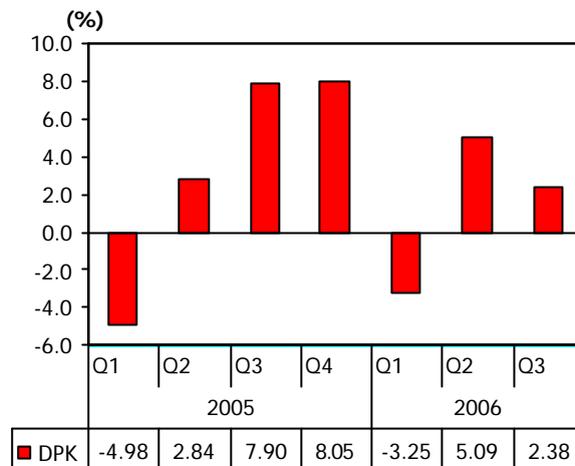
Komponen	2005				2006		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
DPK (Rp Miliar)	4.367	4.491	4.846	5.236	5.066	5.324	5.450
Pertumbuhan (%)	(4,98)	2,84	7,90	8,05	(3,25)	5,09	2,38
Kredit (Rp Miliar)	3.463	3.693	3.901	4.123	4.307	4.620	4.792
Pertumbuhan (%)	1,44	6,64	5,63	5,69	4,46	7,27	3,71
LDR (%)	79,30	82,23	80,50	78,74	85,02	86,78	87,92
NPL (%)	4,01	5,44	5,31	5,07	5,78	5,71	6,08

Sumber : Bank Indonesia Manado, diolah

### A. FUNGSI INTERMEDIASI

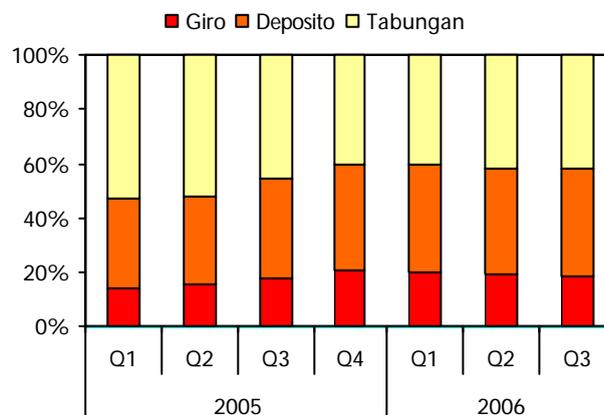
#### 1. Penyerapan Dana Masyarakat

Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan Sulawesi Utara sampai dengan akhir triwulan III 2006 telah mencapai Rp5,45 triliun atau meningkat sebesar 2,38% dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan dana pihak ketiga pada triwulan laporan cenderung melambat bila dibandingkan triwulan II 2006 yang mencapai 5,09%. Melambatnya pertumbuhan dana masyarakat lebih disebabkan faktor musiman antara lain meningkatnya penggunaan uang tunai menjelang hari-hari besar keagamaan (Ramadhan dan Lebaran) serta mulai terealisasinya proyek-proyek pemerintah daerah yang menyerap banyak dana milik pemda di sistem perbankan.



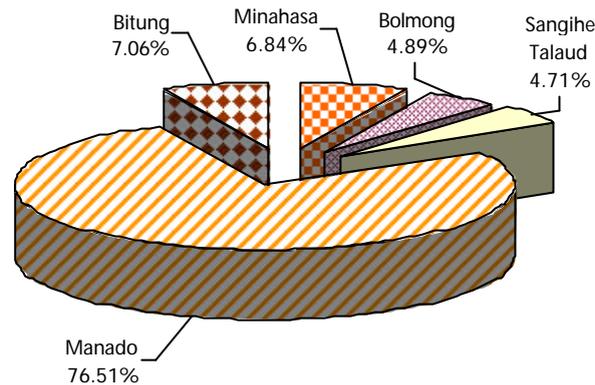
Grafik 3.1.  
 Pertumbuhan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Penempatan dana masyarakat di Sulawesi Utara hingga saat ini masih didominasi oleh jenis simpanan berbentuk tabungan (41,39%), kemudian disusul oleh deposito (40,06%) dan giro (18,55%). Menurut kelompok bank penghimpun dana, bank pemerintah menyerap 61,59% dari seluruh DPK di Sulawesi Utara sedangkan bank swasta hanya sekitar 38,4%. Berdasarkan kepemilikannya, dana yang dimiliki pemerintah daerah baik provinsi/kota/kabupaten hanya sebesar Rp731 miliar atau 13,41% dari seluruh dana yang dihimpun perbankan Sulawesi Utara. Dana ini sebagian besar dalam bentuk giro yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek sedangkan sisanya sebesar 88,03% di miliki oleh pihak swasta atau sebesar Rp4.720 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa roda perekonomian Sulawesi Utara lebih banyak digerakkan oleh dana pihak swasta.



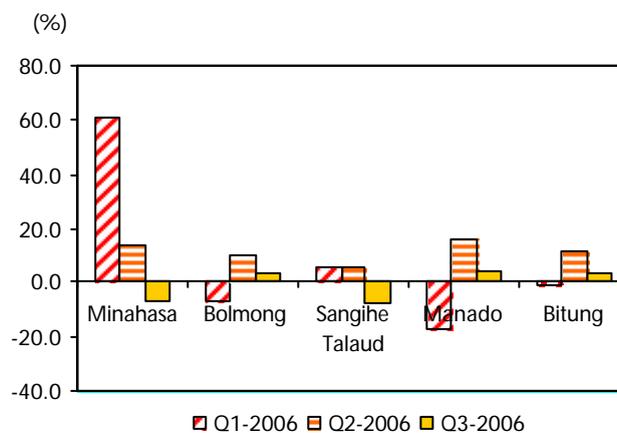
Grafik 3.2.  
 Komposisi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan wilayah penghimpunan dananya, dari jumlah DPK sebesar Rp5.450 miliar di Sulawesi Utara, sebagian besar atau 76,51% berasal dari bank-bank yang berlokasi di Kota Manado, selanjutnya adalah di Kota Bitung yang mencatat pangsa sebesar 7,06% dan yang terendah adalah di Kabupaten Sangihe – Talaud 4,71%.



Grafik 3.3.  
Sebaran Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kabupaten/Kota

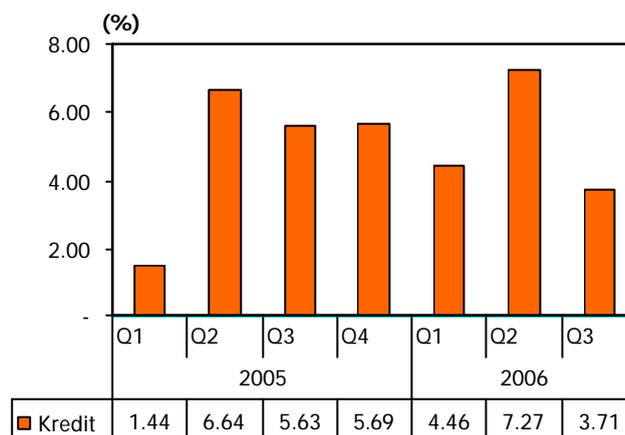
Dilihat berdasarkan pertumbuhannya secara triwulanan, maka sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Utara mengalami perlambatan dan sebagian lagi justru mengalami koreksi. Pada triwulan III 2006, kabupaten/kota yang masih mencatat pertumbuhan positif walaupun relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya adalah Manado (3,78%), Bitung (3,25%) dan Bolaang Mongondow (3,24%). Sementara itu, kabupaten/kota lainnya justru mencatat koreksi didalam penghimpunan dana masyarakat pada triwulan ini.



Grafik 3.4.  
Pertumbuhan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Kabupaten/Kota

## 2. Penyaluran Kredit

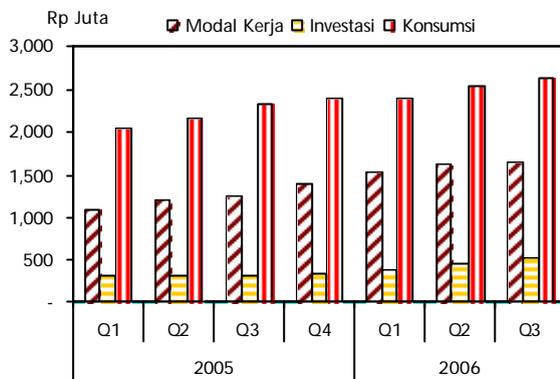
Fungsi intermediasi perbankan di Sulawesi Utara sampai triwulan III 2006 berjalan baik tercermin dari meningkatnya kredit yang disalurkan perbankan. Secara triwulanan, kredit di Sulawesi Utara naik 3,71%, demikian pula secara tahunan sebesar 22,83%. Berdasarkan jenis penggunaannya, meningkatnya kredit secara triwulanan disumbangkan oleh seluruh jenis kredit berdasarkan jenis penggunaan (modal kerja, investasi dan konsumsi) dengan pertumbuhan tertinggi secara triwulanan dicatat kredit investasi (13,47%). Menurut pangsa pasarnya, kredit konsumsi memiliki pangsa terbesar yaitu sebesar 54,95% atau relatif stabil bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Cukup tingginya pangsa kredit konsumsi di Sulawesi Utara tak lepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan bank di samping pola hidup masyarakat Sulawesi Utara yang cenderung konsumtif serta dominasi sektor konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.



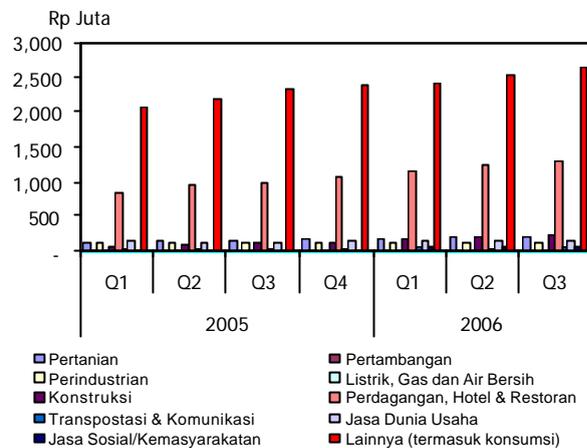
Grafik 3.5.  
Pertumbuhan Kredit Bank Umum

Secara sektoral, peningkatan kredit tertinggi terjadi di sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 42,17% walaupun dengan nominal yang relatif kecil dari Rp313 juta naik menjadi Rp445 juta. Sektor lainnya yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan komunikasi 14,32%. Sementara itu, penyaluran kredit di sektor pertambangan dan sektor perindustrian justru mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,09% dan 0,75%. Menurut pangasanya, penyaluran kredit terbesar tercatat pada sektor lain-lain (sektor konsumsi) sebesar 55,28% yang dilanjutkan oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan pangsa sebesar 27,05%. Berdasarkan kelompok bank, dominasi bank pemerintah didalam penyaluran kredit masih terus berlanjut pada triwulan laporan. Pangsa bank

pemerintah mencapai 75,25% dari keseluruhan kredit yang disalurkan perbankan Sulawesi Utara.



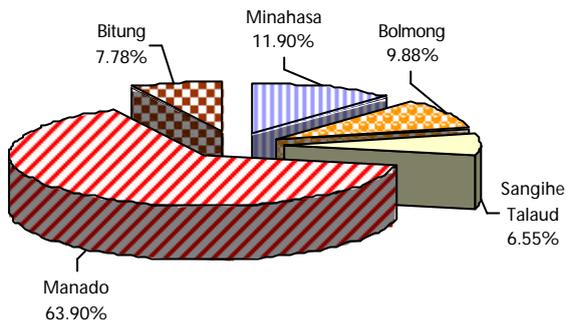
Grafik 3.6.  
Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



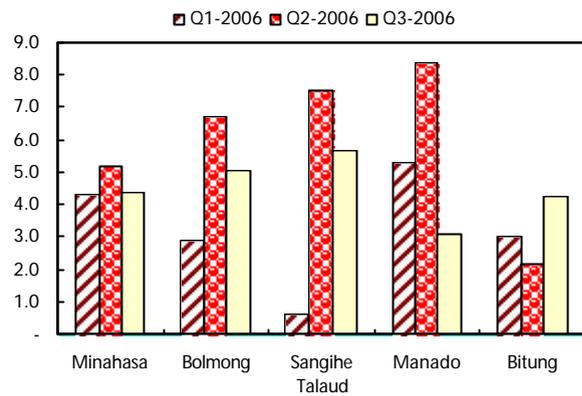
Grafik 3.7.  
Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan wilayah penyalurannya, kota Manado menyerap 63,9% dari total kredit, diikuti kab.Minahasa (11,9%), kab.Bolaang Mongondow (9,88%), kota Bitung (7,78%), dan kabupaten Sangihe dan Talaud (6,55%). Tidak meratanya penyebaran kredit ini diakibatkan relatif rendahnya daya serap kredit di luar Kota Manado karena belum terlalu tingginya aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Selain itu, sebagian besar jaringan kantor perbankan masih terkonsentrasi di kota Manado.

Dilihat berdasarkan pertumbuhannya secara triwulanan, hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan positif namun relatif melambat bila dibandingkan triwulan sebelumnya, hanya kota Bitung yang masih mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2006, kab.Sangihe Talaud mencatat pertumbuhan positif tertinggi yaitu sebesar 5,66% diikuti kab.Bolaang Mongondow (5,03%), kab.Minahasa (4,38%), kota Bitung (4,27%), dan kota Manado (3,13%).

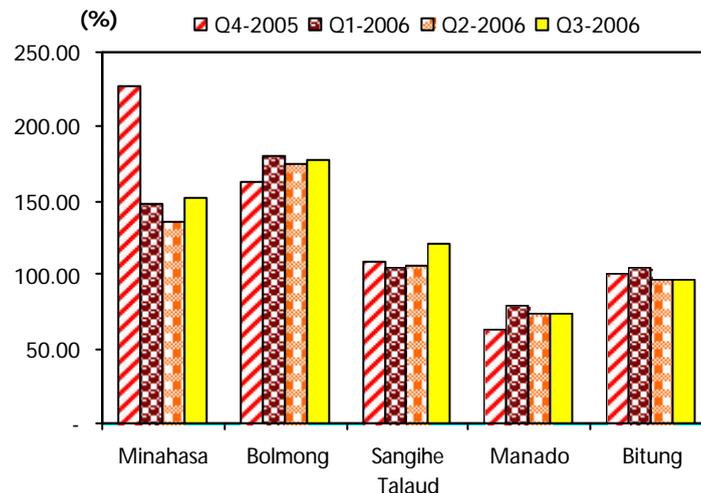


Grafik 3.8.  
Penyerapan Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota



Grafik 3.9.  
Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota

Fungsi intermediasi perbankan di Sulawesi Utara yang dicerminkan dari rasio Loan To Deposit (LDR) tercatat mengalami perbaikan yaitu dari 86,78% (triwulan II 2006) menjadi 87,92% pada triwulan ini. Berdasarkan wilayah administrasinya, pada triwulan ini rasio Loan To Deposit (LDR) tertinggi dicatat oleh kab.Bolaang Mongondow sebesar 177,71% atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 174,68%, sedangkan rasio LDR terendah dicatat kota Manado sebesar 73,43% atau turun dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 73,89%. Dengan rata-rata rasio LDR masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Utara tercatat antara 70%-170%, dapat dikatakan fungsi intermediasi perbankan telah berjalan dengan cukup baik.



Grafik 3.10.  
Rasio Loan To Deposit Berdasarkan Kabupaten/Kota

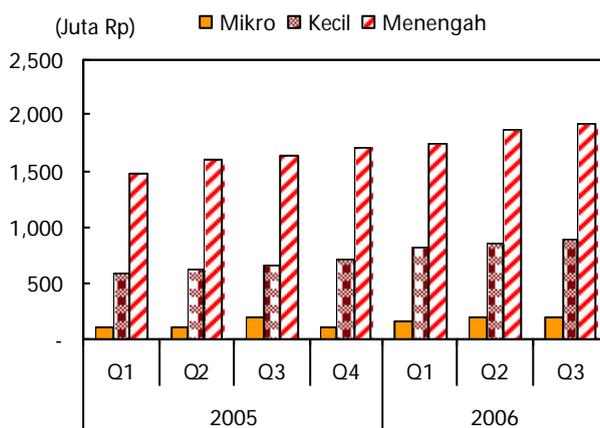
Secara umum, penyaluran kredit di Sulawesi Utara meskipun mencatat pertumbuhan positif namun masih relatif lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang dominan juga masih rendah pertumbuhannya pada triwulan III

2006. Hal ini merupakan konsekuensi dari sikap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit serta belum kuatnya sinyal penguatan ekonomi di masa mendatang. Dalam rangka meningkatkan perekonomian baik nasional maupun regional, Bank Indonesia dalam triwulan III-2006 ini telah menurunkan suku bunga (BI rate) sebesar 125 bps menjadi 11,25% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya.

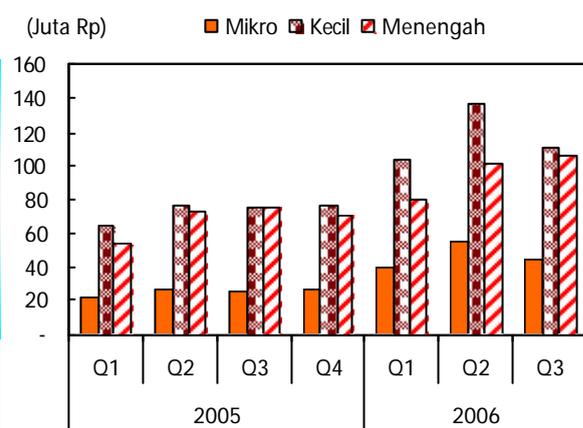
### 3. Kredit UMKM

Porsi penyaluran kredit UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di Sulawesi Utara terhadap penyaluran kredit secara keseluruhan memiliki kecenderungan menurun. Namun secara nominal, nilai kredit yang berhasil disalurkan oleh perbankan di Sulawesi Utara, baik kredit secara umum maupun kredit UMKM masih menunjukkan peningkatan.

Penyaluran kredit UMKM sampai dengan triwulan III 2006 mencatat peningkatan. Secara triwulanan, UMKM tumbuh 2,64% atau secara tahunan sebesar 20,32%. Hal ini seiring dengan ekspansi kredit bank secara umum yang juga mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan pangsaanya, penyaluran kredit UMKM masih didominasi pada kredit menengah dengan porsi sebesar 64,16% sedangkan kredit mikro dan kecil hanya mengambil porsi masing-masing sebesar 6,39% dan 29,45%. Kecilnya porsi kredit mikro dan kecil terutama disebabkan oleh cukup tingginya rasio kredit bermasalah pada sektor ini yaitu masing-masing sebesar 23,34% dan 12,69%, jauh dari batas toleransi Bank Indonesia. Sedangkan rasio kredit bermasalah pada kredit menengah hanya sebesar 5,56%.

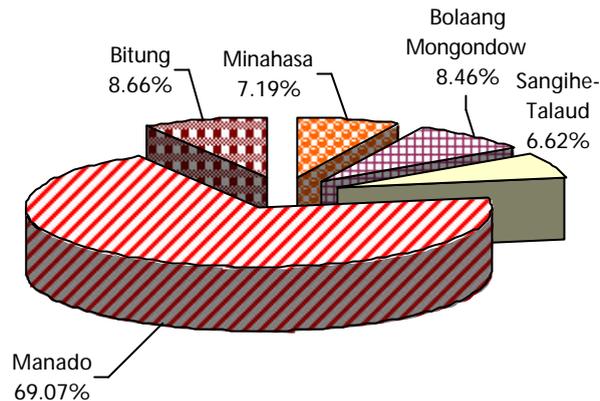


Grafik 3.11.  
Perkembangan Kredit UMKM



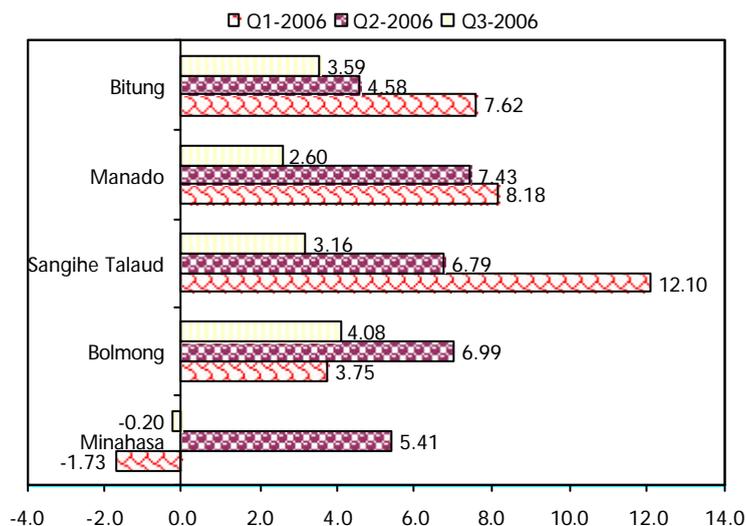
Grafik 3.12.  
Perkembangan NPL Kredit UMKM

Berdasarkan sebarannya, penyaluran kredit UMKM masih belum merata dan lebih banyak terfokus pada daerah-daerah tertentu. Tercatat Kota Manado menyerap 69,07% atau turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 69,2% dari total kredit UMKM yang disalurkan di wilayah Sulawesi Utara, diikuti Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Sangihe Talaud.



Grafik 3.13.  
Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota

Dilihat dari sisi pertumbuhan, kab. Bolaang Mongondow pada triwulan ini mencatat pertumbuhan tertinggi untuk total kredit UMKM di Sulawesi Utara, disusul kota Bitung, kab. Sangihe Talaud dan kota Manado, sementara kab. Minahasa mengalami koreksi pertumbuhan.

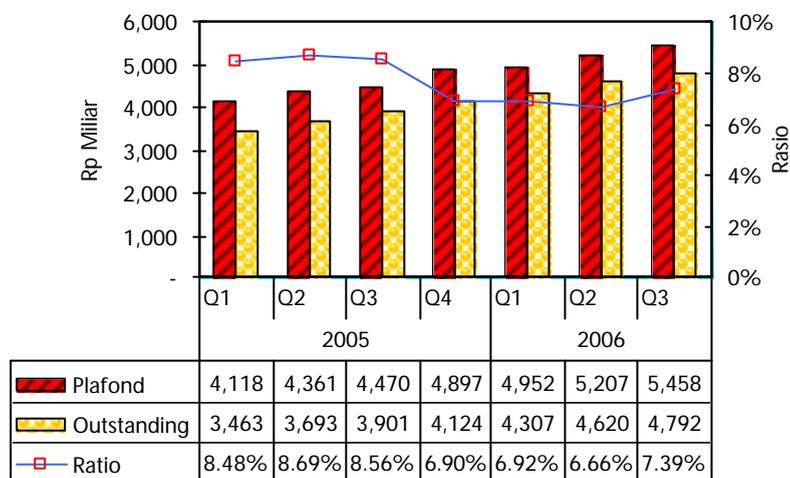


Grafik 3.14.  
Pertumbuhan Kredit UMKM di Kabupaten/Kota

## B. RISIKO KREDIT

### 1. Rasio Kelonggaran Tarik Kredit

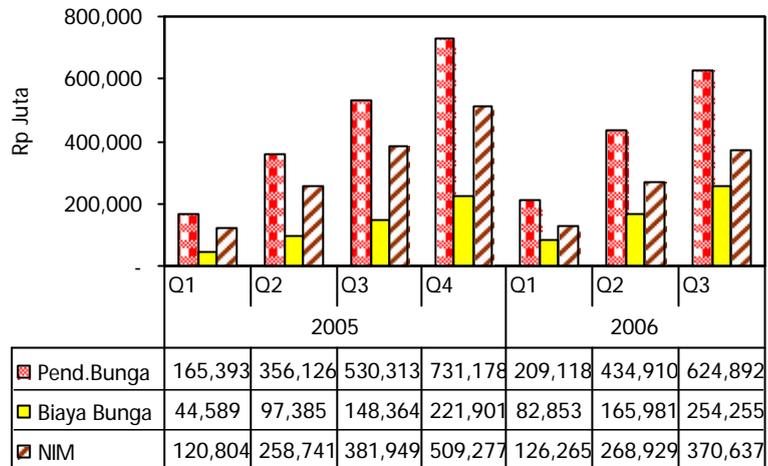
Berdasarkan laporan bulanan bank umum (LBU) tercatat bahwa rasio kelonggaran tarik kredit mengalami peningkatan dari 6,66% pada akhir triwulan II 2006 menjadi 7,39% pada triwulan laporan. Meningkatnya rasio kelonggaran tarik kredit ini disebabkan banyak nasabah yang mengurungkan niatnya untuk menarik kredit yang telah disetujui bank akibatnya belum berjalannya sektor riil sesuai yang mereka harapkan. Hal ini antara lain disebabkan belum terlalu stabilnya perekonomian, krisis listrik, masih adanya birokrasi yang panjang dalam bidang perijinan, dlsbnya.



Grafik 3.15.  
Perkembangan Rasio Kelonggaran Tarik Bank Umum

### 2. Net Interest Margin (NIM)

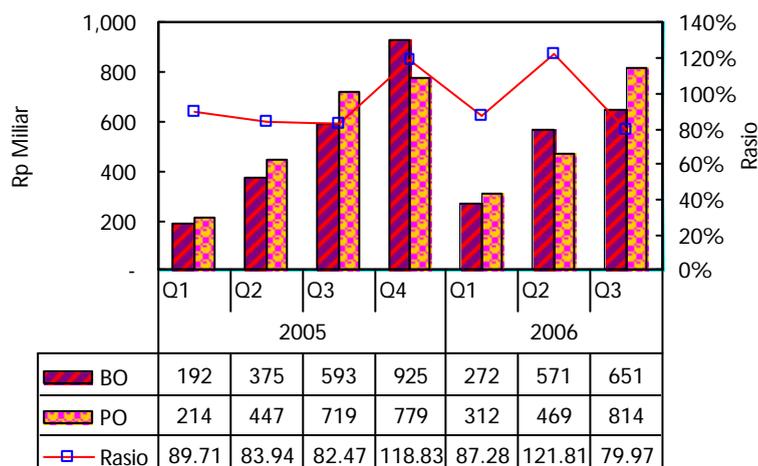
Berdasarkan neraca konsolidasi bank umum, saldo bersih pendapatan bunga setelah dikurangi biaya bunga atau yang biasa disebut Net Interest Margin (NIM) untuk triwulan III 2006 berada dalam keadaan positif. Hal ini berarti bahwa pendapatan bunga (antara lain dalam bentuk kredit dan penempatan antar bank) lebih besar dibandingkan dengan biaya bunga (antara lain dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito). Namun, pencapaian NIM triwulan III-2006 masih lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Tercatat NIM triwulan laporan sebesar Rp370,64 miliar atau turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp381,9 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan biaya bunga yang lebih tinggi pada triwulan laporan sebagai dampak masih relatif tingginya tingkat suku bunga dana saat ini.



Grafik 3.16.  
Net Interest Margin Bank Umum

### 3. Rasio BOPO

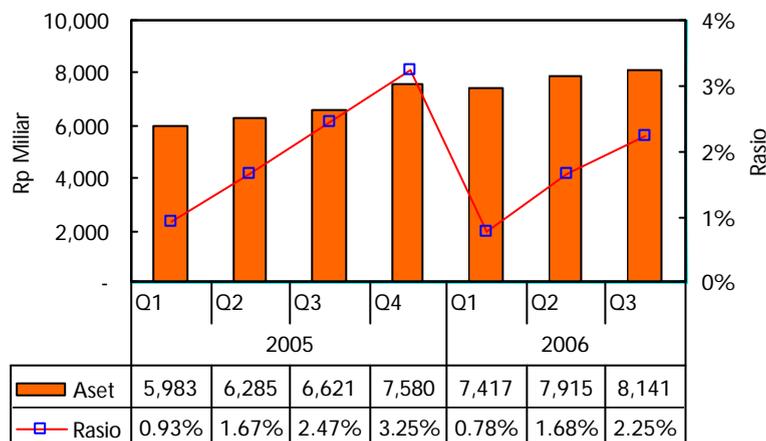
Tingkat efisiensi perbankan yang antara lain diukur dengan rasio BOPO memperlihatkan peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Sampai dengan triwulan III 2006, rasio BOPO bank umum di Sulawesi Utara tercatat sebesar 79,97%, membaik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,47%.



Grafik 3.17.  
Net Interest Margin Bank Umum

#### 4. Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) yang mengindikasikan kemampuan menghasilkan laba dengan asset yang dimiliki tercatat sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2006, ROA bank umum di Sulawesi Utara tercatat 2,25% atau relatif menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,47%. Penurunan ini disebabkan beberapa hal antara lain meningkatnya asset yang dimiliki tidak diimbangi secara seimbang dengan kemampuan menghasilkan laba yang diharapkan. Tercatat asset bank umum di Sulawesi Utara pada triwulan III 2006 mencapai Rp8,14 triliun atau 22,96% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, sedangkan laba yang dihasilkan meningkat hanya 12,39%.



Grafik 3.18.  
Return on Asset (ROA)

#### 5. Sensitivitas Resiko Pasar

Sensitivitas terhadap resiko pasar adalah tingkat kepekaan aset maupun liabilities terhadap volatilitas suku bunga. Aset dan liabilities dimaksud adalah aktiva maupun passiva yang sensitive terhadap perubahan suku bunga. Tingkat sensitivitas dipengaruhi oleh struktur on/off balance sheet antara lain : jenis, karakteristik, jangka waktu, besaran dan rating instrument. Tingkat sensitivitas yang tinggi dapat dilihat dari besarnya perubahan yang diakibatkan oleh volatilitas suku bunga dan nilai tukar. Pendekatan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas tersebut adalah pendekatan melalui perhitungan Net Portfolio Value (NPV), yaitu untuk mengetahui perubahan economic value dari suatu portofolio. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah pendekatan earning, yaitu pendekatan untuk menghitung potensial profit dan loss dari suatu portofolio. Mengingat

dalam perhitungan sensitivitas terhadap resiko pasar juga menetapkan potensial loss terhadap ekses modal maka pendekatan yang relevan untuk mengukur tingkat sensitivitas adalah pendekatan earning.

Dalam hal ini diperlukan identifikasi secara tepat atas aset, kewajiban, dan rekening administratif yang mengandung risiko suku bunga dan nilai tukar baik aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas bank secara keseluruhan. Setelah itu dilakukan perhitungan gap position suku bunga maupun nilai tukar. Semakin besar bank memelihara gap position maka semakin tinggi potensial profit dan loss bank. Oleh karena itu diperlukan peraturan gap yang sesuai dengan strategi yang diambil yaitu dengan mempertimbangkan perkiraan arah suku bunga (interest rate forecast), tingkat keyakinan manajemen terhadap perkiraan yang dimaksud (degree of confidential) dan preferensi tingkat resiko yang diambil (risk appetite).

Sensitivitas assets dan liabilities ditunjukkan oleh perubahan NIM bank akibat perubahan suku bunga, sedangkan perubahan NIM dipengaruhi oleh posisi gap bank. Tingkat sensitivitas NIM bank terhadap perubahan suku bunga sangat tergantung kepada karakteristik instrumen keuangan yang membentuk portofolio bank tersebut, antara lain jatuh tempo (maturity) dan karakteristik suku bunga bank (floating atau fixed).

Tabel 3.2.  
 Portopolio Interest Instrument Perbankan (dalam miliar Rp)

No.	Aktiva	Q4-05	Q1-06	Q2-06	Q3-06
1	Penempatan pada Bank Indonesia	449,59	552,91	767,13	611,10
2	Penempatan pada Bank Lain	296,84	281,11	141,84	261,05
3	Surat Berharga yang Dimiliki	9,96	9,97	9,97	9,97
4	Kredit yang Diberikan	4.123,67	4.306,99	4.620,06	4.791,66
5	Tagihan Lainnya	3,41	3,62	1,24	1,24
<b>Total Aktiva</b>		<b>4.883,49</b>	<b>5.154,63</b>	<b>5.540,27</b>	<b>5.675,04</b>

No.	Aktiva	Q4-05	Q1-06	Q2-06	Q3-06
1	Giro	1.057,71	997,27	1.023,56	1.010,84
2	Tabungan	2.120,50	2.050,40	2.214,89	2.256,14
3	Simpanan Berjangka	2.057,47	2.017,26	2.085,15	2.183,20
4	Kewajiban kepada Bank Indonesia	5,65	5,10	5,95	5,52
5	Kewajiban kepada Bank Lain	234,95	79,64	100,64	135,21
6	Surat Berharga yang Diterbitkan	210,71	212,10	211,30	211,85
7	Pinjaman yang Diterima	16,37	15,89	15,24	13,08
8	Kewajiban Lainnya	57,75	41,52	44,50	47,16
9	Setoran Jaminan	7,92	6,91	9,15	10,19
<b>Total Passiva</b>		<b>5.769,06</b>	<b>5.426,14</b>	<b>5.710,42</b>	<b>5.873,22</b>
<b>GAP (Total Aktiva-Total Passiva)</b>		<b>-885,56</b>	<b>-271,51</b>	<b>-170,15</b>	<b>-198,18</b>

Memperhatikan kondisi assets dan liabilities perbankan Sulawesi Utara selama dua triwulan terakhir menunjukkan kebijakan RSA < RSL. Apabila diasumsikan pada triwulan mendatang terjadi penurunan suku bunga (BI Rate) berkenaan dengan berkurangnya tekanan inflasi dan semakin membaiknya indikator makroekonomi, diperkirakan pendapatan bank akan naik karena penurunan interest expense lebih besar dari pada penurunan interest income. Sebaliknya, apabila suku bunga naik maka pendapatan akan turun karena interest expense lebih besar dari pada interest income.

### C. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Secara kelembagaan, jumlah BPR yang beroperasi di wilayah kerja Bank Indonesia Manado sebanyak 22 BPR yang keseluruhannya merupakan bank konvensional. Persebaran BPR ini sebanyak 15 BPR dengan 19 kantor beroperasi di Sulawesi Utara sedangkan 7 BPR dengan jumlah 8 kantor beroperasi di Gorontalo. Sampai triwulan III 2006, kinerja BPR di Sulawesi Utara cukup menggembirakan, hal ini antara lain tercermin dari peningkatan jumlah asset, dana pihak ketiga yang dihimpun serta jumlah kredit yang berhasil disalurkan. Namun demikian, hal ini tidak diiringi dengan perubahan kualitas kredit yang relatif sama dengan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan III 2006, total asset BPR di Sulawesi Utara tercatat sebesar Rp125 miliar, dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun (DPK) sebesar Rp87 miliar dan jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp94 miliar. Berdasarkan komponen permbentuk DPK, sebagian besar dalam bentuk simpanan berjangka (deposito) dengan share sebesar 68,97% atau sebesar Rp60 miliar, sedangkan sisanya dalam bentuk tabungan. Berdasarkan jenisnya,

kredit yang disalurkan sebagian besar merupakan kredit konsumsi dengan share sebesar 63,83%, selanjutnya adalah kredit modal kerja dengan share sebesar 26,6% dan sisanya kredit investasi. Dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya, hanya kredit konsumsi yang mencatat pertumbuhan positif yaitu dari Rp56 miliar menjadi Rp60 miliar pada posisi triwulan laporan. Peningkatan kredit konsumsi seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor konsumsi serta berbagai kemudahan yang diberikan oleh BPR dalam pengajuan kredit dibandingkan bank umum walaupun bunga yang diberikan jauh lebih tinggi.

Fungsi intermediasi berjalan baik, tercermin dari rasio LDR (Loan To Deposit Ratio) BPR di Sulawesi Utara yang sudah mencapai 108,05% atau naik dibandingkan triwulan sebelumnya 104,65%. Dari sisi kualitas kredit, tercatat sedikit membaik tercermin dari rasio *Non Performing Loan (NPL)* yang sedikit turun dari 5,61% pada akhir triwulan II 2006 menjadi 5,41% pada triwulan laporan.

Tabel 3.3.  
 Perkembangan Usaha BPR Sulawesi Utara (Miliar Rp)

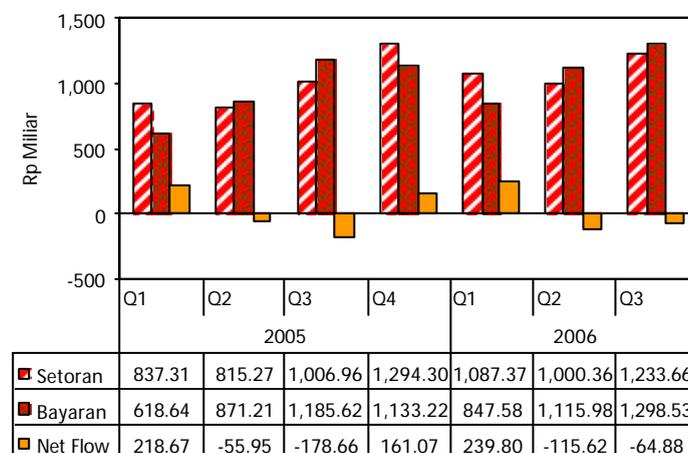
Komponen	2005			2006		
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>Total Aset</b>	91	95	102	112	123	125
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	56	58	66	77	86	87
Deposito	39	41	46	54	61	60
Tabungan	16	17	20	23	25	27
<b>Kredit Jenis Penggunaan</b>	68	71	75	84	90	94
Modal Kerja	23	23	23	24	25	25
Investasi	6	7	7	7	9	9
Konsumsi	40	46	46	54	56	60
<b>Kredit Sektor</b>	68	71	75	84	90	94
Pertanian	1	1	1	2	2	2
Perindustrian	1	1	0	1	1	1
Perdagangan	18	19	18	20	19	19
Jasa-jasa	7	8	8	9	11	11
Lain-lain	41	43	47	53	58	62
<b>NPL</b>						
Nominal	5	5	5	5	5	5
Rasio Gross (%)	6.88	6.50	6.03	5.57	5,61	5,41

## BAB IV PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

### A. PERKEMBANGAN ALIRAN UANG KARTAL

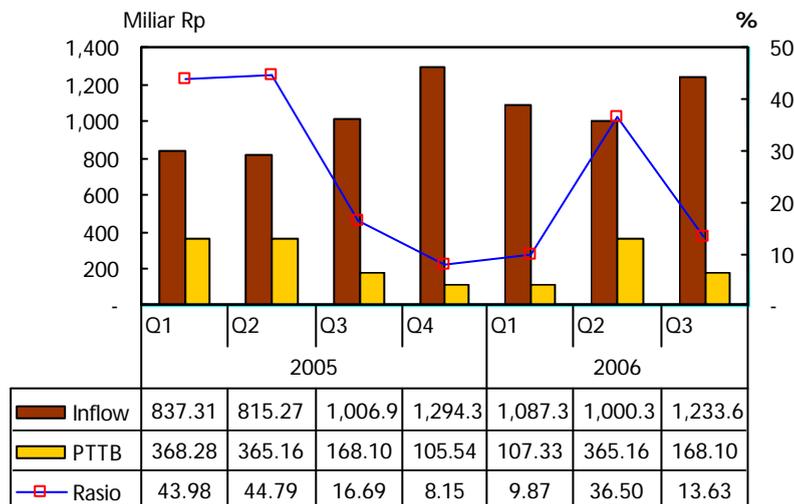
Aliran uang kartal di kasanah Kantor Bank Indonesia Manado sepanjang triwulan III 2006 dalam kondisi *net outflow* yang berarti aliran uang kartal masuk (*inflow*) ke dalam kasanah Kantor Bank Indonesia Manado lebih kecil dibandingkan aliran uang keluar (*ouflow*) dari kasanah. Hal ini terjadi berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal di masyarakat untuk transaksi yang terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru dan menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan serta meningkatnya realisasi pembiayaan pembangunan proyek-proyek pemerintah sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran.

Sepanjang akhir triwulan III 2006, aliran uang masuk ke kasanah Kantor Bank Indonesia tercatat sebesar Rp1.233,66 miliar (naik 23,32%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan aliran uang keluar dari kasanah Kantor Bank Indonesia Manado tercatat sebesar Rp1.298,53 miliar (naik 16,36%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara *netto*, aliran uang kartal di Kasanah Bank Indonesia Manado dalam keadaan *net outflow* sebesar Rp64,88 miliar atau turun 43,89% dibandingkan triwulan sebelumnya. Selama periode laporan, *net outflow* tercatat dua kali yaitu pada bulan Juli dan September yang masing-masing tercatat sebesar Rp73,52 miliar dan Rp20,98 miliar. Sementara itu, pada bulan Agustus aliran uang kartal di kasanah Bank Indonesia Manado mengalami *net inflow* sebesar Rp29,62 miliar.



Grafik 4.1.  
Aliran Uang Kartal Kantor Bank Indonesia Manado

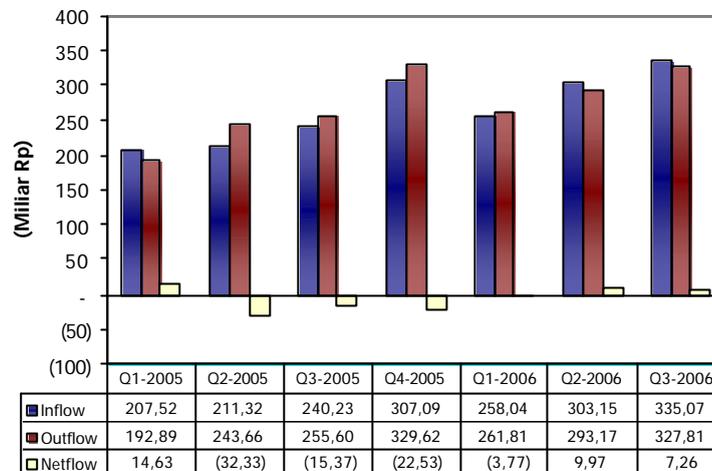
Sebagai bentuk upaya memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan, maka Bank Indonesia Manado melakukan kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) yaitu pemusnahan terhadap uang yang sudah tidak layak edar. Selama triwulan III 2006, rasio PTTB terhadap aliran uang kartal yang masuk ke Kantor Bank Indonesia Manado mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 36,5% menjadi 13,63% dengan jumlah nominal kegiatan PTTB sebesar Rp168,1 miliar. Hal ini menunjukkan kecenderungan pola musiman yang terjadi selama ini, pada triwulan I dan II kecenderungan kegiatan PTTB mengalami peningkatan sebagai akibat meningkatnya kegiatan transaksi selama perayaan hari-hari besar keagamaan dan realisasi anggaran pemerintah daerah menjelang tutup tahun anggaran, sedangkan pada triwulan III dan IV cenderung mengalami penurunan.



Grafik 4.2.  
Rasio PTTB Terhadap Inflow

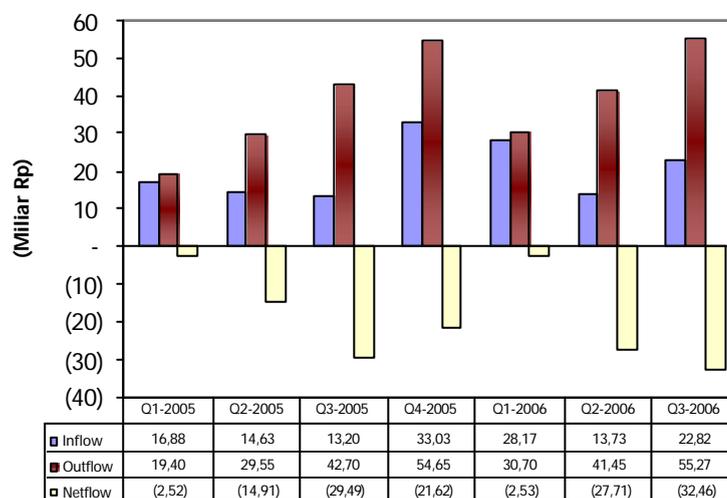
Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan kebutuhan uang yang layak edar bagi masyarakat setempat (*fit to transaction*) yang lokasinya jauh dari Manado, Kantor Bank Indonesia Manado melaksanakan kegiatan kas titipan di Gorontalo dan Tahuna dengan bekerjasama dengan salah satu bank umum di wilayah tersebut.

Kegiatan kas titipan di Gorontalo sepanjang triwulan III 2006 berada pada kondisi *net inflow* sebesar Rp7,26 miliar yang berarti aliran uang kartal yang masuk ke dalam khasanah kas titipan lebih besar dibandingkan aliran keluar uang kartal dari khasanah. Kondisi *net inflow* relatif sama bila dibandingkan triwulan yang sama tahun 2005 yang juga mengalami keadaan *net inflow*.



Grafik 4.3.  
Netflow Kas Titipan Gorontalo

Secara historis, kegiatan kas titipan Tahuna cenderung mengalami *net outflow*. Hal serupa berlaku pada triwulan III 2006 yang kembali mengalami *net outflow* sebesar Rp32,46 miliar, lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp27,71 miliar.



Grafik 4.4.  
Netflow Kas Titipan Tahuna

Posisi kas gabungan Bank Indonesia Manado sampai akhir triwulan III 2006 mencapai Rp1.179,21 miliar naik 10% dibandingkan posisi kas akhir triwulan II 2006. Berdasarkan perhitungan rata-rata *outflow* dan kegiatan PTTB selama tahun 2006 dan dengan mengambil asumsi tidak ada remise masuk ke Kantor Bank Indonesia Manado, posisi kas

gabungan tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas antara 2 sampai 3 bulan ke depan.

## B. PENEMUAN UANG PALSU

Penemuan uang palsu selama triwulan III 2006 sebanyak 66 lembar atau naik 112,9% dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan jumlah lembarannya, jenis pecahan Rp50.000 merupakan jenis pecahan yang paling banyak dipalsukan yaitu mencapai 50% dari keseluruhan lembar uang palsu yang ditemukan (angka ini naik dibandingkan penemuan uang palsu untuk pecahan Rp50.000 pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 54,76%).

Tabel 4.1.  
 Penemuan Uang Palsu (dalam lembar)

Pecahan	2002	2003	2004	2005				2006		
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
- Rp100.000	3	3	16	16	478	17	18	13	9	10
- Rp50.000	4	9	73	348	80	23	29	18	14	33
- Rp20.000	1	4	6	4	3	2	1	6	8	19
- Rp10.000	-	-	-	2	1	-	1	2	-	2
- Rp5.000	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
- Rp1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>95</b>	<b>370</b>	<b>563</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>66</b>

Berkaitan dengan komitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keaslian uang rupiah, Bank Indonesia Manado secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah. Melalui kegiatan ini diharapkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat perbankan, dunia pendidikan, instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat umum meningkat sehingga mampu membedakan mana uang rupiah asli dan yang dipalsukan. Melalui kontinuitas pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun-tahun mendatang, diharapkan tingkat pemahaman masyarakat Sulawesi Utara mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah akan semakin tinggi. Selain itu, berkaitan dengan proses penanganan hukumnya, Bank Indonesia Manado juga menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum antara lain dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Sulawesi Utara.

## C. PERKEMBANGAN KLIRING LOKAL (TUNAI)

Selama triwulan III 2006, jumlah lembar dan nominal warkat kliring mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Utara (bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya) yang terindikasi dari laju pertumbuhan ekonomi dalam triwulan laporan. Sampai akhir triwulan III 2006,

jumlah nominal warkat kliring tercatat sebesar Rp1.480 miliar atau naik 14,99% dibandingkan triwulan sebelumnya. Demikian pula jumlah warkat yang dikliringkan, meningkat 1,28% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar 94 ribu lembar.

Rata-rata harian nominal kliring penyerahan melalui SOKL selama triwulan laporan tercatat sebesar Rp21,26 miliar atau naik 2,55%, namun rata-rata lembar warkat yang dikliringkan justru turun dari 1,5 ribu lembar menjadi 1,4 ribu lembar per hari. Rata-rata penolakan jumlah bilyet cek dan Bilyet Giro (BG) kosong mencatat penurunan dari 0,43% per hari pada triwulan II 2006 menjadi 0,12% di triwulan III 2006. Demikian pula untuk rata-rata jumlah nominal cek dan BG kosong mencatat penurunan dari 0,5% menjadi 0,27%.

Tabel 4.2.  
Perkembangan Triwulanan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

Keterangan	2005				2006		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>Perputaran Kliring</b>							
- Lembar	79.820	87.487	95.907	104.810	84.463	93.075	94.173
- Nominal (Rp Juta)	1.201.365	1.198.015	1.390.180	1.551.963	1.184.937	1.287.189	1.479.686
<b>Rata-Rata Harian</b>							
- Lembar	1.352	1.413	1.498	1.773	1.361	1.502	1.412
- Nominal (Rp Juta)	20.356	19.350	21.736	26.260	19.129	20.730	21.260
<b>Rata-2 Penolakan Cek &amp; BG Kosong</b>							
- Lembar (%)	0,39	0,47	0,45	0,44	0,40	0,43	0,12
- Nominal (%)	0,52	0,54	0,34	0,54	0,35	0,50	0,27

Tabel 4.3.  
Perkembangan Bulanan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

Wilayah Kliring	Jul-06		Ags-06		Sep-06	
	Lembar	Nominal (Juta)	Lembar	Nominal (Juta)	Lembar	Nominal (Juta)
<b>KBI</b>						
Manado	28.873	412.725	22.920	340.782	23.739	378.242
<b>Non BI</b>						
Bitung	2.271	26.858	2.234	26.549	2.100	28.226
Tahuna	366	6.672	516	8.165	471	7.664
Kotamobagu	563	10.257	628	12.253	634	11.604
Gorontalo	3.481	68.645	3.850	71.647	3.627	69.397
<b>Total</b>	<b>35.554</b>	<b>525.157</b>	<b>30.148</b>	<b>459.396</b>	<b>30.571</b>	<b>495.133</b>

#### D. TRANSAKSI RTGS

Nilai transaksi non tunai melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang tercatat di Bank Indonesia Manado menunjukkan penurunan selama triwulan III 2006 dibanding triwulan sebelumnya. Untuk transaksi *outflow* (keluar) dari Kota Manado, nilai transaksi sampai triwulan III 2006 tercatat sebesar Rp2.340,02 miliar atau turun 74,55% dibandingkan

triwulan sebelumnya. Kota Jakarta merupakan tujuan utama transaksi *outflow* dari Kota Manado yang tercatat sebesar Rp1.234,16 miliar atau 52,74% dari total transaksi *outflow* selama triwulan III 2006, kota berikutnya adalah Denpasar, Surabaya dan Makassar. Dengan memperhatikan kecenderungan transaksi RTGS, kota Manado memiliki ketergantungan dan hubungan yang sangat erat dengan beberapa kota-kota besar tersebut. Keterkaitan tersebut dapat dalam bentuk transaksi perdagangan atau penempatan sementara antar bank atas *idle money*.

Tabel 4.4.  
 Nilai Outflow Transaksi Non Tunai dari Kota Manado (RTGS)

KOTA	Q4-2005	KOTA	Q1-2006	KOTA	Q2-2006	KOTA	Q3-2006
Jakarta	68,65	Jakarta	8.410,62	Jakarta	6.547,69	Jakarta	1.234,16
Denpasar	1,26	Surabaya	23,97	Makasar	30,69	Denpasar	100,03
Surabaya	0,19	Jayapura	20,99	Surabaya	26,58	Surabaya	41,28
Ternate	0,18	Makasar	18,19	Bandung	6,28	Makasar	25,29
Malang	0,17	Malang	8,86	Palu	1,51	Palu	5,82
Lain-lain	132,93	Lain-lain	2.535,36	Lain-lain	2.580,85	Lain-lain	933,43
<b>Nilai (Rp Miliar)</b>	<b>203,38</b>	<b>Nilai (Rp Miliar)</b>	<b>11.017,98</b>	<b>Nilai (Rp Miliar)</b>	<b>9.193,58</b>	<b>Nilai (Rp Miliar)</b>	<b>2.340,02</b>
<b>Volume</b>	<b>149</b>	<b>Volume</b>	<b>6.753</b>	<b>Volume</b>	<b>8.255</b>	<b>Volume</b>	<b>8.734</b>

Transaksi *inflow* (masuk) ke Kota Manado selama triwulan III 2006 naik 14,21% dibandingkan triwulan II 2006 atau sebesar Rp5.230,33 miliar. Aliran transaksi masuk tersebut berasal dari beberapa kota di Indonesia terutama Kota Jakarta, Ternate, Surabaya, Medan dan Semarang. Hal ini antara lain mengindikasikan tingginya ketergantungan Kota Ternate terhadap Kota Manado khususnya terkait dengan aktivitas perdagangan diantara kedua kota tersebut.

Tabel 4.5.  
 Nilai Inflow Transaksi Non Tunai ke Kota Manado (RTGS)

KOTA	Q4-2005	KOTA	Q1-2006	KOTA	Q2-2006	KOTA	Q3-2006
Jakarta	44,74	Jakarta	1.312,99	Jakarta	1.890,22	Jakarta	1.811,67
Ternate	4,00	Ternate	44,74	Ternate	47,94	Ternate	41,52
Surabaya	0,30	Medan	21,77	Kediri	22,02	Surabaya	29,80
Denpasar	0,20	Surabaya	12,64	Medan	19,05	Medan	6,37
Medan	0,12	Makasar	3,93	Surabaya	11,85	Semarang	3,76
Lain-lain	132,93	Lain-lain	2.537,03	Lain-lain	2.588,51	Lain-lain	3.337,22
<b>Nilai (Rp Miliar)</b>	<b>182,29</b>	<b>Nilai (Rp Miliar)</b>	<b>3.933,09</b>	<b>Nilai (Rp Miliar)</b>	<b>4.579,58</b>	<b>Nilai (Rp Miliar)</b>	<b>5.230,33</b>
<b>Volume</b>	<b>108</b>	<b>Volume</b>	<b>3.926</b>	<b>Volume</b>	<b>5.051</b>	<b>Volume</b>	<b>5.851</b>

## **BAB V PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH**

Realisasi keuangan daerah Sulawesi Utara sampai dengan triwulan III 2006 diperkirakan cukup tinggi baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Relatif tingginya realisasi penerimaan daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah) maupun dana perimbangan merupakan cerminan dari kondisi ekonomi Sulawesi Utara yang relatif baik. Sementara itu, tingginya realisasi pengeluaran di samping terkait dengan tingginya realisasi penerimaan juga berhubungan dengan cukup konsisten dan disiplinnya pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan proyek-proyek yang direncanakan sebelumnya. Hal ini dirasakan sangat positif karena dengan demikian, masyarakat Sulawesi Utara semakin dapat merasakan dampak dari pembangunan yang dijalankan selama ini khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana/prasarana umum.

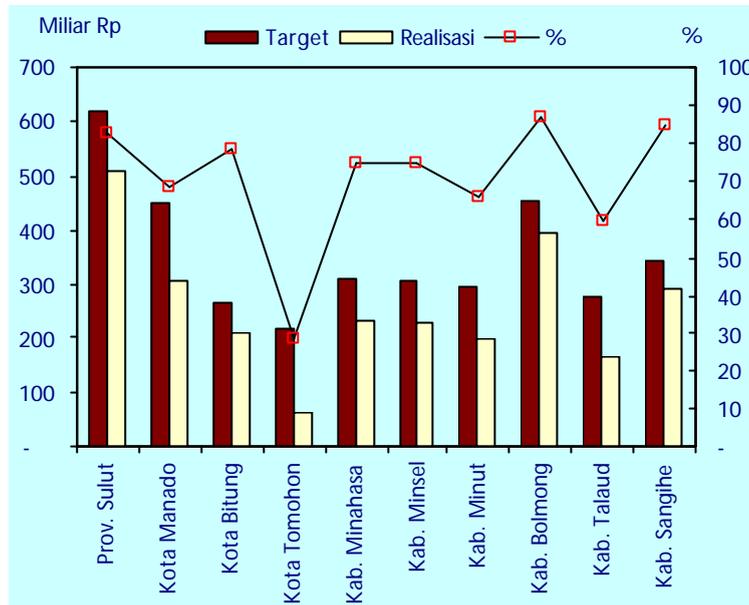
### **A. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH SULAWESI UTARA (KAB/KOTA/PROVINSI)**

Perkembangan keuangan daerah Sulawesi utara mencakup 3 kotamadya, 6 kabupaten dan 1 provinsi yaitu Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Kep. Talaud, Kab. Kep. Tahuna dan Provinsi Sulawesi Utara.

#### **1. Penerimaan Daerah**

Dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan daerah sampai dengan triwulan III 2006 telah mencapai Rp 2.607 miliar atau 73,29% terhadap target awal tahun yang ditetapkan sebesar Rp3.522 miliar (untuk seluruh kab/kota/provinsi). Adapun target penerimaan daerah tertinggi berasal dari Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp617 miliar sedangkan yang terendah adalah Kota Tomohon sebesar Rp221 miliar.

Berdasarkan pencapaiannya, dari seluruh kab/kota/provinsi yang ada, rasio realisasi penerimaan daerah tertinggi sampai dengan akhir triwulan III 2006 diperoleh oleh Kab. Bolaang Mongondow yaitu sebesar 87,01% dari target yang ditetapkan di awal tahun. Sementara itu, Kota Tomohon tercatat sebagai daerah dengan pencapaian penerimaan terendah yaitu baru sebesar 28,26%.

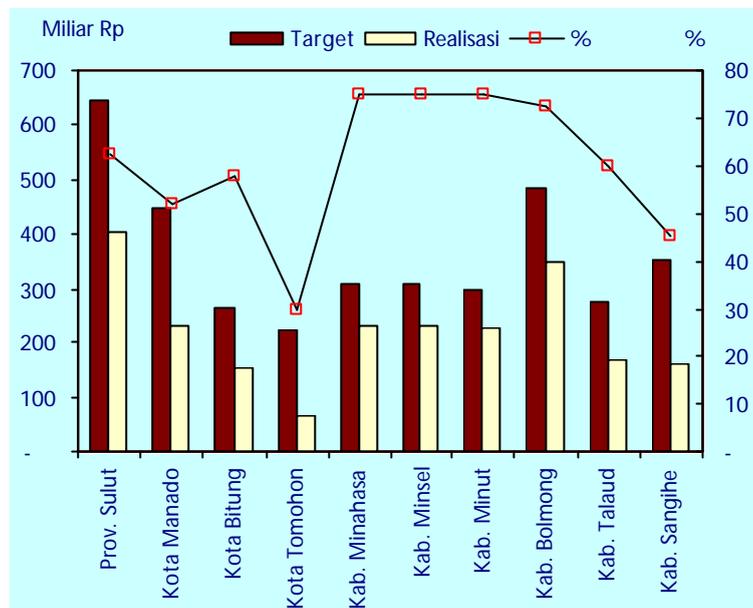


Grafik 5.1.  
Target dan Realisasi Penerimaan Keuangan Daerah  
Kab/Kota/Provinsi di Sulawesi Utara

## 2. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan III 2006 untuk seluruh kab/kota/provinsi di Sulawesi Utara diperkirakan telah mencapai Rp 2.225 miliar atau 61,57% dari target pembelanjaan yang ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar Rp3.615 miliar. Belanja daerah ini meliputi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan batuan keuangan, serta belanja tidak terduga. Tercatat, Provinsi Sulawesi Utara memiliki rencana belanja tertinggi yaitu sebesar Rp664 miliar sedangkan yang terendah adalah Kota Tomohon sebesar Rp221 miliar.

Berdasarkan pencapaiannya, dari seluruh kab/kota/provinsi yang ada, rasio realisasi belanja daerah tertinggi sampai dengan akhir triwulan III 2006 diperoleh oleh Kab. Minahasa dan Kab. Minahasa Selatan yaitu sebesar 75% dari target yang ditetapkan di awal tahun. Sementara itu, Kota Tomohon tercatat sebagai daerah dengan pencapaian penerimaan terendah yaitu baru sebesar 29,91%.



Grafik 5.2.  
 Rencana dan Realisasi Belanja Keuangan  
 Daerah Kab/Kota/Provinsi di Sulawesi Utara

## B. KEUANGAN DAERAH DI TINGKAT PROVINSI

Ketergantungan Provinsi terhadap dana perimbangan pusat seperti dana bagi hasil pajak & bukan pajak, DAU dan DAK masih cukup tinggi. Hal ini terindikasi dari rendahnya rasio kemandirian fiskal dalam APBD provinsi Tahun 2006 (perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan total pengeluaran daerah) yang sampai dengan 30 September 2006 hanya sebesar 28,22%.

Anggaran pendapatan Sulawesi Utara dalam APBD provinsi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di awal tahun 2006 ditetapkan sebesar Rp653,36 miliar (dengan komponen umum terdiri dari pendapatan dan pembiayaan penerimaan daerah), atau meningkat 30,70% dibandingkan Tahun 2005. Sedangkan anggaran belanja ditetapkan sama dengan anggaran pendapatan sebesar Rp653,36 miliar (meliputi komponen belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah), atau meningkat 27,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

### 1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi APBD provinsi Tahun 2006, kemandirian fiskal atau perbandingan PAD provinsi terhadap total pengeluaran sebesar 28,22%. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan sosial sebagian besar digerakkan oleh dana perimbangan pusat (bagi hasil pajak & bukan pajak), dana alokasi umum dan penerimaan lainnya mencapai 71,78%.

Realisasi penerimaan daerah sampai dengan 30 September 2006 mencapai Rp550,52 miliar atau mencapai 84,26% dari target penerimaan awal tahun 2006. Sumbangan terbesar penerimaan berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah diikuti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya penerimaan lain.

Realisasi penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah telah mencapai Rp342,51 miliar atau 79,05% dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp433,30 miliar. Dilihat dari komponen pembentuknya, realisasi penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah terutama ditopang oleh DAU, diikuti penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Selanjutnya, realisasi PAD cukup tinggi yaitu mencapai Rp160,65 miliar atau mencapai 87,13% terhadap target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp184,39 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan terutama berasal dari pajak daerah diikuti penerimaan yang berasal dari bagian laba perusahaan daerah, penerimaan lain-lain dan penerimaan yang berasal dari retribusi. Sedangkan realisasi penerimaan lainnya dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp47,35 miliar.

## **2. Belanja Daerah**

Realisasi belanja daerah provinsi telah mencapai Rp550,52 miliar atau 84,26% dari target anggaran, terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik dan belanja rutin lainnya (belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka, belanja modal dan pembayaran utang pokok jatuh tempo). Namun demikian, tingginya realisasi belanja pemerintah provinsi tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai, kantor dan pemeliharaan. Sedangkan, realisasi belanja modal berjalan lamban yaitu hanya sebesar 31,93% dari rencana belanja daerah awal tahun yang ditetapkan sebesar 31,93%. Belanja pegawai, kantor dan pemeliharaan ditujukan sebagian besar untuk pembayaran gaji karyawan pemda sehingga merupakan pengeluaran yang tidak dapat ditunda-tunda. Sementara itu, belanja modal merupakan pengeluaran non rutin yang ditujukan untuk pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, sehingga pelaksanaannya memerlukan proses administrasi mulai dari lelang, pemilihan pemenang, sampai dengan pelaksanaan barang/jasa. Jika proses pengesahan APBD mengalami keterlambatan, maka pelaksanaan belanja modal akan lebih terlambat lagi.

Sementara itu, proses administrasi pengadaan barang dan jasa (proyek) di atur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan terhadap kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lamanya proses waktu (tercepat) yang harus dilalui dalam rangka pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan tersebut adalah 18 hari kerja, namun berdasarkan pengalaman dari pemda Sulawesi Utara pada kenyataannya prosedur tersebut membutuhkan waktu lebih dari itu. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan relatif rendahnya realisasi barang modal. Sebagai konsekuensi logis dari lambatnya proses administrasi belanja modal, penempatan dana pemerintah di dalam sistem perbankan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sampai dengan September 2006, jumlah dana pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) oleh BPD Sulawesi Utara yang ditempatkan di SBI mencapai jumlah Rp375 miliar meningkat hingga lebih dari 316% dibandingkan posisi tahun 2005 yang baru sebesar Rp90 miliar. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari pemanfaatan dana idle yang ditempatkan ke dalam instrumen investasi tanpa resiko sekaligus menguntungkan.

### **3. Kontribusi Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Sektor Riil dan Uang Beredar**

Realisasi APBD provinsi khususnya realisasi belanja daerah tentunya sedikit banyak telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian. Dengan melakukan identifikasi terhadap pos-pos dalam APBD provinsi ke dalam 2 (dua) kegiatan utama berdasarkan tabel PDRB sisi permintaan, yaitu Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperoleh hasil bahwa realisasi anggaran konsumsi pemerintah memberikan *share* sebesar 3,83% terhadap nilai tambah kegiatan pengeluaran pemerintah dalam PDRB. Sedangkan terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan *share* sebesar 0,15%. Secara total, realisasi anggaran belanja dan modal dalam APBD provinsi hanya memberikan kontribusi sebesar 3,97% terhadap PDRB. Sedangkan secara gabungan, dengan menjumlahkan data keuangan daerah di tingkat kabupaten, kotamadya dan provinsi mampu memberikan kontribusi sebesar 18,81% terhadap PDRB (harga berlaku).

Tabel 5.1.  
 Stimulus Fiskal APBD Provinsi Terhadap Sektor Riil  
 s.d. 30 September 2006

(Dalam Miliar Rp)

Uraian	APBD 2006	Realisasi	
		Nominal	% Thd PDRB*)
<b>a. Konsumsi Pemerintah</b>	<b>590.35</b>	<b>530.40</b>	<b>3.83</b>
1. Belanja adm umum	259.53	171.98	1.24
2. Belanja op & pemeliharaan	165.99	72.82	0.53
3. Belanja rutin lainnya	164.82	285.59	2.06
<b>b. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>63.02</b>	<b>20.12</b>	<b>0.15</b>
Belanja Modal	63.02	20.12	0.15
<b>c. Jumlah I + II</b>	<b>653.36</b>	<b>550.52</b>	<b>3.97</b>

Sumber: Biro Keuangn Provinsi Sulawesi Utara

\*) PDRB Q1 s.d. Q3 Tahun 2006 (Harga Berlaku)

Dampak realisasi APBD provinsi terhadap perkembangan uang beredar sampai berada pada posisi *net balance* yang berarti jumlah penerimaan pemerintah sama dengan pengeluarannya.

Tabel 5.2.  
 Dampak APBD Provinsi Terhadap Uang Beredar  
 s.d. 30 September 2006

(Dalam Miliar Rp)

Uraian	APBD 2006	Realisasi Q3-2006		
		Nominal	% Realisasi	% thd PDRB
<b>A. PENERIMAAN RUPIAH</b>	<b>653.36</b>	<b>550.52</b>	<b>84.26</b>	<b>3.97</b>
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>184.39</i>	<i>160.65</i>	<i>87.13</i>	<i>1.16</i>
1. Pajak Daerah	149.43	119.47	79.95	0.86
2. Retrebusi	9.96	4.79	48.05	0.03
3. Bagian Laba Persh. Daerah	16.50	24.91	150.94	0.18
4. Lain-lain	8.50	11.49	135.21	0.08
<i>Dana Perimbangan</i>	<i>433.30</i>	<i>342.51</i>	<i>79.05</i>	<i>2.47</i>
1. Bagi Hsl. Pajak dan Bkn Pajak	28.98	5.57	19.23	0.04
2. Dana Alokasi Umum	404.32	336.94	83.33	2.43
3. Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	-	0.00
<i>Penerimaan Lainnya</i>	<i>35.67</i>	<i>47.36</i>	<i>132.77</i>	<i>0.34</i>
<b>B. PENGELUARAN RUPIAH</b>	<b>653.36</b>	<b>550.52</b>	<b>84.26</b>	<b>3.97</b>
<i>Konsumsi</i>	<i>590.35</i>	<i>530.40</i>	<i>89.84</i>	<i>3.83</i>
1. Belanja Adm Umum	259.53	171.98	66.27	1.24
2. Belanja Op & Pemeliharaan	165.99	72.82	43.87	0.53
3. Belanja Rutin Lainnya	164.82	285.59	173.27	2.06
<i>Modal</i>	<i>63.02</i>	<i>20.12</i>	<i>31.93</i>	<i>0.15</i>
Belanja Modal	63.02	20.12	31.93	0.15
<b>C. Dampak Rupiah</b>				

Sumber: Biro Keuangn Provinsi Sulawesi Utara

\*) PDRB Q1 s.d. Q3 Tahun 2006 (Harga Berlaku)

### **C. IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Belum optimalnya realisasi belanja modal akibat kecenderungan terjadinya penundaan realisasi belanja modal oleh pemerintah kab/kota/provinsi Sulawesi Utara akan membawa implikasi terhadap perekonomian sebagai berikut :

- ✍ Penundaan pelaksanaan proyek pemerintah memiliki *effect* khususnya terhadap kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan proyek pemerintah atau dengan kata lain penundaan proyek pemerintah sama halnya dengan penundaan penerimaan manfaat atau tujuan dari proyek itu sendiri. Selain itu berbagai proyek swasta yang menyumbang sekitar 80% terhadap total pembiayaan investasi daerah juga akan terkena dampak penundaan proyek pemerintah.
- ✍ Dalam kaitan dengan kestabilan harga di daerah, pola pengeluaran anggaran belanja modal yang cenderung ke akhir tahun dan ditambah lagi pola musiman seperti hari keagamaan dan tahun baru akan memicu kenaikan harga atau inflasi di akhir tahun.

### **BOX 3 : MEKANISME PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA (PROYEK)**

Proses administrasi pengadaan barang dan jasa (proyek) di atur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan terhadap kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ringkasan dari proses yang harus dilalui dalam rangka pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman lelang (minimal 1 hk di surat kabar dan 7 hk di internet)
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen (mulai 1 hk setelah pengumuman)
3. Penejelasan pengadaan barang dan jasa (4 hk setelah tanggal pengumuman)
4. Pemasukan penawaran (minimal 2 hk setelah penawaran)
5. Pembukaan dokumen penawaran (hari kerja terakhir pemasukan dokumen)
6. Evaluasi dokumen penawaran (maksimal 7 hk setelah pembukaan penawaran harga)
7. Penilaian dan pembuktian kualifikasi
8. Usulan calon pemenang (maksimal 7 hk setelah pembukaan penawaran harga)
9. Penetapan pemenang
10. Pengumuman pemenang (maksimal 2 hk setelah penetapan)
11. Masa sanggah (maksimal 5 hk setelah pengumuman)
12. Penunjukkan pemenang (surat perintah pengadaan barang dan jasa) (maksimal 6 hk setelah pengumuman)
13. Penandatanganan kontrak (maksimal 14 hk setelah surat perintah pengadaan barang dan jasa)

Meskipun waktu tercepat untuk memenuhi keseluruhan prosedur tersebut adalah 18 hari kerja, namun berdasarkan pengalaman dari pemda Sulawesi Utara pada kenyataannya prosedur tersebut membutuhkan waktu lebih dari itu. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan relatif rendahnya realisasi barang modal. Sebagai konsekuensi logis dari lambatnya proses administrasi belanja modal, penempatan dana pemerintah di dalam sistem perbankan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

## **BAB VI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Meskipun Indeks Kondisi Ekonomi saat ini membaik karena meningkatnya penghasilan saat ini ternyata hal itu tidak dialami oleh para pencari kerja. Meningkatnya jumlah pengangguran di Sulawesi Utara disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menyerap seluruh jumlah pencari kerja yang ada. Selain itu masih relatif terbatasnya perusahaan yang bersifat padat karya menyebabkan relatif terbatasnya lapangan kerja yang ada.

### **A. PENGANGGURAN**

Perkembangan angkatan kerja di Sulawesi Utara sampai dengan Semester I Tahun 2006 cenderung tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja Sulawesi Utara tercatat 1.014 ribu orang atau meningkat 1,56% dibandingkan Tahun 2005 yang berjumlah 998 ribu orang. Dari jumlah 1.014 ribu orang tersebut, sebesar 83,14% atau sebanyak 843 ribu berstatus pekerja sedangkan sisanya berstatus pencari kerja. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pekerja ini turun sebesar 1,35% sehingga sudah selayaknya perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pemerintah daerah apakah hal ini disebabkan terdapatnya pemutusan hubungan kerja di Sulawesi Utara atau justru banyak pekerja yang pindah dan mengadu nasib di tempat lain di luar wilayah Sulawesi Utara.

Sementara itu, rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama semester I Tahun 2006 tercatat sebesar 63,01% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 62,33%. Meningkatnya rasio TPAK ini lebih disebabkan oleh penambahan jumlah angkatan kerja (khususnya jumlah pencari kerja) yang lebih *significant* dibandingkan penambahan jumlah penduduk pada usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja ternyata belum mampu seluruhnya diserap oleh lapangan kerja yang tersedia di Sulawesi Utara. Hal ini seiring pula dengan kecenderungan meningkatnya rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama semester I yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 14,40% naik menjadi 16,86%. Adapun sektor/lapangan usaha yang banyak digeluti di Sulawesi Utara dan menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor pertanian, perdagangan dan jasa.

Tabel 6.1.  
 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara  
 s.d. Semester I Tahun 2006

	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)
Penduduk 15 Thn ke atas	1,649,488	1,699,411	1,738,256	1,756,509	1,601,686	1,609,197
Bukan Angkatan Kerja	841,534	795,518	739,641	782,357	603,288	595,163
Angkatan Kerja	807,954	903,893	998,615	974,152	998,398	1,014,034
Mencari Kerja	72,232	94,635	139,076	176,805	143,752	170,996
Bekerja	735,722	809,258	859,539	797,347	854,646	843,038
TPAK	48.98	53.19	57.45	55.46	62.33	63.01
TPT	8.94	10.47	13.93	18.15	14.40	16.86

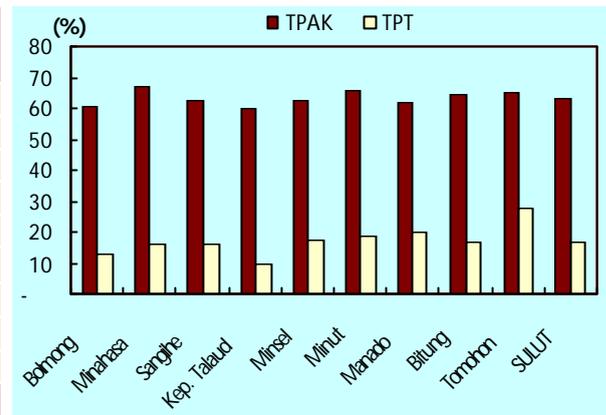
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah

Berdasarkan persebarannya, jumlah angkatan kerja tertinggi di Sulawesi Utara terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sebanyak 199.676 orang, diikuti oleh Kota Manado (197.415 orang) dan Kabupaten Minahasa (153.452 orang). Demikian pula dengan jumlah pekerjanya, Kabupaten Bolmong tercatat memiliki jumlah pekerja terbanyak sebesar 174.472 orang diikuti Kota Manado (158.160 orang) dan Kabupaten Minahasa (128.752 orang). Namun demikian, walaupun berdasarkan jumlah angkatan kerja dan pekerjanya Kabupaten Bolmong memiliki jumlah terbanyak, berdasarkan rasio TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kabupaten Bolmong justru berada di urutan ke 2 (dua) terendah dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan rasio 60,43% (lihat tabel 1.14). Rasio TPAK adalah perbandingan jumlah angkatan kerja di suatu wilayah terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas di wilayah tersebut.

Sementara itu, jumlah pengangguran tertinggi di wilayah Sulawesi Utara terdapat di Kota Manado sebanyak 39.255 orang, disusul Kabupaten Bolmong (25.204 orang) dan Kabupaten Minahasa (24.700 orang). Sedangkan jumlah pengangguran terendah terdapat di Kabupaten Kep. Talaud sebanyak 3.434 orang. Namun demikian, rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat di Kota Tomohon sebesar 27,59% diikuti Kota Manado (19,88%) dan Kabupaten Minahasa Utara (18,57%). Adapun wilayah yang memiliki rasio TPT yang terendah adalah Kabupaten Kep. Talaud. Hal ini berarti kemampuan penyerapan tenaga kerja Kabupaten Kep. Talaud lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Utara. Rasio TPT adalah perbandingan jumlah pengangguran di suatu wilayah terhadap jumlah angkatan kerjanya.

Kabupaten/Kota	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
Bolmong	174,472	25,204	199,676
Minahasa	128,752	24,700	153,452
Sangihe	79,156	15,116	94,272
Kep. Talaud	32,062	3,434	35,496
Minahasa Selatan	107,814	23,211	131,025
Minahasa Utara	67,841	15,467	83,308
Manado	158,160	39,255	197,415
Bitung	64,396	13,030	77,426
Tomohon	30,385	11,579	41,964
<b>SULUT</b>	<b>843,038</b>	<b>170,996</b>	<b>1,014,034</b>

Tabel 6.2  
 Angkatan Kerja di Tiap-Tiap Kabupaten/Kota  
 Semester I Tahun 2006



Grafik 6.1  
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan  
 Tingkat Pengangguran Terbuka

## B. KEMISKINAN

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, s.d. Mei 2006 jumlah penduduk Sulawesi Utara berjumlah 2,18 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 192.685 jiwa atau 9,08% didapat digolongkan penduduk miskin. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2006 sebagai imbas kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun tajam.

Dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, angka kemiskinan di Sulawesi Utara masih lebih baik dimana pada Juli 2005 angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 15,97% dan meningkat tajam pada Mei 2006 yang tercatat sebesar 17,75%. Kenaikan angka kemiskinan tersebut merupakan imbas dari kenaikan harga BBM yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Maret dan Oktober 2005.

Namun, angka kemiskinan yang disebutkan di atas merupakan angka gabungan (total) yang untuk perinciannya (hingga kab/kota) belum dapat kami tampilkan. Penyajian angka kemiskinan secara detail baru dapat ditampilkan hingga akhir tahun 2004. Berdasarkan wilayah administrasinya, hingga akhir tahun 2004, jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Minahasa sebanyak 45.960 jiwa (23,92%) dari total penduduk miskin di Sulawesi Utara. Selanjutnya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 45.400 jiwa (23,63%), Kabupaten Minahasa Selatan (13,96%), Kabupaten Sangihe (12,93%) dan kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Utara (Tabel 6.3).

Tabel 6.3  
 Persebaran Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Kab. Bolaang Mongondow	55,500	51,907	65,300	50,400	45,400
2	Kab. Minahasa	43,271	57,765	93,327	41,400	45,960
3	Kab. Sangihe	60,509	41,490	37,527	25,500	24,850
4	Kab. Talaud	-	-	-	11,200	10,860
5	Kab. Minahasa Selatan	-	-	-	25,100	26,820
6	Kota Manado	15,787	14,868	19,771	17,500	17,250
7	Kota Bitung	2,246	7,734	13,340	14,700	14,670
8	Kota Tomohon	-	-	-	5,900	6,350
	<b>Total</b>	<b>177,313</b>	<b>173,764</b>	<b>229,265</b>	<b>191,700</b>	<b>192,160</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah

No.	Kab/Kota	Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara				
		2000	2001	2002	2003	2004
1.	Kab. Bolaang Mongondow	431,725	437,089	442,415	458,008	470,540
2.	Kab. Minahasa Induk					297,966
3.	Kab. Minahasa Utara					169,853
4.	Kab. Minahasa Selatan					294,776
5	Kota Tomohon					83,751
6.	Kab. Sangihe	261,948	262,090	262,060	269,644	194,605
7.	Kab. Talaud					79,356
8.	Kota Manado	377,949	382,834	388,435	410,870	422,355
9.	Kota Bitung	141,297	144,885	149,385	161,421	169,776
	<b>Total</b>	<b>2,000,871</b>	<b>2,022,249</b>	<b>2,044,071</b>	<b>2,127,820</b>	<b>2,182,978</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah

## BAB VII OUTLOOK KONDISI EKONOMI

### A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan IV 2006 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan triwulan ini dengan laju pertumbuhan sebesar 5,99%-6,49%. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada seluruh jenis pengeluaran, yaitu konsumsi, investasi, ekspor dan impor. Khusus untuk investasi, peningkatan didukung oleh meningkatnya investasi pemerintah yang diperkirakan akan melonjak seiring dengan akan berakhirnya tahun anggaran. Dengan perkiraan laju pertumbuhan pada triwulan IV tersebut, maka secara keseluruhan sepanjang tahun 2006, perekonomian Sulawesi Utara diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,53%-6,03%.

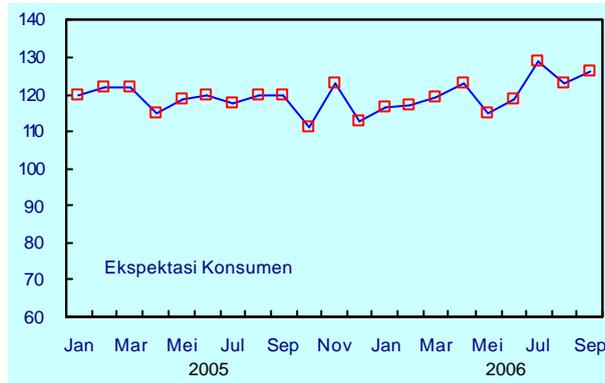
Tabel 7.1.  
Perkiraan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Pengeluaran\*

	2004	2005	2006					2006 p	
			Q1	Q2	Q3	Q4 p		Min	Maks
						Min	Maks		
<b>KONSUMSI</b>	3.56	4.76	10.78	9.11	12.32	4.38	4.88	8.65	9.15
<b>INVESTASI</b>	6.74	13.11	5.86	6.03	7.04	1.33	1.83	4.72	5.22
<b>EKSPOR</b>	41.56	0.85	6.05	54.29	54.40	25.71	26.21	36.72	37.22
<b>IMPOR</b>	55.46	2.81	32.01	82.05	77.35	20.55	21.05	54.28	54.78
<b>PDRB</b>	<b>4.26</b>	<b>4.90</b>	<b>4.96</b>	<b>5.72</b>	<b>6.04</b>	<b>5.99</b>	<b>6.49</b>	<b>5.53</b>	<b>6.03</b>

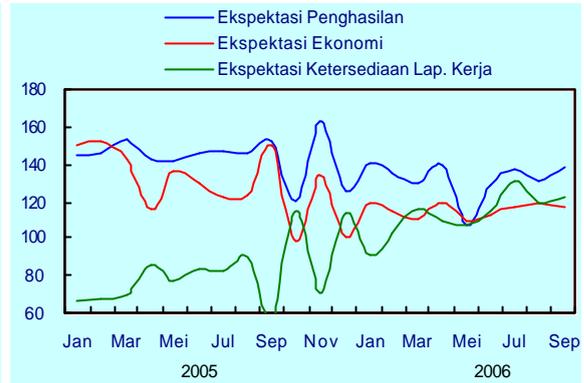
\*) Peramalan menggunakan metode Winter's Method

#### 1. Sisi Permintaan

Berdasarkan permintaan, konsumsi pada triwulan IV 2006 diperkirakan meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 4,38%-4,88%. Peningkatan konsumsi terjadi karena meningkatnya permintaan menjelang dan pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan yaitu lebaran dan natal. Selain itu persiapan masyarakat Sulawesi Utara dalam menghadapi perayaan pergantian tahun diperkirakan juga akan meningkatkan kegiatan konsumsi di triwulan mendatang. Pertumbuhan ini dikonfirmasi oleh indeks ekspektasi konsumen yang menunjukkan bahwa pada triwulan IV 2006 terjadi peningkatan baik untuk kondisi ekonomi maupun kondisi lapangan kerja.



Grafik 7.1.  
Indeks Ekspektasi Konsumen



Grafik 7.2.  
Komponen Indeks Ekspektasi Konsumen

*Investasi pada triwulan IV 2006 diperkirakan akan tumbuh positif walaupun pada level yang masih terbatas yaitu sebesar 1,33%-1,83%. Peningkatan ini diperkirakan akan terjadi dengan mulai terserap secara optimalnya investasi pemerintah daerah yang seharusnya diluncurkan pada triwulan-triwulan sebelumnya namun tertunda hingga triwulan IV. Investasi swasta diperkirakan juga akan tumbuh positif. Hal ini antara lain terlihat dari terus maraknya pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di Kota Manado. Hal ini didukung pula oleh pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa lokasi di Sulawesi Utara.*

*Ekspor pada triwulan triwulan IV 2006 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan laju pertumbuhan sebesar 25,71-26,21%. Pemberlakuan peraturan pemerintah mengenai penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk primer diperkirakan akan berdampak pada peningkatan ekspor komoditas pertanian di Sulawesi Utara khususnya produk ikan-ikanan (fish, crustaceans, moluses), perkebunan (kopi, teh, dan rempah-rempah lainnya) dan kayu (wood and articles of wood). Namun peningkatan tersebut diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh yang significant terhadap total ekspor mengingat proporsi ekspor pertanian terhadap total ekspor per tahun rata-rata hanya sebesar 7-8%.*

Sementara itu, impor pada triwulan IV 2006 diperkirakan juga akan tumbuh positif dengan laju pertumbuhan sebesar 20,55% s.d. 21,05%. Komposisinya diperkirakan tidak akan mengalami perubahan dimana hampir sebagian besar (99%) impor Sulawesi Utara merupakan jenis barang modal sehingga tentunya diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara umum.

## 2. Sisi Penawaran

Sementara itu dari sisi sektoral diperkirakan akan terjadi pertumbuhan pada hampir semua sektor selama triwulan IV 2006. Sektor pertanian diperkirakan mengalami pertumbuhan antara 5,91%-6,41% seiring meningkatnya produksi dan areal pertanian di Sulawesi Utara. Sementara itu sektor bangunan diperkirakan akan tumbuh antara 4,92% - 5,42%. Hal ini antara lain tercermin dari terus maraknya pembangunan properti di Sulawesi Utara (pusat perbelanjaan/ mal, ruko, hotel, dan pemukiman). Pembangunan perumahan untuk pemukiman antara lain terlihat di wilayah Paniki, Mapanget, Perkamil dan Kairagi.

Tabel 7.2.  
Perkiraan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Sektor Ekonomi\*

	2004	2005	2006				2006 p		
			Q1	Q2	Q3	Q4 p		Min	Maks
						Min	Maks		
Pertanian	6.61	6.15	7.12	6.66	5.86	5.91	6.41	6.17	6.67
Pertambangan dan..	-3.59	-0.72	5.88	6.46	7.23	10.96	11.46	7.63	8.13
Industri Pengolahan	-3.94	2.23	3.98	4.92	5.78	4.15	4.65	4.53	5.03
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.39	13.82	4.73	4.94	5.80	4.62	5.12	4.84	5.34
Bangunan	6.08	5.06	5.86	6.03	7.04	4.92	5.42	5.76	6.26
Perdagangan, Hotel ...	6.37	7.41	4.65	5.84	6.63	7.07	7.57	6.01	6.51
Pengangkutan dan Kom.	6.84	5.83	4.75	5.11	7.12	5.70	6.20	5.48	5.98
Keu, Persewaan dan Jasa...	5.39	5.64	4.17	5.35	6.12	8.88	9.38	6.04	6.54
Jasa-Jasa	2.79	2.79	2.41	4.83	3.83	4.33	4.83	3.69	4.19
PDRB	4.26	4.90	4.96	5.72	6.04	5.99	6.49	5.53	6.03

\*) Peramalan menggunakan metode Winter's Method

Sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan meningkat sebesar 7,07% - 7,57%. Perkembangan sektor ini terutama berkenaan dengan masa liburan akhir tahun yang diperkirakan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga menggairahkan sub sektor perhotelan dan restoran. Di samping itu, maraknya perdagangan tekstil bekas dari Philipina (atau yang lebih dikenal dengan istilah "Cabo") di pasar-pasar tradisional Kota Manado diperkirakan akan lebih menggairahkan perkembangan sub sektor perdagangan. Namun, perdagangan otomotif dalam negeri diperkirakan akan masih lesu sesuai dengan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan akan tumbuh positif yaitu berkisar antara 5,70% - 6,20%. Perkembangan sub sektor pengangkutan antara lain ditandai dengan meningkatnya aktifitas dan frekuensi armada angkutan baik darat, udara dan laut guna mendukung mobilitas pemudik dan wisatawan saat berlangsungnya libur lebaran, natal dan tahun baru. Sementara itu peningkatan sub sektor komunikasi antara lain ditandai

dengan terus berlangsungnya pembangunan menara BTS (Base Tranceiver System) oleh provider telekomunikasi yang ada di Sulawesi Utara hingga mampu memberikan kenyamanan pelanggan dalam berkomunikasi khususnya di daerah-daerah yang selama ini terisolir. Pembangunan BTS tersebut antara lain terdapat di wilayah Talawia (Siau Timur), Kembes (Tombulu), Duloduo (Dumoga), Bejo Belopa (Bajo) dan Larompong.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan tumbuh antara 10,96%-11,46%. Sejak tidak lagi beroperasi PT. Newmount Minahasa Raya (perusahaan tambang emas) praktis kegiatan pertambangan di Sulawesi Utara lebih banyak dilakukan oleh penambangan rakyat. Sementara itu, perkembangan sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh antara 4,15%-4,65%. Kontribusi pertumbuhan di sektor ini terutama berasal dari industri pengolah ikan maupun kayu walaupun pada besaran yang terbatas.

Sektor listrik, gas, dan air bersih diperkirakan meningkat sebesar 4,62%-5,12%. Keterbatasan pasokan listrik oleh PLN Sulawesi Utara beberapa waktu belakangan ini diharapkan akan segera teratasi dengan mulai dijakinya rencana pembangunan pembangkit listrik baru antara lain PLTP Lahendong II berkapasitas 20 MW dan PLTP Lahendong III (kapasitas 20 MW) yang segera dibangun pada tahun 2007-2008.

Tabel 7.3  
 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik di Sulawesi Utara

NO.	Nama	Kapasitas (MW)	Tahun Pembangunan
1.	PLTP Lahendong II	20 MW	2007
2.	PLTP Lahendong III	20 MW	2008
3.	Fuel Cell Tahap I	50 MW	2008
4.	PLTM Mobuya	3 MW	2008
5.	PLTA Poigar II	50 MW	2009
6.	Fuelcell Tahap II	50 MW	2009
7.	Solar Cell	1 MW	2009
8.	PLTU Amurang	110 MW	2010
9.	PLTP Lahendong IV	20 MW	2010

Sektor keuangan diperkirakan akan mengalami peningkatan sesuai dengan kebijakan Moneter yang terus menurunkan BI Rate. Sedangkan sektor jasa diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya berkenaan dengan meningkatnya aktivitas pengeloan jasa khususnya jasa hiburan dan rekreasi di samping jasa pemerintahan dan administrasi berkenaan dengan meningkatnya realisasi pengeluaran keuangan daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran.

### **Implikasi Kebijakan**

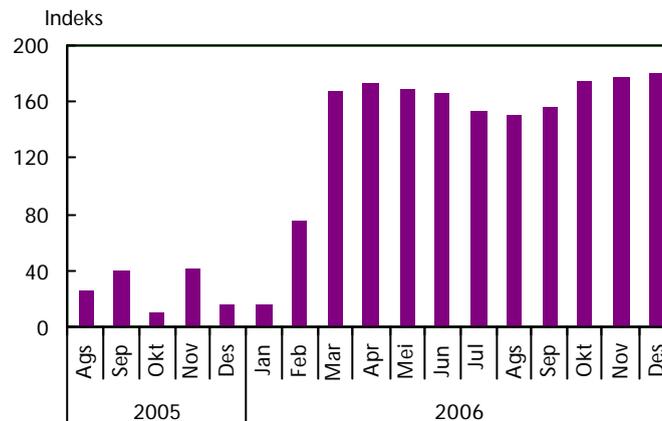
Kondisi perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan IV 2006 diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan kondisi triwulan III 2006 dengan lokomotif pertumbuhan adalah kegiatan konsumsi baik konsumsi swasta (rumah tangga) maupun pemerintah. Meningkatnya permintaan masyarakat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan yaitu Lebaran dan Natal serta perayaan pergantian tahun, selain memberikan tekanan terhadap harga bahan makanan, makanan jadi dan sandang juga di sisi lain akan mendongkrak laju pertumbuhan Sulawesi Utara secara umum. Namun, kegiatan investasi sebagai pendorong perekonomian diperkirakan belum optimal khususnya investasi asing.

Sementara itu, tertundanya beberapa proyek pemerintah daerah yang seharusnya dilakukan pada triwulan I, II dan III menyebabkan proses pekerjaan sejak pelelangan hingga penyelesaian dilakukan secara terburu-buru sehingga kurang memberikan hasil yang optimal. Di sisi lain, tertundanya proyek-proyek tersebut menyebabkan menumpuknya permintaan barang modal pada suatu periode sehingga memberikan tekanan terhadap harga khususnya harga bahan bangunan. Bagi sektor swasta, tertundanya proyek pemerintah juga memberikan disinsentif untuk memulai suatu investasi karena memberikan ekspektasi ketidakpastian mengenai kondisi perekonomian.

### **B. INFLASI**

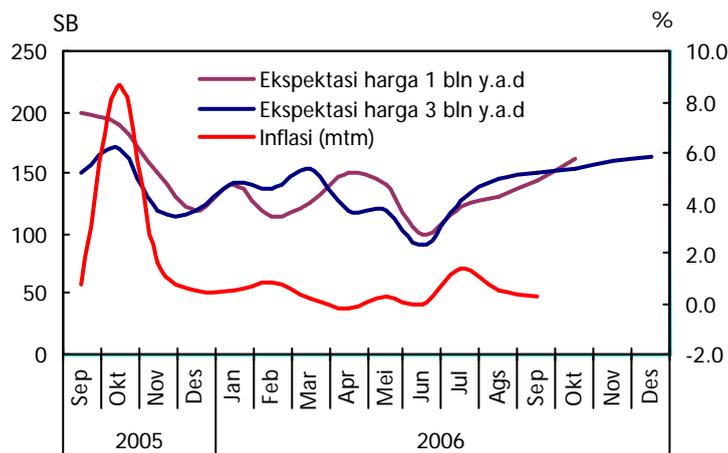
Inflasi regional kota Manado pada triwulan IV 2006 diperkirakan masih cukup rendah walaupun akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2006. Dengan memperhatikan besaran inflasi selama tahun 2006 (hingga september 2006) serta perkiraan tekanan inflasi pada triwulan mendatang maka diperkirakan laju inflasi kumulatif regional sampai akhir tahun 2006 akan berada dibawah 6%.

Tekanan inflasi triwulan IV 2006 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan III 2006 dan merupakan inflasi triwulanan tertinggi sepanjang tahun 2006. Faktor pendorong inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan berasal dari faktor musiman yaitu berlangsungnya perayaan hari-hari besar keagamaan Idul Fitri, Natal dan tahun baru yang biasanya mendorong masyarakat untuk lebih konsumtif.



Grafik 7.3.  
Perkembangan Harga Berdasarkan Survei Konsumen

Perkiraan inflasi tersebut sejalan dengan hasil beberapa survei yang dilaksanakan KBI Manado, yaitu SK dan SPE. Sebagian besar responden SK yang disurvei pada bulan Juli-September 2006 memperkirakan bahwa masih akan terjadi kenaikan harga barang/jasa pada triwulan IV 2006 (Grafik 7.3). Hal ini tercermin dari nilai indeks persepsi responden mengenai perkembangan harga untuk periode Oktober-Desember 2006 yang bergerak meningkat dari 156,5 pada akhir September 2006 menjadi 180 pada akhir Desember 2006. Berdasarkan hal tersebut, responden memperkirakan akan terjadi kenaikan harga pada triwulan IV 2006.



Grafik 7.4.  
Perkembangan Harga Berdasarkan Survei Penjualan Eceran dan Inflasi Bulanan Aktual di Sulawesi Utara

Seperti halnya SK, SPE juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Hasil SPE menunjukkan bahwa mayoritas responden memperkirakan harga barang/jasa secara umum

pada bulan Oktober-Desember 2006 akan bergerak naik (Indeks memiliki kecenderungan meningkat) dari 150 di akhir September 2006 menjadi 164 pada akhir Desember 2006.

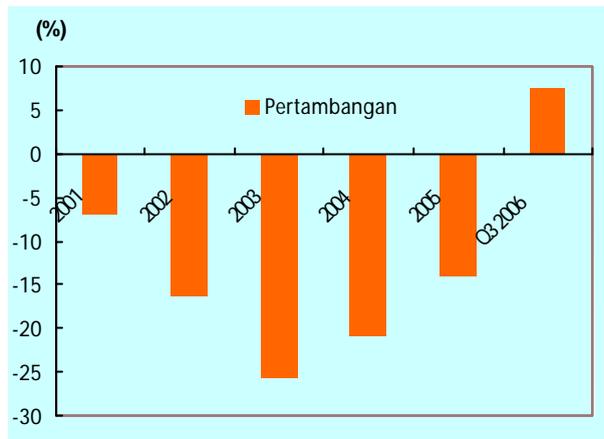
## TOPICAL ISSUE 1 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN TAMBANG MINERAL DI SULAWESI UTARA

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan percepatan produksi 11 perusahaan di 10 lokasi tambang mineral baru mulai tahun 2007. Pertambangan yang membutuhkan investasi sampai sekitar USD 3 miliar itu hingga saat ini masih terkendala, terutama perizinan kehutanan. Dari 11 perusahaan tambang baru tersebut, 2 perusahaan diantaranya berlokasi proyek di Sulawesi Utara yaitu PT. Meares Soputan Mining dengan nilai investasi USD 29,03juta dan PT. Tambang Tondano Nusajaya dengan nilai investasi USD 11,19 juta. Kedua lokasi tambang tersebut mengandung cadangan emas, tembaga, dan perak.

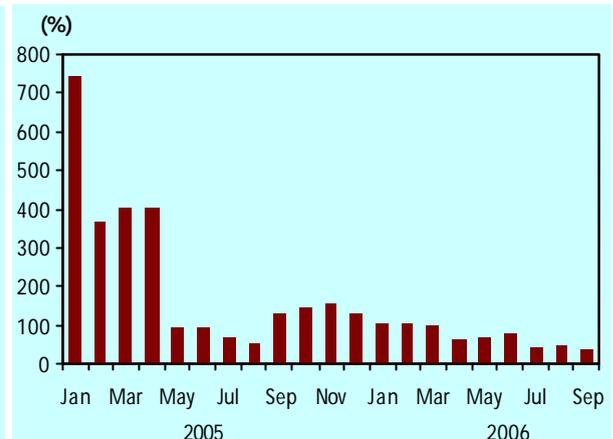
Rencana Investasi Pertambangan Nasional

No.	Perusahaan	Lokasi	Nilai Investasi (dalam dollar AS)
1	PT. Meares Soputan Mining	Sulawesi Utara	29,03 Juta
2	PT. Tambang Tondano Nusajaya	Sulawesi Utara	11,19 Juta
3	PT. Dairi Prima Mineral	Sumatera Utara	94,77 Juta
4	PT. Natarang Mining	Lampung	22,60 Juta
5	PT. Newmount Horas Nauli	Sumatera Utara	38,47 Juta
6	PT. Newmount Nusa Tenggara	Sumbawa	Rencana : 125 juta
			Realisasi : 15 Juta
7	Weda Bay	Maluku Utara	20,1 Juta
8	PT. Inco	Sulawesi Tengah	0,2 miliar
9	PT. Ensbury Kalteng Mining	Kalteng	2,15 Juta
10	PT. Mindoro Tiris Emas	Sumatera Selatan	3,10 Juta
11	PT. BHP -Lahai Coal	Kaltim/Kalteng	39,00 Juta

Selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2001-2005), perkembangan sub sektor pertambangan di Sulawesi Utara terus mengalami kontraksi. Tercatat pada Tahun 2005, sub sektor ini mengalami kontraksi sebesar 14,02%. Hal ini sebagai dampak ditutupnya PT. Newmount Minahasa Raya (tambang emas) sehingga jenis kegiatan pertambangan yang tetap ada hanyalah pertambangan rakyat. Serupa dengan itu, dari sisi pembiayaan, pertumbuhan kredit di sektor pertambangan terus menurun dari waktu ke waktu. Bila pada awal tahun 2004 (Bulan Januari) sempat tumbuh sebesar 745% (y.o.y) namun pada akhir September 2006 laju pertumbuhan kredit sektor pertambangan hanya sebesar 36% dengan nilai baki debit sebesar Rp6,09 miliar.



Grafik 8.1  
 Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan Sulawesi Utara



Grafik 8.2  
 Pertumbuhan Kredit di Sektor Pertambangan

Diketemukannya lokasi pertambangan baru tentunya sangat menggembirakan bagi masyarakat dan pemerintah daerah Sulawesi Utara karena diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu menggerakkan perekonomian Sulawesi Utara. Namun demikian perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut ternyata tak kunjung beroperasi. Kendala yang ada saat ini adalah belum adanya kesepahaman antar departemen terkait. Kedua perusahaan tersebut sebenarnya sudah lama mendapatkan izin pertambangan, namun mereka mendapat kesulitan ketika mengurus pemakaian area hutan. Diakui memang pembukaan tambang akan mengakibatkan perusakan hutan. Akan tetapi untuk tambang mineral, areal hutan yang dibuka jauh lebih sedikit karena penambangannya terletak di bawah tanah dan bukan penambangan terbuka seperti batu bara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah izin pinjam pakai kawasan hutan maupun izin pertambangan di hutan lindung menjadi salah satu masalah yang membayangi investasi di sektor pertambangan di Sulawesi Utara.

#### **Rekomendasi bagi pemerintah daerah Sulawesi Utara :**

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Kehutanan, diharapkan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan terhambatnya realisasi pelaksanaan proyek pertambangan agar investor tambang mendapatkan kepastian. Ijin pertambangan yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi ternyata terkendala oleh ijin pemakaian area hutan dari Dinas Kehutanan. Dengan demikian, pertemuan bersama antar kedua instansi tersebut (dengan diprakarsai oleh pemerintah provinsi) diharapkan mampu menyamakan persepsi yang ada. Sehingga pelaksanaan proyek pertambangan

dapat segera berjalan namun tetap memenuhi prinsip-prinsip kelestarian hutan dan habitatnya. Semuanya itu bertujuan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

## LAMPIRAN 1

INDIKATOR	2005			2006		
	Q.1	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>Laju Inflasi Tahunan Kota Manado (y o y)</b>						
Total	7,82	8,61	18,73	16,08	15,98	15,15
Bahan makanan (y o y)	10,54	13,28	20,74	23,25	22,43	23,31
Makanan jadi (y o y)	3,19	6,20	8,67	8,12	7,25	5,28
Perumahan (y o y)	5,03	2,57	15,98	9,18	11,25	9,95
Sandang (y o y)	3,49	2,23	7,53	8,82	10,15	8,55
Kesehatan (y o y)	0,70	3,17	6,71	6,75	3,67	3,74
y)	8,50	17,63	10,39	11,08	11,02	3,64
Transport dan komunikasi (y o y)	18,69	14,59	49,33	30,72	30,31	30,47
<b>PDRB Nominal adhk (dalam Juta Tahun Dasar 2000)</b>						
Sisi Penggunaan/Permintaan (TOTAL)	2.863.688	3.147.824	3.623.191	3.011.594	3.282.082	3.337.899
Konsumsi Total	2.062.914	2.286.637	2.834.621	2.285.256	2.414.489	2.568.242
Konsumsi Rumah Tangga	1.265.646	1.406.352	1.873.854	1.478.591	1.555.203	1.659.548
Konsumsi Swasta	82.343	101.829	111.267	83.091	106.637	107.195
Konsumsi Pemerintah & Nirlaba	714.924	778.456	849.500	723.575	752.649	801.498
Investasi Total	467.051	666.945	697.337	566.664	681.157	744.060
PMTB	422.009	650.177	682.400	446.739	587.988	695.949
Perubahan Stok	45.042	16.768	14.936	119.925	93.168	48.111
Ekspor	1.104.440	1.389.568	1.257.800	1.177.088	2.132.384	2.145.527
Antar Negara	786.891	1.004.042	742.991	557.430	1.470.261	1.470.267
Antar Propinsi	317.549	385.526	514.809	619.658	662.124	675.260
Impor	770.717	1.195.327	1.166.567	1.017.414	1.945.948	2.119.930
Antar Negara	2.860	19.995	16.396	71.894	502.637	507.646
Antar Propinsi	767.858	1.175.332	1.150.171	945.520	1.443.311	1.612.283
Sisi Sektoral / Penawaran		3.147.824	3.623.191	3.011.594	3.282.082	3.337.899
1. Pertanian	609.596	717.142	748.670	656.545	745.768	759.169
2. Pertambangan dan Penggalian	147.240	165.070	188.667	154.499	174.220	177.001
3. Industri Pengolahan	232.729	249.666	259.888	241.992	245.980	264.096
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	23.274	24.056	25.938	24.357	24.794	25.452
5. Konstruksi/Bangunan	448.195	508.214	561.226	474.459	493.455	543.992
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	367.927	438.463	580.969	386.230	463.331	467.526
7. Angkutan dan Komunikasi	343.688	319.962	478.515	359.377	370.297	342.754
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Per	195.862	213.750	227.418	203.469	218.289	226.833
9. Jasa-jasa Lainnya	498.369	511.501	551.900	510.665	545.949	531.076

## LAMPIRAN 2

DATA PERBANKAN SULUT DAN GORONTALO	2005	2006		
	SEP.	JUL.	AGS.	SEP.
Jumlah Bank umum	19	20	21	21
Jumlah kantor bank umum (Termasuk Kantor Unit)	187	208	214	214
Jumlah BPR	24	23	23	23
Jumlah kantor BPR	34	37	37	37
ASSET (Jutaan Rp)	7.884.120	9.413.277	9.585.533	9.761.851
Bank Umum	7.766.861	9.265.730	9.439.100	9.615.418
BPR	117.259	147.547	146.433	<b>146.433</b>
DPK (Jutaan Rp)	5.697.072	6.512.544	6.612.191	6.669.642
Giro	1.018.189	1.267.190	1.209.762	1.250.733
Deposito	2.030.883	2.503.906	2.617.979	2.581.104
Tabungan	2.648.000	2.741.448	2.784.450	2.837.805
Kredit - Berdasarkan Lokasi Penggunaan (Jutaan Rp)	5.692.906	6.646.665	6.810.178	<b>6.810.178</b>
Kredit - Berdasarkan Bank Pelapor (Jutaan Rp)	4.784.673	5.608.514	5.706.765	5.814.627
Investasi	370.075	567.344	589.435	587.168
Modal Kerja	1.589.925	1.942.751	1.921.647	2.037.968
Konsumsi	2.824.673	3.098.419	3.195.683	3.189.491
Kredit UMKM -Plafon s.d. 5 M (Jutaan Rp)	3.085.807	3.491.744	3.583.069	3.617.025
L D R (%) - Berdasarkan Lokasi Penggunaan	99,93	102,06	102,99	102,11
L D R (%) - Berdasarkan Bank Pelapor	83,98	86,12	86,31	87,18
Kredit Sektoral - Outstanding (Jutaan Rp)	4.784.673	5.608.514	5.706.765	5.814.627
Pertanian	190.785	228.014	210.996	246.444
Pertambangan	4.645	6.358	6.235	6.170
Industri	146.135	153.898	162.058	159.896
Listrik, Gas & Air	172	314	332	445
Konstruksi	139.735	229.636	240.202	244.593
Perdagangan	1.271.301	1.559.176	1.560.703	1.640.646
Angkutan	31.535	43.034	44.446	46.688
Jasa Dunia Usaha	131.553	183.564	189.397	172.495
Jasa Sosial	15.084	80.259	78.907	82.299
Lainnya	2.853.728	3.124.261	3.213.489	3.214.951
NPLs Gross sektoral (Jutaan Rp)	256.048	338.318	352.961	347.305
Pertanian	37.074	46.465	46.695	46.928
Pertambangan	-	92	92	83
Industri	2.251	12.205	12.285	14.627
Listrik, Gas & Air	-	139	129	129
Konstruksi	7.395	14.935	20.081	20.855
Perdagangan	79.027	96.169	98.358	93.197
Angkutan	123	10.124	10.124	10.122
Jasa Dunia Usaha	2.984	6.565	7.436	10.456
Jasa Sosial	2.208	1.686	1.721	1.786
Lainnya	124.986	149.938	156.040	149.122
NPLs Netto setelah dikurangi PPAP (Jutaan Rp)	161.957	137.624	203.032	203.891
Rasio NPLs Gross sektoral (%)	5,35	6,03	6,18	5,97
Rasio NPLs Netto (%)	3,38	2,45	3,56	3,51
DATA PERBANKAN SULUT	2005	2006		
	SEP.	JUL.	AGS.	SEP.
Jumlah Bank umum	19	20	21	21
Jumlah kantor bank umum (Termasuk Kantor Unit)	146	160	165	165
Jumlah BPR	18	16	16	16
Jumlah kantor BPR	27	29	29	29
ASSET (Jutaan Rp)	6.718.602	7.973.490	8.098.431	8.266.050
Bank Umum	6.621.430	7.847.387	7.973.413	8.141.032
BPR	97.172	126.103	125.018	<b>125.018</b>

DPK (Jutaan Rp)	4.845.252	5.324.237	5.394.496	5.450.193
Giro	849.907	1.047.822	954.415	1.010.842
Deposito	1.795.755	2.105.060	2.228.890	2.183.205
Tabungan	2.199.590	2.171.355	2.211.191	2.256.146
Kredit - Berdasarkan Lokasi Penggunaan (Jutaan Rp)	4.635.008	5.422.542	5.580.062	<b>5.580.062</b>
Kredit - Berdasarkan Bank Pelapor (Jutaan Rp)	3.901.181	4.627.087	4.703.890	4.791.660
Investasi	331.429	490.707	512.939	511.834
Modal Kerja	1.242.731	1.584.019	1.598.238	1.646.721
Konsumsi	2.327.021	2.552.361	2.592.713	2.633.105
Kredit UMKM -Plafon s.d. 5 M (Jutaan Rp)	2.475.359	2.870.275	2.923.164	2.979.124
L D R (%) - Berdasarkan Lokasi Penggunaan	95,66	101,85	103,44	102,38
L D R (%) - Berdasarkan Bank Pelapor	80,52	86,91	87,20	87,92
Kredit Sektoral - Outstanding (Jutaan Rp)	3.901.181	4.627.087	4.703.890	4.791.660
Pertanian	152.117	181.197	194.163	199.339
Pertambangan	4.470	6.268	6.150	6.098
Industri	127.371	129.647	132.489	129.846
Listrik, Gas & Air	172	314	332	445
Konstruksi	124.923	213.232	220.646	224.738
Perdagangan	984.177	1.236.540	1.248.458	1.296.205
Angkutan	29.644	36.798	38.408	40.511
Jasa Dunia Usaha	128.012	176.584	176.864	165.057
Jasa Sosial	6.531	78.414	78.210	80.917
Lainnya	2.343.764	2.568.093	2.608.170	2.648.504
NPLs Gross sektoral (Jutaan Rp)	206.874	279.926	297.740	291.443
Pertanian	33.583	44.024	45.940	45.874
Pertambangan	-	92	92	82
Industri	2.129	8.765	8.969	11.337
Listrik, Gas & Air	-	139	129	129
Konstruksi	5.126	14.337	19.408	20.256
Perdagangan	50.383	57.854	60.289	55.541
Angkutan	90	6.249	6.249	6.247
Jasa Dunia Usaha	2.945	6.513	7.384	10.386
Jasa Sosial	1.418	1.667	1.691	1.759
Lainnya	111.200	140.286	147.589	139.832
NPLs Netto setelah dikurangi PPAP (Jutaan Rp)	140.860	104.723	175.871	177.116
Rasio NPLs Gross sektoral (%)	5,30	6,05	6,33	6,08
Rasio NPLs Netto (%)	3,61	2,26	3,74	3,70
<b>DATA PERBANKAN GORONTALO</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>		
	<b>SEP.</b>	<b>JUL.</b>	<b>AGS.</b>	<b>SEP.</b>
Jumlah Bank umum	8	8	8	8
Jumlah kantor bank umum (Termasuk Kantor Unit)	41	48	49	49
Jumlah BPR	6	7	7	7
Jumlah kantor BPR	7	8	8	8
ASSET (Jutaan Rp)	1.165.518	1.439.788	1.487.102	1.495.801
Bank Umum	1.145.431	1.418.343	1.465.687	1.474.386
BPR	20.087	21.445	21.415	<b>21.415</b>
DPK (Jutaan Rp)	851.820	1.188.307	1.217.695	1.219.449
Giro	168.282	219.368	255.347	239.891
Deposito	235.128	398.846	389.089	397.899
Tabungan	448.410	570.093	573.259	581.659
Kredit - Berdasarkan Lokasi Penggunaan (Jutaan Rp)	1.057.898	1.224.123	1.230.116	<b>1.230.116</b>
Kredit - Berdasarkan Bank Pelapor (Jutaan Rp)	883.492	981.427	1.002.875	1.022.967
Investasi	38.646	76.637	76.496	75.334
Modal Kerja	347.194	358.732	323.409	391.247
Konsumsi	497.652	546.058	602.970	556.386
Kredit UMKM -Plafon s.d. 5 M (Jutaan Rp)	610.448	621.469	659.905	637.901
L D R (%) - Berdasarkan Lokasi Penggunaan	124,19	103,01	101,02	100,87

<b>L D R (%) - Berdasarkan Bank Pelapor</b>	103,72	82,59	82,36	83,89
<b>Kredit Sektoral - Outstanding (Jutaan Rp)</b>	883.492	981.427	1.002.875	1.022.967
Pertanian	38.668	46.817	16.833	47.105
Pertambangan	175	90	85	72
Industri	18.764	24.251	29.569	30.050
Listrik, Gas & Air	-	-	-	-
Konstruksi	14.812	16.404	19.556	19.855
Perdagangan	287.124	322.636	312.245	344.441
Angkutan	1.891	6.236	6.038	6.177
Jasa Dunia Usaha	3.541	6.980	12.533	7.438
Jasa Sosial	8.553	1.845	697	1.382
Lainnya	509.964	556.168	605.319	566.447
<b>NPLs Gross sektoral (Jutaan Rp)</b>	49.174	58.392	55.221	55.862
Pertanian	3.491	2.441	755	1.054
Pertambangan	-	-	-	1
Industri	122	3.440	3.316	3.290
Listrik, Gas & Air	-	-	-	-
Konstruksi	2.269	598	673	599
Perdagangan	28.644	38.315	38.069	37.656
Angkutan	33	3.875	3.875	3.875
Jasa Dunia Usaha	39	52	52	70
Jasa Sosial	790	19	30	27
Lainnya	13.786	9.652	8.451	9.290
<b>NPLs Netto setelah dikurangi PPAP (Jutaan Rp)</b>	21.097	32.901	27.161	26.775
<b>Rasio NPLs Gross sektoral (%)</b>	5,57	5,95	5,51	5,46
<b>Rasio NPLs Netto (%)</b>	2,39	3,35	2,71	2,62